

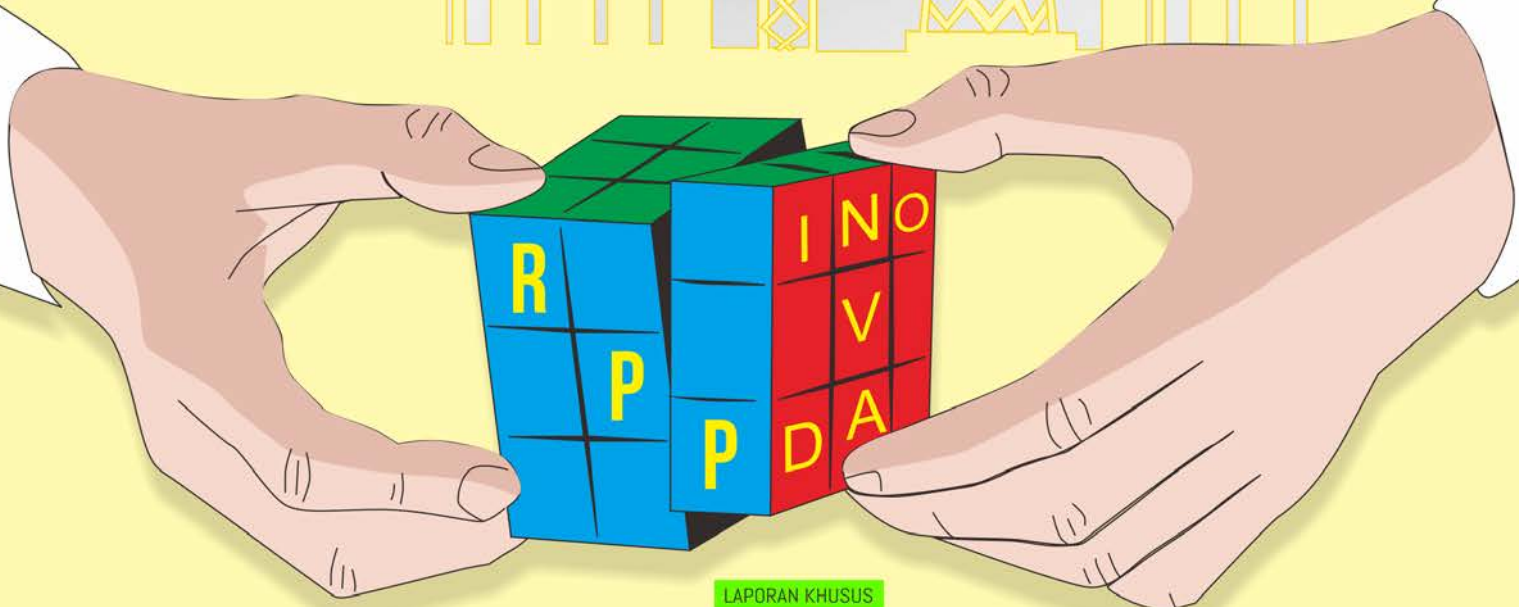


Volume 1 No 5 | Desember 2016

mediaBPP

Jendela Informasi Kelitbang

PENANTIAN PANJANG REGULASI INOVASI



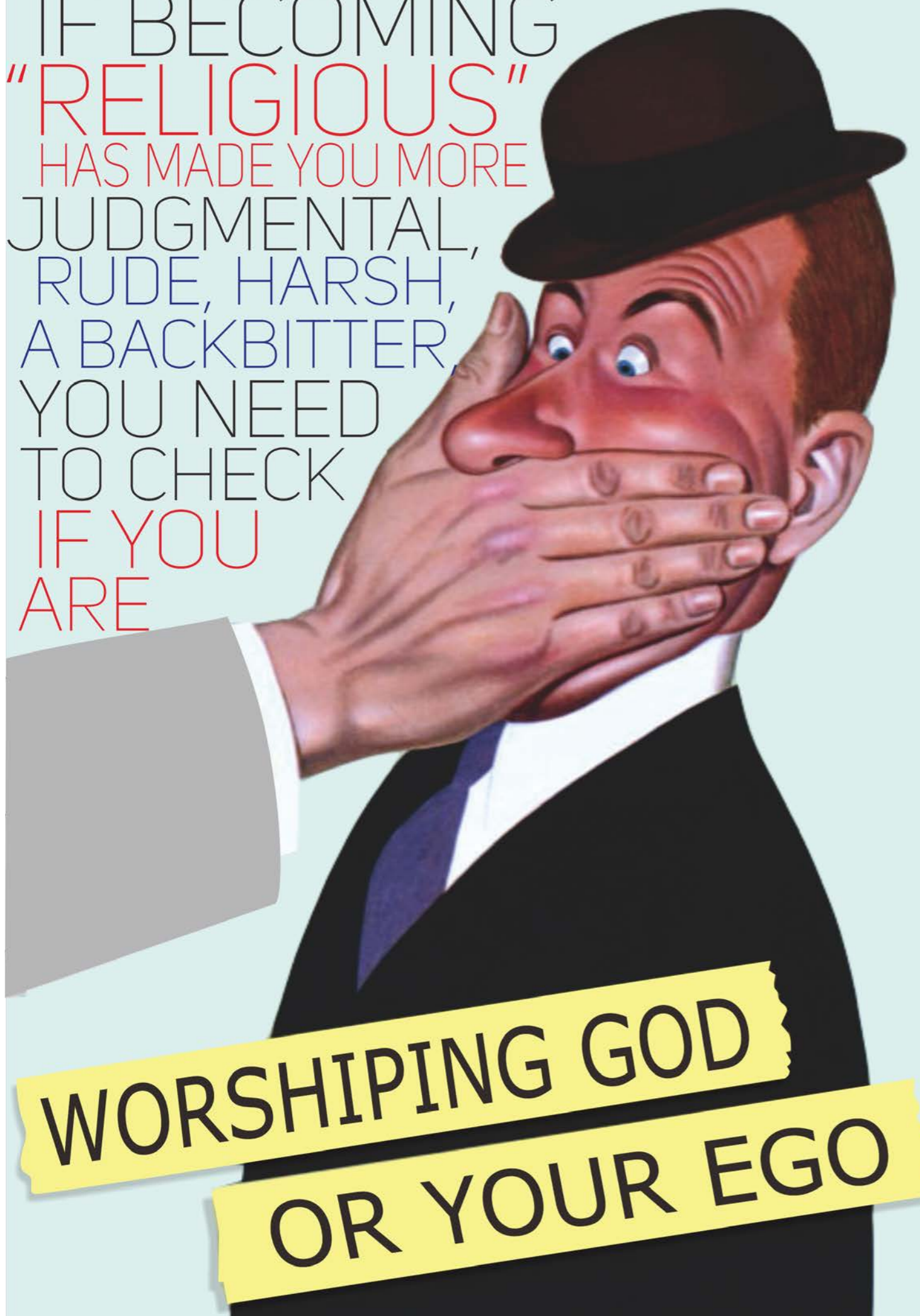
LAPORAN KHUSUS

**SEMARAK
KEMERIAHAN HARI NUSANTARA 2016**
(LIPUTAN REPORTER MEDIA BPP DARI LEMBATA, NUSA TENGGARA TIMUR)



<http://litbang.kemendagri.go.id>
Majalah Dwi Bulanan
p-ISSN 2503 3352
e-ISSN 2528 4181

IF BECOMING
 "RELIGIOUS"
 HAS MADE YOU MORE
 JUDGMENTAL,
 RUDE, HARSH,
 A BACKBITTER,
 YOU NEED
 TO CHECK
 IF YOU
 ARE



WORSHIPING GOD
 OR YOUR EGO

Memasuki penghujung 2016, beragam kegiatan dan program telah dilaksanakan oleh BPP Kemendagri, mulai dari Rakor Litbang hingga penyusunan RPP Inovasi Daerah yang kini memasuki tahap penge-
 sahan dari Kemenkum HAM. Draft tersebut yang membuat segenap redaksi membahas lebih lanjut melalui laporan investigasi dalam Rubrik Laporan Utama *Media BPP* Edisi Desember 2016

Seolah memberi 'angin segar' pada BPP Daerah, RPP ini sangat dinanti-nanti oleh daerah sebagai payung hukum dalam melakukan inovasi. Meski bukan hal yang mudah dalam menyusun RPP tersebut, banyak batu terjal yang menghadang, perang argumentasi, beragam kritik dan saran juga banyak diterima BPP Kemendagri tapi tidak menyulutkan semangat BPP untuk menyempurnaan draft yang seharusnya dapat selesai Oktober 2016 itu.

Peliputan kali ini, kami menemui beberapa narasumber dari berbagai pihak. Mulai dari Pusat Inovasi Daerah, Bagian Perencanaan BPP Kemendagri, dan pihak-pihak ahli dari luar seperti LAN (Lembaga Administrasi Negara) dan KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) untuk membahas permasalahan RPP tersebut. Semuanya kami rangkum dalam judul "Penantian Panjang Regulasi Inovasi"



Tidak hanya itu, kami juga membahas beragam inovasi yang sudah dilakukan berbagai daerah, seperti Yogyakarta dan Sumatera Utara. Semuanya kami rangkum untuk men-
 yuguhkan BPP Kemendagri lebih baik lagi sebagai induk dari BPP daerah.

Selain itu, untuk menyajikan suguhan informasi yang menarik dan tidak membosankan, kami juga membahas mengenai Pesona Lembata melalui Hari Nusanantara 2016 yang diselenggarakan oleh Kemendagri. Keindahan Lembata dan segala pernik-perniknya kami sajikan khusus dalam rubrik Laporan Khusus Hari Nusanantara.

Semoga pesona Lembata, dan manisnya penduduk lokal yang ramah dapat mempererat persatuan bangsa yang belak-
 kang ini bercerai berai karena paham perbedaan. Karena kami selalu berusaha menyuguhkan informasi terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia yang lebih baik.

Terakhir, redaksi berharap pada 2017 nanti BPP Kemendagri dapat menjadi lebih baik lagi men-
 nelurkan buah pemikirannya untuk kemajuan bangsa. Selamat Tahun Baru 2017! Selamat menyongsong masa depan lebih baik! Ting-
 katkan gelora penelitian untuk Indonesia yang Hebat!

Redaksi

mediaBPP

Diterbitkan oleh
 BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Media BPP menerima Opini, Cer-
 pen, dan Surat Pembaca.
 Kirimkan Opini, Cerpen, dan Surat Pembaca Anda
 melalui surel kami ke alamat di bawah ini.

Alamat Redaksi
 Jalan Kramat Raya No. 132, Jakarta Pusat
 mediabppkemendagri@gmail.com

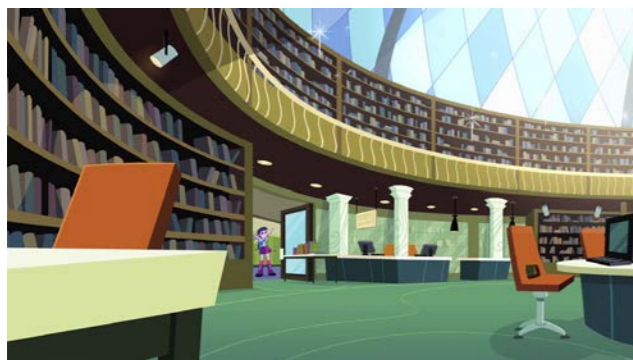
PELINDUNG	MENTERI DALAM NEGERI Tjahjo Kumolo
PENANGGUNG JAWAB	Dodi Riyadmadji
PEMIMPIN REDAKSI	Jonggi Tambunan
REDAKTUR PELAKSANA	Moh. Ilham A. Hamudy
REDAKTUR	Syabnikmat Nizam Subiyono Rochayati Basra Indrajaya Ramzie
PENYUNTING	Bungaran Damanik Frisca Natalia Elpino Windy Niyan Nurin Ridha Putri
PELIPUTAN	M. Saidi Rifky Indah F. Rosalina
PENATA LETAK DAN GRAFIS	M. Saidi Rifky

Mengulas Hasil Kajian BPP



Membaca *Media BPP* sangat mengasyikkan, terlebih bagi saya untuk menambah wawasan terhadap penyelenggaraan BPP, baik di pusat maupun di daerah. Sebagai media informasi dan internal, *Media BPP* sebaiknya lebih banyak menyajikan berita seputar permasalahan dan hasil-hasil penelitian/kajian, baik di pusat maupun di daerah dari masa ke masa, terlebih hasil penelitian yang sudah dijadikan rujukan/masukan dalam penyusunan sebuah kebijakan, baik UU (Undang-Undang), Perda (Peraturan Daerah), maupun PP (Peraturan Pemerintah) serta kebijakan lainnya. Selain itu, terkait penataan gambar dan foto mohon jangan dominan, agar konten beritanya lebih banyak

Sarana Perpustakaan yang Modern



BPP Kemendagri sebagai sebuah lembaga penelitian di bidang Pemerintahan Dalam Negeri, harus didukung oleh prasana perpustakaan yang modern, nyaman, dan buku-buku lengkap terkait Pemerintahan Dalam Negeri. BPP sebaiknya dijadikan *knowledge center* bagi para pegawainya yang sedang belajar ilmu pemerintahan. Produk-produk hasil penelitian dan data-data pendukung yang dikumpulkan dari lokus penelitian dan kajian juga sebaiknya tersimpan dalam sebuah laboratorium data guna kepentingan penelitian di masa depan. BPP dan hasil-hasil penelitian/kajian seyogyanya dijadikan rujukan bagi komponen lingkup Kemendagri dan pemerintah daerah dalam penyusunan kebijakan yang menjadi tugas dan wewenangnya.

Komar, JFU Bagian Umum

Terima kasih banyak Sdr. Komar atas beberapa masukannya. Memang betul, beberapa hasil kajian BPP Kemendagri dan Daerah sendiri sangat penting untuk dipublikasikan, beberapa kali kami sudah kami coba liputan ke beberapa daerah seperti Riau, Palembang, dan Padang dan sempat diulas dalam rubrik Profil BPP Daerah Media BPP Edisi Juni 2016. Namun, masukan dari Sdr. Komar akan kami ulas lebih dalam pada rubrik Laporan Utama Media BPP edisi selanjutnya.

Perpustakaan memang menjadi pusat dari ilmu pengetahuan yang sangat penting untuk bekal para peneliti dan pegawai BPP Kemendagri. Rencananya, dalam waktu dekat perpustakaan BPP Kemendagri akan dibangun pada gedung baru lantai 1 dengan konsep modern. Kita semua berharap semua rencana tersebut bisa berjalan dengan lancar dan secepatnya dapat diakses oleh semua warga BPP.

Redaksi



Tingkatkan Performa BPP

Sebagai Badan yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan Kementerian Dalam Negeri, tentu BPP dituntut untuk menunjukkan performa terbaiknya dengan menunjukkan hasil-hasil penelitian dan kajian yang bermutu dan efektif. Namun sejauh ini, performa para peneliti dan pegawai BPP sendiri masih kurang efektif dan seolah jauh dari kata semangat meningkatkan kinerja. Alangkah baiknya para pegawai dan peneliti bisa lebih bisa meningkatkan kinerja dan menunjukkan hasil penelitiannya yang bermutu dan berkualitas sebagai lembaga *think tank* Dalam Negeri

Egi Rachman

JFU Bagian Rumah Tangga BPP Kemendagri

Terima kasih banyak atas beberapa masukan Sdr. Egi, semoga masukan dari Saudara dapat pemicu semangat para pegawai BPP Kemendagri untuk meningkatkan performa kinerjanya.

Redaksi

BPP DAERAH 28

Provinsi Sumatera Utara
Berprestasi di Tengah Keterbatasan

Dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan kesejahteraan yang cukup maju, membuat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) setempat terus bersaing meningkatkan prestasinya, terutama di bidang penelitian. Meski dana dan perhatian pemerintah dirasa kurang, mereka selalu optimis dan bekerja maksimal. Lantas seperti apa prestasi yang telah diukir?



DAERAH 30

Menelusuri Pulau Pinggiran

Di tengah segala ketegangan politik, ibu kota negara Indonesia ini memunyai banyak tempat yang bisa dikunjungi sebagai tempat *refreshing* dan penghilang penat. *Yups!* Ada gugusan pulau di pinggiran Jakarta yang biasa kita kenal dengan Pulau Seribu.

Tokoh 36

Tepat pada 3 November 2016, sebuah SK (Surat Keputusan) Menteri jatuh pada pria asal Bantul, Yogyakarta, **Dodi Riyadmadji**. Bapak satu anak itu diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. Lantas bagaimana perjalanan karir seorang Dodi Riyadmadji dan apa saja rencana gebrakan dia untuk memajukan lembaga 'think tank' Pemerintahan Dalam Negeri itu?

AKTIVITAS

- FDA Penyelenggaraan Pilkada **8**
- Peluncuran SAPa **9**
- Sharing Session.. **10**
- Bangun Kemitraan.. **10**
- BPP Jalin Kerja Sama.. **11**

KILAS BERITA 34-35

- GAYA HIDUP**
- Alice Norin, Meski Hamil Tetap.. **40**
 - Bahaya Tubuh Terlalu Kurus **42**

RESENSI FILM

- Babak Baru Kisah Arini dan Mei Rose **44**

RESENSI BUKU

- Gender dalam Perspektif Penelitian **46**

KOMIK 49

SASTRA

- Avalokitesvara **50**

OPINI

- Meningkatkan Mutu Penelitian dan Pengembangan **54**
- Trump dan Hiperealitas Media Sosial **56**

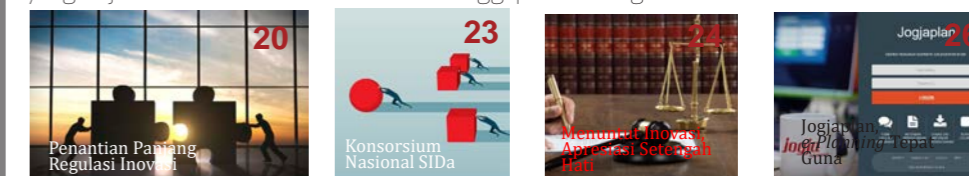
CATATAN

- Ormas Preman **58**

LAPORAN UTAMA 18-27

PENANTIAN PANJANG REGULASI INOVASI

Pemunculan ide dan daya saing akan inovasi untuk memajukan suatu daerah masing-masing sejatinya sudah banyak terlihat sejak era reformasi sejalan dengan ditetapkannya otonomi daerah. Namun sayangnya pemerintah Indonesia belum konsen dengan legitimasi yang kuat dalam mendorong semangat para inovator di beberapa daerah. Akibatnya, banyak inovator yang terjatuh dalam ranah hukum karena dianggap melenceng dari aturan.



LAPORAN KHUSUS 12-17

CERITA DARI PERAYAAN HARI NUSANTARA

Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 13 Desember 2016 menjadi sejarah dan catatan penting bagi pulau terpencil di negeri timur Indonesia. Hari itu, gemicik hujan dan selimut awan mendung menutupi matahari Lembata yang biasa menyongsong dengan hebatnya.





TERJUN PAYUNG - Disaksikan para tamu undangan, Tentara Nasional Indonesia melakukan atraksi terjun payung, dalam perhelatan Hari Nusantra 2016 di Lembata, Nusa Tenggara Timur

FORUM DISKUSI AKTUAL

ANGGARAN PENYELENGGARAAN PILKADA

JAKARTA – BPP Kemendagri melalui Pusat Litbang Pembangunan dan Keuangan Daerah menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual (FDA) dengan tema “Kesiapan Anggaran Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2017” yang bertempat di Aula BPP Kemendagri, Jl. Kramat Raya, Jakarta.

Menurut Indrajaya Ramzi, Kepala Puslitbang Pembangunan dan Keuda, acara tersebut merupakan upaya mendiskusikan permasalahan anggaran yang dihadapi pemerintah daerah ketika menyelenggarakan Pilkada serentak, terutama dalam hal Pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

“Diharapkan dapat mencari solusi atas permasalahan anggaran Pilkada, serta dapat mengetahui sejauh mana kesiapan daerah dari unsur penyelenggara dalam menghadapi Pilkada serentak 2017, selain itu diharapkan mencari solusi atas proses Pilkada yang bisa terakselerasi dengan penyusunan RPJMD,” kata Indrajaya.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Plt. Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji serta mengundang 60 peserta diskusi. Di antaranya dari BPP dan komponen Kemendagri lainnya, lembaga pemerintah dan pelaksana Pilkada di beberapa daerah di Indonesia. Adapun narasumber yang turut diundang dalam acara tersebut adalah Moh. Fadlilah Anggota KPU Provinsi DKI Jakarta, Moch. Adrian MV dari Ditjen Bina Keuda Kementerian Dalam Negeri, Didik Supriyanto dari Perludem, serta Pengamat Politik dan Peneliti LIPI Siti Zuhro.

Indrajaya berharap acara tersebut bisa menghasilkan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri terkait pelaksanaan Pilkada serentak 2017. Indrajaya menambahkan, diskusi difokuskan untuk mengidentifikasi kendala dan hambatan dalam penyediaan anggaran Pilkada serentak.

“Selain itu, difokuskan untuk merumuskan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menjamin tersedianya anggaran yang memadai tepat pada waktunya,” tambah Indrajaya

Persoalan pilkada menarik dibicarakan

Dalam sambutannya Plt. Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji menilai masalah Pilkada menarik didiskusikan, pasalnya, masih banyak permasalahan Pilkada harus dicarikan solusi agar Pilkada semakin baik di masa men-



datang.

Dodi melihat fenomena Pilkada tahap satu diikuti 269 daerah otonom, masih memiliki beberapa kendala, di antaranya terdapat 6 daerah bermasalah dan 1 daerah tertunda pelaksanaannya akibat sengketa. Menurut Dodi, hal tersebut jangan sampai terulang lagi pada Pilkada mendatang yang diikuti 101 daerah otonom, 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota.

Permasalahan yang perlu kajian lebih lanjut, menurut Dodi adalah terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Menurutnya Pemilu yang akan dilaksanakan 2017 masih kekurangan dana hibah dari daerah sebesar 500 miliar. Sementara, dana hibah rawan digunakan oleh kepala daerah yang menjadi petahana dalam Pilkada.

“Beberapa permasalahan Pilkada harus segera diselesaikan, seperti kasus NPHD ini, khususnya untuk beberapa daerah yang memiliki rawan cukup tinggi dalam Pilkada. Ini menjadi perhatian bersama agar Pilkada dapat berjalan dengan baik,” ucap Dodi.

Pilkada serentak yang sudah terlaksana tersebut memunculkan harapan besar agar setelah pemilu pemerintah daerah dapat menyusun perencanaan atau RPJMD, hal demikian sangat penting dilakukan oleh daerah, agar semua janji selama kampanye bisa diakomodasi dalam penyusunan RPJMD tersebut.

Sebaiknya didanai dari APBN

Selain permasalahan di atas, menurut Didik Supriyanto, dari Perludem, saat ini anggaran Pilkada serentak dari APBD berdampak pada ketidakpastian

pelaksanaan Pilkada karena ketidaksiapan anggaran sejumlah daerah. Standar anggaran Pilkada tiap daerah pun sulit diukur objektivitas besarnya. Tujuan efektif dan efisiensi melalui Pilkada serentak menjadi jauh panggang dari api. Cenderung korup, karena dana yang diajukan KPU di provinsi/kabupaten/kota disetujui kepala daerah yang menjadi calon petahana di Pilkada.

Untuk itu, Perludem menyarankan agar anggaran Pilkada didanai oleh APBN, sebagai salah satu solusi penganggaran Pilkada yang efektif. “Solusi anggaran Pilkada dari APBN merupakan konsekuensi pemilu serentak dan kelembagaan KPU yang nasional, tetap, dan mandiri. APBN memastikan waktu penyelenggaraan dan standar anggaran tiap daerah, sehingga Pilkada menjadi lebih efektif, efisien dan terhindar dari intervensi dan korupsi petahana di daerah,” saran Didik.

Data Perludem 2016 menunjukkan terdapat beberapa permasalahan paguan anggaran Pilkada di daerah. beberapa daerah tidak masuk akal ketika melakukan paguan dana Pilkada. Sebagai contoh masih ada daerah dengan anggaran pemilu lebih tinggi dari dana yang diajukan setelah disetujui hingga selisih 20 miliar, dan masih banyak permasalahan lainnya. Hal tersebut menurut Didik dikarenakan, belum siapnya KPU daerah mengelola anggaran.

Pengamat politik dan peneliti LIPI Siti Zuhro mengatakan hal yang sama. Mengutip data FITRA, kebutuhan anggaran Pilkada di semua daerah otonom yang memiliki total 541 provinsi dan kabupaten/kota senilai Rp 17 triliun atau

tidak sampai 1 persen dari total APBN. Alasan pemerintah terlalu membebaskan APBN pun menurut Siti tidak tepat, karena Pilkada merupakan kegiatan rutin yang sama dengan kegiatan/program rutin pemerintah lainnya.

“Untuk Pilkada 2017, kebutuhan anggaran seharusnya bisa dipenuhi APBN. Jika pada 2015 yang dilaksanakan di 269 daerah menghabiskan Rp 8,1 triliun, pada 2017 anggaran Pilkada justru akan berkurang karena hanya dilaksanakan di 101 daerah,” terang Siti.

Menurut Siti jika masih dibebankan kepada APBD, daerah terpaksa harus mengorbankan belanja publik seperti untuk kesehatan dan infrastruktur, hanya untuk kepentingan Pilkada. (MSR)

BPP KEMENDAGRI HADIRI PELUNCURAN APLIKASI SAPA DAN PPID

JAKARTA – Salah satu bentuk dukungan terhadap reformasi birokrasi, khususnya dalam hal keterbukaan informasi publik dengan peningkatan kinerja pelayanan pengaduan atau aspirasi masyarakat, Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Penerangan Kemendagri mengembangkan sebuah aplikasi Sarana Pengaduan dan Aspirasi (SaPA) serta Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Aplikasi tersebut diluncurkan secara resmi oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Dodi Riyadmadji dalam acara *Workshop* Aplikasi SaPA dan PPID, di Hotel Redtop Jakarta, 24/11. Acara tersebut dilaksanakan selama dua hari yaitu pada 24-25 November 2016, dengan peserta dari berbagai komponen Kemendagri dan pemerintah daerah. Dalam acara tersebut, BPP Kemendagri juga turut menjadi undangan yang diwakili oleh Kasubbag Perpustakaan, Informasi, dan Dokumentasi.

Dalam pidatonya, Dodi menyampaikan, kedua aplikasi tersebut dikembangkan sebagai aplikasi pengaduan dan aspirasi yang tidak hanya ditujukan kepada komponen Kemendagri, tetapi juga untuk pemerintah daerah yang meliputi provinsi, kabupaten, dan kota di seluruh Indonesia.

“SaPA yang awalnya hanya diperuntukkan bagi komponen sejak 2013, kini bisa digunakan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Sementara untuk PPID saat ini sudah dilaksanakan di berbagai daerah, sekira 73 persen daerah sudah memiliki PPID, dan tinggal beberapa daerah seperti Kalimantan Utara, Maluku Utara, serta 130 kabupaten dan kota,” terang Dodi, yang juga menjabat sebagai Plt. Kepala BPP Kemendagri.

Selain Dodi, Handayani Ningrum, Kepala Bidang Fasilitas Pengaduan dan Pengelolaan Informasi mengatakan, kedua aplikasi tersebut juga akan terintegrasi dengan komponen dan daerah.



Adminsitrator SaPA dan PPID nantinya akan mendisposisikan kepada komponen dan daerah tertentu untuk setiap pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada daerah ataupun komponen tertentu.

“Setiap komponen dan daerah nantinya harus menjawab pengaduan masyarakat. Administrator SaPA dan PPID, akan mendisposisikan setiap aduan tersebut kepada para PIC di masing-masing daerah dan komponen,” kata Ningrum.

Workshop yang diikuti beberapa peserta dari daerah tersebut juga diisi dengan sesi praktik penggunaan aplikasi SaPA dan PPID. Pelaksana berharap para peserta dapat memahami cara penggunaan aplikasi pengaduan tersebut secara baik dan benar.

Dukung reformasi birokrasi

Hadirnya aplikasi SaPA dan PPID diharapkan menjadi salah satu bentuk dukungan Kemendagri terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan pungutan liar (pungli). Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo baru-baru ini telah mengeluarkan sebuah sarana pengaduan pungli melalui sistem *online* yaitu “Saber Pungli”.

Kepala Pusat Penerangan sekaligus Plt. Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji, berharap keberadaan SaPA dan PPID diharapkan menjadi salah satu upaya Kemendagri dalam mendukung

saber pungli, dan reformasi birokrasi.

“Aplikasi SaPA dan PPID mendukung reformasi hukum, Kemendagri sebagai induk pemerintah daerah akan dengan mudah memantau dan mengevaluasi daerah, serta meminimalisasi terjadinya penyimpangan-penyimpangan. Hal itu dikarenakan Kemendagri bisa melihat langsung setiap aspirasi dan aduan yang masuk dari masyarakat di berbagai daerah,” kata Dodi.

Selain reformasi di bidang hukum, Dodi mengatakan inisiasi menciptakan kedua sistem tersebut merupakan langkah Kemendagri dalam mendukung transparansi pelayanan publik. Saat ini, terang Dodi, pelayanan publik semakin beradaptasi seiring dengan kemajuan di bidang teknologi informasi. Pemerintah pun harus mengimbangi secara cepat kemajuan tersebut dengan berbagai fitur dunia teknologi. Maka dari itu, *e-Government* menjadi salah satu solusi yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Untuk itu, selain upaya mendorong pemerintah dalam melaksanakan *e-Government*, SaPA maupun PPID juga merupakan salah satu bentuk optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi tersebut.

Tidak lupa, Dodi juga menyarankan kepada setiap komponen Kemendagri agar segera mengoptimalkan sistem pengaduan tersebut dengan terus berkoordinasi dengan Puspen Kemendagri. Kepada daerah yang belum memiliki, Dodi juga menekankan agar pembentukan sarana pengaduan tersebut dilakukan secepat mungkin.

“Daerah yang belum membentuk harus segera membentuk sarana pengaduan tersebut, bagi daerah yang belum membentuk, Kemendagri melalui Puspen Kemendagri membuka ruang untuk konsultasi terkait pembentukan PPID maupun teknis penggunaan SaPA di daerah,” ujar Dodi.(MSR)

PERWAKILAN BPP HADIRI SHARING SESSION METODE PENELITIAN GENDER



JAKARTA – Beberapa peserta dari Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri turut hadir sebagai undangan dalam acara “*Knowledge Sharing Session – Gender and Social Inclusion Perspective in Research for Development*” yang digagas oleh Knowledge Sector Initiative (KSI), di Hotel Arya Duta Jakarta. Peserta dari BPP tersebut di antaranya Teguh Narutomo dari Puslitbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri, Moh. Ilham A Hamudy Kasubag Perpustakaan Informasi dan Dokumentasi BPP Kemendagri, dan Sitti Aminah Peneliti BPP Kemendagri.

Acara tersebut merupakan diskusi bagaimana cara melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan gender dan sosial inklusi. Selain dihadiri dan dibuka langsung oleh pihak BPN/Bappenas, acara juga dihadiri oleh beberapa narasumber dan pembahas di antaranya Lies Marcus yang memberikan penilaian terhadap beberapa naskah penelitian dengan perspektif gender dari 16 mitra KSI.

Selain Lies Marcus, narasumber lainnya adalah Eko Utomo dari Indonesia Infrastructure Initiative yang memaparkan tema “Integration of Gender Equality and Social Inclusion in IndII,” Widjanti Isdijoso dari SMERU Research Institute memaparkan tema seputar pengalaman SMERU mengaplikasikan GESI (Gender and Social Inclusion) dalam penelitian ekonomi dan kemiskinan, serta narasumber Siti Maimunah dari Sajogjo Institute, dengan tema Visibilitas Perempuan Pejuang Tanah Air.

Sitti Aminah, Peneliti BPP Kemendagri merasa senang dengan adanya acara tersebut, menurutnya acara tersebut memberi pengetahuan baru tentang metode penelitian dengan pendekatan gender. Tidak lupa ia menyarankan agar KSI bersedia memberikan pelatihan

terkait metode penelitian dengan perspektif gender, khususnya kepada para peneliti yang bergerak di pemerintahan seperti BPP Kemendagri.

“KSI diharapkan bisa memberikan pelatihan dan pemahaman terkait metode penelitian dari perspektif gender khususnya GESI, hal tersebut dikarenakan lembaga penelitian yang ada di kementerian lekat sekali dengan rekomendasi kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat banyak,” ucap Sitti.

Semangat perubahan

Dalam kesempatan yang sama, Lies mengatakan, pada umumnya penelitian GESI harus dititikberatkan pada semangat perubahan, bukan hanya sekadar riset.

“Semangat perubahan bangsa, harus dimulai dari sejak bagaimana sebuah riset didesain, bagaimana pendekatannya, bagaimana memastikan ketersediaan data, serta sejak awal harus sudah mempersiapkan jika data tidak ada. Intinya lebih kepada pengelolaan pengetahuan untuk perubahan,” kata Lies.

Menurut Lies, riset GESI sangat diutamakan menggunakan metode partisipatif, dengan melakukan pelibatan terhadap perempuan secara dekat. Selain itu, desain riset harus mampu membuat visibilitas perempuan. Lies menambahkan Riset yang dilakukan juga harus menjelaskan perubahan apa yang akan dicapai dalam relasi gender tersebut.

“Harus sampai kepada pemahaman, setiap pengalaman perempuan itu ‘sah’ sebagai kebenaran. perempuan tidak bicara pun itu kebenaran, ketika konteksnya kekerasan. Tinggal bagaimana kita memahami diamnya itu,” terang Lies.

Kemudian Lies juga menjelaskan cara membaca data yang harus dilakukan para periset, menurut Lies, data pilah gender belum apa-apa jika hanya sebuah data. Data tersebut baru bermakna jika sudah memiliki statistik gender, yang memperlihatkan letak kesenjangan. Selain itu, riset GESI diharapkan pada masa mendatang dapat menjadi pelajaran bagi perempuan lain dan untuk mengembangkan pengetahuan di bidang GESI.

Terakhir Lies juga berharap hadirnya kesempatan lanjutan terkait isu-isu yang dianggap netral terkait gender diselenggarakan lagi, bukan hanya oleh KSI, tetapi lembaga donor lainnya. (MSR)

Bangun Kemitraan Dengan Lembaga Donor

JAKARTA – Harapan meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan pengembangan menjadi agenda utama Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri pada tahun mendatang. Beberapa cara yang sudah ditempuh pada tahun lalu, dengan membangun jejaring kemitraan dengan beberapa lembaga donor, seperti ini akan semakin ditingkatkan pada tahun mendatang.

Atas dasar itulah, BPP Kemendagri mengadakan pertemuan dengan mengundang beberapa lembaga donor seperti KOMPAK (Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan), Plan Internasional, Hivos International, UNICEF (Badan PBB untuk anak-anak), serta Lembaga Kerja Sama Internasional Sekretariat Jenderal Kemendagri pada Desember lalu di Aula BPP Kemendagri.

Dalam acara tersebut Plt. Kepala BPP Kemendagri Dodi Riyadmadji mengatakan pentingnya peningkatan kapasitas lembaga penelitian dalam mensuplai naskah yang akan diterapkan menjadi kebijakan Menteri Dalam Negeri. Dodi juga berharap pertemuan dapat memberikan hasil kerja sama antara BPP dengan beberapa lembaga Donor tersebut.

“Banyak hal bisa dibantu, bisa terkait dengan pengembangan SDM maupun metode penelitian sehingga bisa menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat, bagaimana di antara kawan-kawan dari lembaga donor nantinya bisa bergerak dan berkolaborasi dengan BPP Kemendagri,” kata Dodi

Mengenai acara tersebut, Rasita dari Plan Internasional mengaku senang. Menurutnya acara tersebut bisa memberi informasi akan peluang bagi Plan Internasional untuk memberikan pengaruh kebijakan yang tepat guna, khususnya dalam hal pengentasan kemiskinan di daerah.

“Selama ini kita tidak tahu harus masuk dari mana untuk memengaruhi pemerintah, dengan acara ini kami menjadi tahu dan seperti menemukan pintu masuk, agar intervensi kami bisa diterima oleh pemangku kepentingan,” ucap Rasita. (MSR)

BPP Kemendagri Akan Jalin Kerja Sama dengan UNNES

JAKARTA – Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri kedatangan tamu dari Universitas Negeri Semarang yang membahas terkait kerja sama inovasi daerah. Pertemuan yang berlangsung selama dua jam di Aula BPP Kemendagri itu membahas mengenai desa edu wisata yang nantinya dapat menjadi percontohan inovasi desa lain.

Plt. Kepala BPP Kemendagri, Dodi Riyadmadji menyambut positif niat baik tim UNNES dalam menjalin kerja sama bersama BPP. “Soal desa wisata, saya punya pengalaman di Bali dan Jogja, terdapat banyak penempatan yang menyediakan banyak kamar sekaligus mengajarkan orang menari, membuat, kami sudah bekerja sama dengan Kempar. Saya kira itu bisa menjadi contoh, dan menarik karena memperkenalkan kultur Indonesia,” papar Dodi memberi masukan.

Dari UNNES sendiri sebenarnya sudah menciptakan beberapa inovasi di daerah yang langsung dipraktikkan oleh beberapa civitas akademik UNNES. Seperti pengembangan museum konservasi. “Selain itu, sebenarnya kita sedang mengembangkan museum konservasi. Mengarah pada visi misi kami, dan sesuai disiplin ilmu Fakultas Sosial. Kita bisa kerjasamakan dengan detail. Sekarang sedang menyiapkan infrastruktur dasarnya,” ungkap Juhaidi, Kepala Laboratorium Geografi UNNES.

Hal itu langsung ditanggapi oleh Kepala Bagian Perencanaan, Mohammad Noval. Ia mengatakan terkait rencana program. “Sebenarnya orientasi UNNES sudah sejalan dengan tupoksi kita. Kita lebih ke sifatnya perumusan

kebijakan dan teknis. Yang ingin saya tanyakan fokus kerja samanya kemana? Apakah bisa menindaklanjuti hasil penelitian yang ada lalu disinergikan untuk tindak lanjut. Saya rasa UNNES juga tidak ingin hasil penelitiannya masuk ke laci perpustakaan, ada hasil tindak lanjut melalui pintu BPP,” saran Noval.

Masukan-masukan dan pendapat itu diterima oleh Plt. Kepala BPP untuk selanjutnya menjadi bahan diskusi kerja sama lebih lanjut. “Intinya kami menyambut baik rencana kerja sama ini. Apa-apa yang sudah dipaparkan, bisa memberi semangat. Karena memang bekerja di litbang tiada hari tanpa ide, oleh karena itu, hari ini hari yang sangat baik bagi UNNES dan BPP Kemendagri. Kami mengharapkan ada realisasi dari apa yang sudah dibicarakan ini pada 2017 mendatang,” tutup Dodi

Kerja sama berupa praktik kerja

Dalam kesempatan yang sama, Mustofa mengatakan, pihaknya telah banyak mengaplikasikan bentuk Nawacita yang diamanatkan oleh Presiden Jokowi dalam bentuk praktik langsung.

“Kami turun ke masyarakat tidak hanya memaparkan teori dalam pemberdayaan masyarakat, tapi langsung praktik. Jadi mau tidak mau mereka harus menjadi desa yang berdaya dan berinovasi dengan kegiatan bersama, mungkin kita bisa melakukan kegiatan dengan lembaga lain, seperti Kemendagri ini agar bisa dikembangkan menjadi desa percontohan,” paparnya.

Beberapa hal yang sudah diciptakan oleh UNNES juga seperti pengembangan museum konservasi dan kapasitas pengembangan resiko bencana. “*Grand*

design kita sudah sampai desa pintar, pengembangan desa cerdas. *Smart Village*. Kapasitas pengembangan resiko bencana. Sudah mengirim beberapa mahasiswa untuk pengembangan peodelan khususnya yang rawan bencana. Kami mengembangkan sarana prasarana di masyarakat, yang barangkali sejauh ini belum banyak dikenal masyarakat umum. Kira-kira itu sedikit gambaran dari model desa inovasi kami,” papar Mustofa.

Hal itu juga ditanggapi oleh Moh. Ilham A Hamudy dari BPP Kemendagri yang sebelumnya juga pernah bekerja sama secara informal dengan pihak UNNES dalam bidang pengelolaan Jurnal Bina Praja.

Menurut Ilham, kerja sama ini harus menemukan titik konkret terkait *smart village*, harus ditindaklanjuti dalam *pilot project* yang bisa diimplementasikan pada penelitian. “Mungkin kita bisa mengirim peneliti, semacam *fellowship*, atau kerja sama dalam riset lain. Tiap pusat ada tema yang sudah disediakan, kita bisa riset *bareng* dengan pola standar minimal. Tema riset desa yang bisa dikerjasamakan, bentuknya seperti pola kerja sama, dan batasan mana yang kami bisa selaras dengan UNNES,” saran Ilham.

Saran Ilham kemudian ditanggapi positif oleh Dodi Riyadmadji. Dia juga berharap pada masa mendatang, masukan tersebut dapat diimplementasikan. “Pertama, tolong realisasikan apa yang diucapkan Ilham. Kedua, pada intinya saya menyambut baik, kehadiran Bapak Mustafa dkk. Saya berharap nantinya kerja sama ini dapat ditindaklanjuti untuk program 2017 mendatang,” tutup Dodi. (IFR)



CERITA DI PERAYAAN HARI NUSANTARA

ERAN NASIONAL
SANTARA EXP 2016
DESEMBER 2016
LEWOLEBA - LEMBATA - NUSA TENGGARA TIMUR

Hari Nusantara
13 Desember



Sukses menggelar perhelatan akbar, Hari Nusantara 2016, Kementerian Dalam Negeri terutama Badan Penelitian dan Pengembangan bisa dikatakan juga sukses dalam ikut andil memeriahkan perhelatan akbar tersebut.

Ditunjuk sebagai panitia penyelenggara Expo beragam UMKM dan lintas Kementerian, puluhan *stand* berdiri menyajikan berbagai pameran barang yang disuguhkan. Mulai dari makanan khas suatu daerah, kain tenun khas Lembata, keterampilan seni, aksesoris, dan lain-lain.

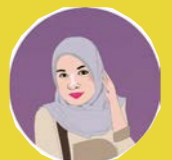
Stand Expo yang bertandang sejak 9 – 13 Desember itu menjadi hiburan tersendiri bagi warga sekitar. Bahkan beberapa warga meminta agar Expo rutin digelar di Lembata. Pengunjung yang datang hampir tiap harinya *membeludak*, sesak, bahkan berulang kali Menteri Dalam Negeri dan Menko Kemaritiman mengitari berbagai *stand* yang ada di sana,

Digawangi oleh Rochayati Basra, Kepala Pusat Inovasi Daerah, sekaligus Ketua Panitia Expo Harnus 2016, expo yang juga banyak bekerja sama dengan berbagai pihak ini juga mengadakan serangkaian acara. Di antaranya adalah Lomba *Stand* Terbaik.

Pada akhir acara, tepatnya setelah Harnus 2016 berakhir (13/12), Rochayati Basra, Jonggi Tambunan dan beberapa tim dari BPP Kemendagri menyerahkan hadiah kepada para pemenang *Stand* Terbaik dalam Expo Harnus 2016. Penilaian berdasarkan dekorasi *stand*, beragam barang yang dipamerkan, serta jumlah pengunjung yang datang.

Adapun yang berhasil meraih juaranya ialah *Stand* milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (Juara I), Kementerian Pertahanan RI (Juara II), Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PU (Juara III), dan TNI AL (Juara Favorit). "Selamat kepada para pemenang, semoga bisa jumpa kembali pada pagelaran Expo Harnus 2017 mendatang," ungkap Rochayati.

Laporan: Indah Fajar R
dari Lembata, NTT



SEMARAK KEMERIAHAN HARI NUSANTARA 2016

Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur pada Rabu, 13 Desember 2016 menjadi sejarah dan catatan penting bagi pulau terpencil di negeri timur Indonesia. Hari itu, gemericik hujan dan selimut awan mendung menutupi matahari Lembata yang biasa menyongsong dengan hebatnya.

Beragam tarian daerah dipentaskan

Sebanyak 140 penari menampilkan tarian beragam khas NTT (Nusa Tenggara Timur) meski dalam kondisi lapangan becek, dan guyuran hujan rintik-rintik menjatuhkan kepala yang ditumbuhi rambut keriting ratusan para penari.

Tapi hal itu tidak membuat mereka menyerah. Semangat menampilkan pertunjukan yang *apik* berhasil mereka sukuhkan dalam atraksi yang dibawakan oleh perpaduan pelajar, karyawan, pegawai negeri, dan anak putus sekolah.

Menggunakan kemben berwarna hitam kecokelatan dengan warna pekat, dipadu aneka warna warni kain khas NTT, dan mahkota yang terbuat dari janur, mereka berhasil mencuri pandangan 3.000 tamu yang hadir. Membuka mata, merobek pandangan akan ketertinggalan Negeri Timur yang selama ini dipikirkan oleh tamu undangan.

Sambil berlempak-lempok, membentuk suatu formasi di hadapan Gunung Aleape, dan ratusan kapal yang bertandang di Pelabuhan Lewoleba, mereka berhasil memukau Tjahjo Kumolo dan Luhut Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri dan Menko Kemaritiman. Bahkan berulang kali orang terpenting di negeri itu tersenyum kagum, bertepuk tangan, dan sesekali manggut-manggut kepala dan badannya mengikuti irama musik yang khas dari NTT.

Bukanlah hal mudah menyuguhkan tarian di hadapan orang penting di Indonesia itu. Setidaknya butuh waktu tiga bulan untuk berlatih, bahkan sampai H-1 siang hari, mereka masih terus berlatih agar tidak salah dalam mengatur gerakan tarian khas pulau yang kurang dijamah oleh pejabat negeri itu.

Jika melihat sekilas, tarian bernama tarian kolosal Kembang Setaman sederhana, tetapi jika dilihat dari dekat, sambil melenggak lenggok gemulai, setiap penari (baik penari perempuan dan laki-lakinya) membawa sebuah pisau yang di ujung gagangnya dihiasi oleh tumbuhan berwarna hijau. Bahkan ada penari pria yang menunjukkan penampilan cukup ekstrim dengan tidur di ujung sebuah batang bambu sambil berputar dan memegang dua buah pisau di tangannya. Menegangkan, namun cukup lihai dan memukau para penonton.

Tarian ini menyimbolkan perdamaian, persatuan dan semarak gotong royong yang kental di daerah Lembata, itulah disebut sebagai Kembang Setaman yang artinya tempat berkumpulnya gotong royong dan berpadu menjadi indah. Itu juga terlihat dari beberapa penari pria yang membawakan sebuah replika ikan paus. Suatu tradisi di NTT, yang menjadi semangat gotong royong mereka.

Mereka biasanya berburu ikan paus pada bulan Juli – Desember yang hasil buruannya selalu dinikmati bersama seluruh penduduk. Cara itu yang juga mereka peragakan dalam tarian di depan Menteri dan beberapa pejabat daerah yang datang.

Penghargaan pada Polisi Laut

Selama hampir satu setengah jam, dengan durasi masing-masing tarian 30 menit pembawa acara menyampaikan ada beberapa atraksi yang akan dipamerkan dalam Hari Nusantara 2016 itu, salah satunya adalah aksi terjun payung, pameran kapal, dan pemberian piagam penghargaan bagi para pahlawan laut yang telah menjaga kelestarian laut Indonesia.

Tiga belas penghargaan diberikan oleh Luhut, di antaranya, Kapal Pengawas Perikanan Berprestasi di Wilayah Barat dan Timur. Lalu ada pemberian Dharma Pertahanan yang diberikan kepada



7 Pemerintahan Daerah, salah satunya Gubernur Nusa Tenggara Timur dan Bupati Lembata.

Selain itu, ada juga pemberian penghargaan Penegakan Hukum di Laut dan Putera-puteri Maritim 2016. "Penghargaan ini pantas diberikan kepada mereka yang senantiasa menjaga kelestarian dan keutuhan bangsa Indonesia di daerah-daerah terpencil, agar tidak mudah dirampas oleh bangsa lain," ungkap Luhut.

Di tengah rintik hujan, empat TNI AL berdiri tegak bersiap menerima lencana yang akan disematkan langsung oleh Luhut. Beberapa penerima penghargaan juga ikut berbaris menyusul 4 TNI AL tersebut. Satu persatu mereka dikalungi piagam penghargaan, kain tenun NTT, sertifikat, dan sejumlah uang tunai.

Atraksi terjun payung dan pameran kapal

Setelah pemberian penghargaan, pembawa acara menyampaikan kembali akan ada atraksi terjun payung dan pameran kapal yang diselenggarakan oleh TNI AL. Ada 4 para penerjun payung yang membawakan beragam bendera. Ada bendera Hari Nusantara, Bendera Merah Putih, Bendera TNI AL, dan Bendera BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Empat penerjun payung itu berhasil mendarat dengan baik, sambil membawa bendera masing-masing. Di hada-

pan pemandangan indah, perpaduan Pantai Lewoleba, Gunung Aleape, dan jejeran kapal layar, penonton yang menyaksikan ikut bertepuk tangan dan berdecak kagum sambil kepala menengadahkan ke atas. "Happy landing," ucap pembawa acara.

Tidak hanya itu, puluhan kapal besar milik TNI AL bertandang di tepi pantai yang memiliki kedalaman tidak terhingga itu. Diikuti oleh berbagai kapal nelayan, ABK (Anak Buah Kapal) milik TNI AL menyapa dari kejauhan sambil melambaikan tangannya. Iring-iringan kapal laut itu yang kemudian dibalas dengan lambaian tangan Menteri Dalam Negeri dan Menko Kemaritiman.

Meski di bawah hujan rintik-rintik, dengan kondisi cuaca yang tidak mendukung, dan landasan terjun payung yang licin serta becek. Tidak membuat atraksi ini gagal dalam menyemarakkan Hari Nusantara 2016 di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Semua penonton bersorak gembira, melihat dua atraksi memukau itu.

Apa kata Menko Kemaritiman?

Setelah berhasil menunjukkan beragam atraksi tersebut, acara terakhir adalah sambutan dari Menko Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan. Dalam sambutannya tersebut, Luhut banyak mengapresiasi puncak kemeriahan Harnus 2016 tersebut. Pasalnya ada lebih dari 17.500 pulau yang tersebar di Indonesia, dengan luas tiga kali lipat dari luas

daratan yang masih belum bisa terjaga dengan baik.

"Tantangan yang lebih besar dari Indonesia adalah kesatuan beragam suku yang coba dipecah belah oleh paham asing. Terutama dalam mengambil kekayaan biota laut Indonesia. Berawal dari tantangan inilah, kita perlu menyanggah apa yang menjadi milik Indonesia, dan Hari Nusantara 2016 ini sudah membuktikan itu semua," terangnya.

Luhut juga menambahkan, selama ini program perbaikan infrastruktur dan menjaga kelestarian laut sudah banyak dilakukan oleh Kementerian yang menaunginya itu.

"Sekarang pembangunan infrastruktur tidak hanya fokus pada Jawa, tapi juga NTT dan Papua. Pembangunan Trans Sumatera dan Jawa itu suatu pembuktian kerja keras pemerintah bagi keadilan Indonesia. Pengembangan tol laut di Pulau Sumbawa, menjadi pusat logistik dalam pembangunan pangan. Pemberantasan *illegal fishing* telah banyak kita lakukan. Selain itu masalah sampah laut terus kami kaji dengan bekerja sama ilmuwan dari luar negeri untuk mengurungnya," paparnya.

Menko juga mengapresiasi langkah NTT yang begitu hebat, dengan kemajuan yang terus meningkat. Ia berencana akan membuat lapangan terbang yang lebih hebat untuk meningkatkan minat pariwisata di NTT. "Tidak bisa saya bayangkan, NTT begitu hebatnya. Saya apresiasi Pemda dan masyarakat sini atas kemajuan ini, sebagai komitmen pemerintah, silakan kirim putera-puteri terbaik untuk mendapatkan beasiswa dari kami ke dalam maupun luar negeri. Kalau kalian merdeka dari kebodohan, kalian akan semakin maju dari ketertinggalan," tutupnya. (IFR)

BERAWAL DARI DEKLARASI DJUANDA

Peringatan Harnus (Hari Nusantara) tidak terlepas dari jasa Ir. H. Djuanda yang mencetuskan konsep *archipelagic states*. Ir. H. Djuanda, yang saat itu selaku Perdana Menteri, dengan berani mengumumkan Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 kepada dunia. Deklarasi ini menegaskan bahwa Republik Indonesia memunyai kedaulatan penuh terhadap perairan antarpulau.

Perjuangan Djuanda tidaklah sia-sia. Konsep dasar dari deklarasi itu akhirnya masuk ke dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang mengakui konsep Negara Kepulauan. Hari Nusantara dikukuhkan setiap 13 Desember melalui Keppres No 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara.

Tahun ini, bertempat di Lembata, Nusa Tenggara Timur, perayaan Harnus 2016 menjadi semakin meriah dengan beragam kepulauan dan pesona laut timur. Meskipun sudah menjadi agenda tahunan, puncak Hari Nusantara kali ini tetap sangat strategis, karena diharapkan mampu mendorong kesadaran berbangsa dan bernegara yang berbhineka tunggal ika.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) selaku panitia utama tahun ini, menilai momen Hari Nusantara dapat menjadi perekat persatuan rakyat Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

Mendagri menilai, melalui hari bersejarah ini, semangat persatuan Indonesia yang berwawasan Nusantara akan bergelora kembali. "Dengan dilaksanakannya Hari Nusantara di daerah pesisir pantai, maka akan mendorong pembangunan di kawasan laut, baik dari sisi potensi daerahnya, sarana dan prasarannya, serta promosi bagi daerah tersebut sebagai salah satu unggulan destinasi wisata di Indonesia," ujar Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri

Selain itu, Mendagri menambahkan, energi bangsa dapat disalurkan secara positif untuk membangun kawasan pesisir Indonesia yang dimulai dari daerah-daerah tempat penyelenggaraan Harnus. Hal ini merujuk, pada setiap pelaksanaan Hari Nusantara selalu dipilih lokasi di pinggir pantai sebagai bagian wilayah pesisir Indonesia.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan sinergi dari panitia pusat yang merupakan kerja sama antara Kementerian dan Lembaga, lalu panitia Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Lembata.

"Saya mengapresiasi koordinasi antarlembaga pemerintahan dari pusat sampai daerah berjalan dengan baik, sehingga poros pemerintahan yang tegak lurus terbukti efektif sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia," tukas Tjahjo

Hari Nusantara sendiri sebenarnya bertujuan untuk mengubah cara pandang (*mindset*) bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang dari matra darat menjadi matra laut, yang berarti terdapat keseimbangan antara darat dan laut. Di samping itu, menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan nasional dan menghasilkan model pembangunan terintegrasi lintas sektor bagi daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal. "Selain itu, Harnus 2016 ini bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang mampu mensejahterakan rakyatnya," urainya. (IFR)



MEMBANGKITKAN SEMANGAT PERSATUAN BANGSA

Pentingnya menggelorakan kembali semangat persatuan bangsa di tengah situasi politik bangsa saat ini, membawa atmosfer tersendiri dalam perhelatan Nasional Hari Nusantara (Harnus), yang tahun ini dipusatkan di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 13 Desember 2016.

Meskipun sudah menjadi agenda tahunan, puncak Hari Nusantara kali ini tetap sangat strategis, karena diharapkan mampu mendorong kesadaran berbangsa dan bernegara yang berbhineka tunggal ika.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sendiri optimis momen Hari Nusantara dapat menjadi perekat persatuan rakyat Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Tjahjo juga menilai, melalui hari bersejarah ini, semangat persatuan Indonesia yang berwawasan Nusantara akan bergelora kembali, terutama dengan dipilihnya Lembata sebagai tuan rumah perhelatan maritim terbesar di Indonesia itu. "Berawal dari kecintaan Presiden Joko Widodo terhadap keindahan pulau Lembata, akhirnya semua orang jadi mengenal Lembata yang merupakan bagian terkecil dari Indonesia," tambahnya.

Pesona Lembata yang indah, menjadi kebanggaan tersendiri bagi Frans Lebu Raya, Gubernur NTT. Pasalnya, dalam puncak perayaan Harnus 2016 itu, Lembata mendadak menjadi terkenal dan kedatangan berbagai macam pendatang yang ingin mengenal lebih jauh kekayaan alam yang masih 'perawan' itu.

"Komitmen ini mengajak seluruh tanah air untuk datang ke Lembata. Ini juga yang menegaskan kami, bahwa sekalipun terpencil kami tidak merasa sendirian. Meski hanya ada 6 hotel kecil-kecil, tapi kami siap menerima lebih dari 5 ribu tamu. Kami berusaha menunjukkan apa yang kami miliki. Masyarakat kami siap menerima tamu dari berbagai daerah di rumahnya," tutur Frans saat pembukaan acara Gala Dinner, Senin (12/12) di Hotel Palm, Lembata.

Beragam pesona Lembata menurut Frans dapat didatangi oleh seluruh penjuru tanah air dan juga keunikan makanan yang dapat dirasakan hanya di Lembata. Seperti jagung titi, atau dendeng ikan paus dari tradisi berburu ikan paus yang selama ini menjadi budaya masyarakat sini.

Percepatan pembangunan Lembata

Sejak ditetapkannya Lembata menjadi lokasi penyelenggaraan Hari Nusantara 2016, segenap aparat pemerintah dan masyarakat Provinsi NTT, terutama Kabupaten Lembata, bahu membahu membangun dan mempercantik kawasan pantai Lewoleba.

Melalui tema "*Tata Kelola Potensi Maritim Nusantara yang Baik Menuju Poros Maritim Dunia*" diharapkan mampu mengubah stigma Bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dari darat menjadi laut, menjadikan bidang kelautan dan pariwisata sebagai arus utama pembangunan nasional. "Kegiatan ini juga akan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur daerah NTT," ungkap Gubernur NTT, Frans Lebu Raya.

Dari Lembata sendiri, Frans mengambil tema "*Dari Lembata Nusa Tenggara Timur*

Membangun Potensi Maritim Nusantara" yang menekankan pertimbangan pemilihan Lembata sebagai tuan rumah Hari Nusantara Tahun 2016, yakni merupakan daerah yang terpencil, dekat dengan perbatasan dan memunyai potensi kelautan yang besar.

"Untuk itu, kami berharap, Bapak Menko Maritim dapat membuka isolasi transportasi yang selama ini masih menjadi kendala percepatan pembangunan dan denyut ekonomi warga di sini," terangnya.

Hal itu diamini oleh Plt. Bupati Lembata, Sinun Petrus Manuk, Lembata merupakan salah satu daerah pemekaran baru yang membutuhkan intervensi pembangunan pada semua sektor. "Kegiatan Harnus ini sungguh berdampak positif secara nyata kepada masyarakat Lembata, baik terhadap intervensi pembangunan pada semua bidang maupun pendapatan ekonomi masyarakat," kata Manuk.

Diselenggarakannya Harnus 2016, menjadi bukti sukses penyemarakkan Lembata sebagai salah satu destinasi favorit warga Indonesia. Dengan menyajikan parade kapal, olahraga bahari, perburuan paus, serta berbagai festival bahari termasuk *Wonderful Sail 2* Indonesia. Para wisatawan yang hadir dalam acara Hari Nusantara 2016 menikmati obyek wisata NTT di antaranya yang sudah dikenal oleh wisatawan. Seperti Bukit Doa Watomiten, Bukit Cinta, Kuma Resort Waijarang, Pantai Jontona, Fosil Paus Biru di Desa Watodiri Jontona yang terdampar pada 2008 yang lalu, serta lokasi budidaya kerang mutiara Indopearls di Waienga, Lebatukan. (IFR)



LAPORAN UTAMA

PENANTIAN PANJANG REGULASI INOVASI





Pemunculan ide dan daya saing akan inovasi untuk memajukan suatu daerah masing-masing sejatinya sudah banyak terlihat sejak era reformasi sejalan dengan ditetapkannya otonomi daerah. Namun, sayangnya, pemerintah Indonesia belum konsen dengan legitimasi yang kuat dalam mendorong semangat para inovator di beberapa daerah. Akibatnya, banyak inovator yang terjatir dalam ranah hukum karena dianggap melenceng dari aturan.

Kini, pada 2016 Pemerintah Dalam Negeri tengah menggodok sebuah payung hukum bagi para pelaku inovasi agar dapat meningkatkan daya saing, serta memajukan perekonomian bangsa melalui RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) tentang Inovasi Daerah.

Beberapa kali, para peneliti dan beberapa pejabat Pusat Inovasi Daerah BPP Kemendagri membuat sebuah pertemuan Forum Diskusi Aktual mengenai penilaian Inovasi Daerah. Acara yang bertempat di Aula BPP Kemendagri itu, dihadiri serius oleh para peserta. Mereka yang hadir tampak menyimak betul-betul bagaimana angin segar inovasi di daerah itu akan berhembus. RPP tersebut membahas beberapa pokok penting yang mengatur kemajuan inovasi di daerah, seperti SIDA (Sistem Inovasi Daerah), Perlindungan Hukum, Konsorsium, dan Peran Pemerintah.

Untuk mengatur hal tersebut tidaklah mudah, BPP Kemendagri sendiri men-

alami berkali-kali rapat yang jumlahnya tidak terhitung. Puluhan narasumber dihadirkan untuk menggodok RPP yang selama ini banyak dinanti-nanti itu. Perang argumen, segunung masukan dan pendapat membuktikan, untuk menyusun RPP Inovasi Daerah bukanlah perkara yang mudah. Meski begitu, BPP Kemendagri yakin PP ini nantinya dapat bersinergi dan menuju Indonesia yang lebih baik melalui daerah.

Cikal bakal inovasi

Menurut Teguh Narutomo, Kepala Bidang Sumber Daya Manusia Pusat Inovasi Daerah, sebenarnya substansi mengenai Inovasi Daerah sudah lama digencarkan. Banyak masyarakat daerah yang telah melakukan inovasi bahkan sebelum payung hukum inovasi itu digodok. "Di dunia inovasi memang kesannya baru, ada tuntutan ketika inovasi berubah lebih melayani, dan maju. Padahal sebenarnya hal itu dimulai pada era 1990. Ada perubahan pemerintahan yang awalnya dikawal oleh dua pakar di Amerika. Nampaknya itu menjadi virus di dunia, termasuk Indonesia untuk menata ulang negara kita di zaman Orde

Baru. Namun perubahan itu terjadi *chaos*, lalu disepakati terjadi reformasi. Ini sebenarnya cikal bakalnya inovasi, yakni dengan melakukan sistem reformasi besar-besaran," papar Teguh.

Mantan Kepala Bagian PJKSE (Pembinaan Jabatan Fungsional, Kepegawaian dan Sisdir Evaluasi Kinerja ASN) itu menambahkan, setelah keberhasilan reformasi dan tumbang rezim Orde Baru lahir tokoh-tokoh beserta daerah baru akibat pemekaran. Namun ada juga daerah yang menghilang seperti Timor Leste. Dari situlah keluar UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebagai cikal bakal mengatur daerah seluas-luasnya atau yang biasa dikenal dengan otonomi daerah.

"Timbulnya UU tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Beberapa yang baik, seperti Kabupaten Jembrana menjadi daerah percontohan inovasi di beberapa daerah. Lalu ada juga Kabupaten Sragen dengan pelayanan satu atapnya. Ini adalah inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Namun hal buruknya, belum ada payung hukum yang melindunginya," paparnya

Akibatnya, kekuatan inovasi yang selama ini telah diterobos oleh Kepala Daerah pada masa itu berakhir di ranah hukum karena dianggap menyalahi aturan. Mereka yang dipermasalahkan biasanya terkait soal penggunaan anggaran yang tidak sesuai prosedur karena menciptakan inefisiensi dsb. "Ketika mereka melakukan terobosan, mereka melanggar aturan yang berlaku. Misal aturannya A tapi Kepala Daerah itu melakukan B. Inilah yang mendasari

kita memberikan aturan payung hukum bagi pelaku inovasi daerah. Meskipun ini baru bisa ditetapkan dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada UU tersebut pasal per pasal masih belum membahas lebih detail mengenai Inovasi Daerah, maka lahirlah turunan dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah itu yang saat ini kita rancang dalam RPP Inovasi Daerah," jelas Teguh.

Hal itu dibenarkan oleh Tri Widodo, Direktur LAN (Lembaga Administrasi Negara) setelah lahirnya UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebelum direvisi menjadi UU No 23 Tahun 2014), ada tuntutan yang sengit, terutama masalah revisi mengenai organisasi daerah dan kelembagaan, setelah ada rancangan revisi UU tersebut, ada semangat untuk menyuntikkan inovasi. Semua itu berangkat dari kegelisahan pemerintah terhadap kegiatan inovasi yang mandul. Banyak program pemerintah daerah yang hanya turun temurun dan tidak ada perubahan.

Selain itu, era tersebut cenderung mengatur sentralisasi, semua terpacu pada pusat dengan pola keseragaman. "Nomenklatur harus sama, sampai kop surat harus sama. Padahal kemampuan setiap

sana juga hilang. Jembrana 2001-2010 selalu jadi kiblat. Orang kalau bicarakan fasilitas kesehatan, pendidikan orang selalu berkilat di Jembrana. Nah, ini yang seharusnya perlu diatur agar inovasi daerah tidak lepas begitu saja," cerita Endi.

Perlu diatur dalam SIDA

Peraturan mengenai Inovasi Daerah ini sejatinya perlu diatur dalam sebuah aturan yang mengikat dan jelas melalui SIDA (Sistem Inovasi Daerah). Seluruh narasumber yang berhasil dihimpun oleh Tim *Media BPP* semuanya sepakat, SIDA sangat penting diatur secara jelas dalam RPP tersebut.

Imam Radianto, Kepala Sub Bagian Perundang-undangan Bagian Perencanaan mengatakan, sebenarnya SIDA itu merupakan bagian yang besar dari inovasi daerah yang harus diatur dalam bagian pemerintahan. Mengapa? Karena SIDA berperan dalam menumbuhkembangkan dan memberdayakan daerah.

"Sistem inovasi daerah itu nanti akan membangun interaksi dan komunikasi antaraktor daerah. Siapa aktornya? ABCG (Akademisi, Bisnis, Civil, dan Government). Apa yang mereka laku-

ah yang dibumbui oleh difusi (penyebaran unsur inovasi ke kelompok lain). "Bagaimana itu difusi? Difusi itu bisa replikasi, diadaptasi, dan adopsi," paparnya.

Difusi menurutnya haruslah berintegrasi dengan inovasi. Seperti yang ada di Banyuwangi dikenal dengan "Akta Procot" atau akta baru lahir langsung jadi. Itu menandakan adanya SIDA yang berjalan dengan baik antara pemerintah daerah setempat dengan rumah sakit. "Ketika pemerintah tidak membuka *link*-nya, tidak ada pencatat kelahiran, ya tidak bisa. Nah, dengan masyarakat bagaimana interaksinya? Si pelaku misalnya ibu atau orangtua calon anak memberitahu kepada pihak RS," jelasnya.

Contoh lain, misalnya, saat masyarakat membuat biogas yang terbuat kotoran sapi, pemerintah setempat harus bisa memfasilitasi dan memberi dukungan seperti memberi produk insiminator yang dapat dimanfaatkan ke masyarakat. Kalau hanya disimpan dalam tabung tidak ada manfaatnya, di situlah peran Sistem Inovasi Daerah.

Sementara itu, sebenarnya SIDA telah diatur lebih dahulu dalam pera-



daerah berbeda-beda. Lalu muncul UU No 23 Tahun 2014 yang disuntikan oleh Agus Dwijanto (Mantan Kepala LAN) untuk menyelipkan pasal inovasi, namun ternyata tidak hanya pasal, tapi sukses menjadi bab tersendiri dalam UU tersebut," terang Tri.

Sebelum lahirnya UU No 23 Tahun 2014 yang mengatur mengenai inovasi daerah, sebenarnya pada 2011, Kementerian Riset dan Teknologi sudah menginisiasi gerakan inovasi ini, namun belum mampu melindungi Kepala Daerah masing-masing. Berangkat dari ketertinggalan daya saing dan ekonomi, BPP Kemendagri menginisiasi RPP Inovasi Daerah tersebut.

Robert Na Endi Jaweng, Direktur Eksekutif KPPOD (Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah) juga membenarkan hal tersebut. Pasalnya, pada era reformasi, Kabupaten yang maju seperti Jembrana, Gianyar, Sragen selalu menjadi kiblat dalam rentang waktu 2001-2010. "Keberhasilan inovasi pada era tersebut sangat bergantung pada keberhasilan pemimpin daerah. Begitu Kepala Daerahnya tidak menjabat lagi, pelan-pelan inovasi daerah di

daerah? Mereka mempunyai kemampuan, baik itu sumber daya alam atau lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk menyejahterakan masyarakat. Aktor tersebut akan bekerja sama meningkatkan kemampuan baru, sehingga lebih praktis dan efisien untuk mendorong suatu program," terangnya.

Bagi Imam, inovasi daerah justru merupakan bagian dari SIDA yang diatur dalam langkah-langkah praktis suatu inovasi. Ia juga menambahkan, SIDA merupakan nyawa dari suatu inovasi daerah. Bagaimana inovasi itu dibangun, dimanfaatkan, untuk membangun kontribusi dari daerah, entah itu pelayanan, kemampuan masyarakat, atau model prototipe suatu produk yang dapat dimanfaatkan.

"Produk pembaruan yang keluar dari kinerja pemerintah itu baru dinamakan inovasi. Sementara kalau sistem inovasi, pemerintah daerah tidak hanya berperan sebagai aktor, tetapi penggerak masyarakat. Sehingga hasil inovasi itu nantinya dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat, itu namanya baru SIDA," terang Imam.

Imam juga menambahkan lebih detailnya, SIDA merupakan suatu inovasi daer-

turan Kemenristek Dikti. Namun, semenjak adanya RPP ini, Kemenristek akan meninjau kembali peraturannya. Menurut Imam, Kemenristek akan lebih memfokuskan pada SINAS (Sistem Inovasi Nasional). "Kita sudah diskusikan bersama Kemenristek Dikti, jadi ada yang namanya Perber (Peraturan Bersama) Nomor 3 dan 36 Tahun 2013 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Kita punya aturan bersama untuk mendorong inovasi di daerah, meskipun sebelumnya Kementerian Dalam Negeri telah mengatur lebih dahulu melalui UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," papar Imam.

Lantas apa perbedaan SINAS dan SIDA? Imam sendiri menjelaskan, sebenarnya aturan mengenai SINAS sedang dirancang oleh Kemenristek, sedangkan masuknya SIDA dalam PP Inovasi Daerah ini. "SINAS itu belum ada peraturannya, hanya saja teman-teman mengambil terminologi baru yang akan diambil Kemenristek untuk membuat SINAS," tandasnya.

Ia menambahkan, perbedaan yang paling terlihat antara SIDA dan SINAS adalah konsepnya. SINAS cenderung dengan model *triple helix*, yakni model

yang mengandalkan tiga aktor inovasi yaitu Akademisi (Badan Penelitian), Pemerintah, dan Dunia Usaha. Jadi cangkupannya lebih luas. Lalu, biasanya dalam SINAS, inovasi yang dikembangkan adalah lebih kepada sektor-sektor nyata. Seperti sektor manufaktur, sumber daya mineral, dan lain-lain.

“Rata-rata SINAS itu memunyai aktor yang besar. SINAS lingkungannya nasional dan bergerak pada bidang industri dan bisnis-bisnis berkala. Kalau SIDA ada faktor masyarakat atau komunitas. Di sini didorong keterlibatan masyarakat, mendorong pemerintahan dan masyarakat, di seluruh urusan. SIDA dapat disampaikan pada pemerintah untuk dicari bentuk invensi lalu didifusikan (disebarluaskan). Lingkungannya hanya ke pengalaman praktis dan mudah dirasakan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, pendapat yang berbeda dilontarkan oleh Elisabeth Eni PL Kepala Sub Bidang Potensi Inovasi Daerah BPP Kemendagri mengatakan,

sebenarnya SIDA yang diatur dalam RPP tersebut mengatur dengan jelas apa yang telah diamanatkan dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Mengacu pada UU tersebut khususnya pada Pasal 38 di situ dijelaskan, inovasi mengatur beberapa hal yang erat dalam hal peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

“Inilah ruang lingkup yang perlu kita pahami bersama. Ada 32 pelayanan wajib, 18 pelayanan dasar, dan 8 pelayanan pilihan. Ruang lingkupnya di situ, karena seringkali ada pemahaman yang berbeda, kita harus atur semua bidang inovasi. Padahal amanat dalam UU 23 Tahun 2014 hanya inovasi dalam peningkatan pelayanan kinerja pemerintah saja. Dan inovasi dalam Pasal 386 itu jelas, semua pembaruan hasil Iptek atau temuan baru, juga diakomodasi,” paparnya.

Bahwa sebenarnya RPP Inovasi Daerah, lebih lanjut Elis mengatakan hal itu



mengatur semua, baik produknya maupun bidangnya. Namun ruang lingkungannya harus dipahami kembali, yakni dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah. Yang pada akhirnya kembali pada kepentingan masyarakat.

Hal itu memang dibenarkan oleh Teguh, saat lahirnya UU No 23 Tahun 2014, memang banyak sekali penafsiran mengenai kalimat “sebagai penunjang peran pemerintah” yang tertulis dalam UU tersebut, namun Teguh menerangkan, sayang sekali jika saat penyusunan RPP yang tertulis hanyalah masalah penunjang pemerintahan daerah.

“Kita coba sepakati mengisi sisi lowong yang perlu kita atur. Inovasi yang dilahirkan di masyarakat selama ini tidak bersinergi karena terpisah oleh beragam kegiatan antar K/L. Jangan sampai mengulang sejarah inovasi yang berhenti. Seperti di Jembrana, dan Sragen. Dari SIDA ini, kita ingin ada inovasi yang berkelanjutan dari segala bidang,” terang Teguh. (IFR)

terancang sempurna, karena berangkat dari para peneliti yang tentunya paham betul bagaimana kondisi daerah. Kedua, di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri yang memang adalah induknya daerah. Tapi harus dipahami, di Indonesia ini agak sulit sekali melakukan inovasi, karena mayoritas aturan itu menjebak aparat sipil di daerah. Misal penggunaan nomenklatur yang berbeda, seperti di Kemenkeu menggunakan belanja langsung dan tak langsung, Kemendagri menggunakan belanja operasional dan non operasional. Nah, sebaiknya, adanya aturan RPP ini, inovasi ini bisa satu pintu. Kemendagri sebaiknya harus bisa membuka diri, ke lintas Kementerian dan Lembaga lainnya yang selama ini sudah lebih dulu memfasilitasi daerah berinovasi. Jangan menutup diri, karena semuanya harus bersinergi,” saran Endi.

Dengan begitu konsorsium dapat bersinergi antar K/L di bidang koordinasi. Sehingga, inovasi daerah dikoordinasikan dalam cangkupan konsorsium nasional. “Pak menteri dapat membuat agenda menyelaraskan program K/L,” ujar Endi.

Perlindungan hukum

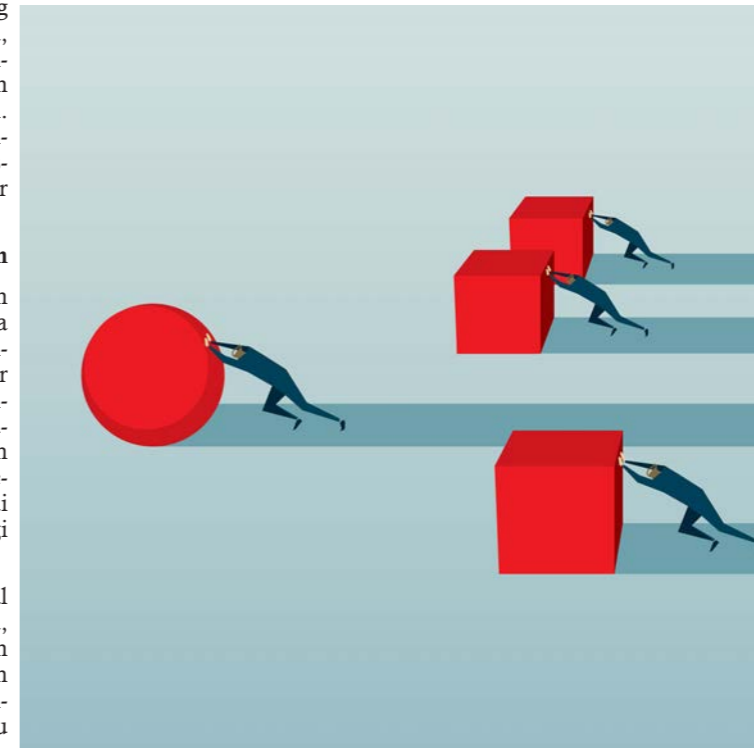
Yang menggembarakan dari RPP ini, salah satunya adalah perihal perlindungan hukum bagi inovator di daerah. Namun sayangnya, draft yang konon sudah sampai di Kemenkum HAM itu, tidak terlalu detail membahas mengenai perlindungan hukum bagi aktor inovasi.

Tri pun mengkritisi hal tersebut. Menurutnya, untuk hal perlindungan hukum, pasal haruslah ditulis secara jelas dan tidak multi tafsir. “Kalau soal pembuatan laporan atau proposal penelitian tidak perlu diatur secara detail dalam RPP ini. Sebaiknya RPP ini lebih memberikan perlindungan, meningkatkan pelayanan organisasi, pelayanan publik, dan efektivitas pemerintah daerah. Dengan begitu, Pemda lebih tenang. Mindset Pemda selama ini tidak boleh melakukan sesuatu tanpa adanya mandat. Nah, mestinya PP ini memberi dan memotivasi daerah untuk berinovasi,” tandasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, terkait batasan hukum sebenarnya sudah teruang jelas dalam UU Tipikor yang mengategorikan bentuk tindak pidana korupsi apabila ada unsur penyalahgunaan wewenang, memperkaya diri sendiri, dan merugikan negara. “Namun sekarang banyak TGR (Tuntutan

Ganti Rugi) karena kekhilafan seorang pejabat. Apakah itu otomatis dipidana? Tentu tidak. Misal bawa mobil dinas tiba-tiba hilang, padahal ada kerugian negara, namun dianggap TGR. Jadi ada TGR yang dianggap kekhilafan. Kalau ada kesalahan prosedural administratif, ya semestinya tindakan administratif yang pertama dilakukan,” sarannya.

Ia juga menyarankan, sebaiknya BPP Kemendagri bisa memastikan terlebih dahulu tindakan ini merupakan kesalahan administratif atau bukan. Bila memang tindakan administratif, bisa diberikan sanksi atau teguran. “Karena selama ini, aturan yang tertuang dalam RPP tersebut, hanya berbunyi ‘Apabila ada inovasi yang belum tercapai, maka tidak dapat dipidana’. Untuk itu ini kesempatan kita, berani atau tidak membuat aturan demikian. Karena ini juga kan sebenarnya amanat dari Presiden. Tapi beliau sedikit kecewa karena be-



lum ada tindakan dari kita. Pertanyaan terbesarnya adalah berani tidak para aparat penegak hukum masuk sejak di hulu. Jadi langsung ditindak administratif apabila ada indikasi di awal,” sarannya.

Yang penting diingat kembali, jangan sampai kesempatan ini dijadikan momentum para ‘pejabat nakal’ yang berlindung dalam tameng inovasi. “RPP ini harus mendorong inovasi menjadi sebuah budaya, tanpa menunggu perintah. Kalau sudah menjadi budaya, tidak ada yang disebut melanggar aturan, jadi sudah dilakukan berkali-kali karena budaya inovasi. Selama ini tidak banyak inovasi yang bermasalah, yang ada hanya orang yang mencampur-adukkan antara pelanggaran dan inovasi. Ada orang yang benar melakukan pelanggaran,

tapi mengaku hal tersebut adalah inovasi. Misal memasukan keuntungan daerah ke rekening pribadi. Itu jelas tindak pidana,” tandasnya.

Simplifikasi dengan RPP kerja sama

Menghadapi batu terjal, selama 2 tahun sejak UU No 23 Tahun 2014 diterbitkan, semestinya RPP ini sudah selesai sejak Oktober 2016. Namun rupanya, jalan terjal harus dihadapi oleh BPP Kemendagri sendiri akibat tidak memperhatikan langkah sedari awal.

Menurut Elis, sebenarnya berangkat dari Kepres No 10 Tahun 2016 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah 2016, PP ini harus disimplifikasikan dengan PP Kerja sama yang saat ini juga tengah digodok oleh Ditjen BAK (Bina Administrasi Kewilayahan).

“Sebenarnya dari awal saya sudah mengingatkan, PP ini nantinya bukan PP Inovasi Daerah yang berdiri sendiri, tapi ada hal kerja sama yang mengatur di dalamnya. Jadi ada Bab Kerja sama dan Bab Inovasi Daerah. Hanya saja, semangat kawan-kawan dalam merancang RPP ini semangat berdiri sendiri,” terangnya.

Elis sendiri sebenarnya juga mengakui, bahwa dua hal tersebut sangatlah bertolak belakang dalam mengatur sebuah sistem. Tidak bisa disimplifikasikan, kecuali kerja samanya mengatur dari apa yang telah dihasilkan oleh inovasi. “Itu dia, Pak Menteri inginnya ini diharmonisasikan dengan Dirjen BAK. Tapi menurut saya ini adalah dua hal yang berbeda,” ungkapnya.

Dalam hal ini, baik Imam, Teguh, Tri, dan Jaweng juga sepakat akan berdirinya sendiri PP Inovasi Daerah tersebut. Karena aturan dalam Inovasi Daerah banyak sekali yang mengatur di dalamnya, termasuk dalam inovasi berkelanjutan yang memuat kerja sama.

“Tidak bisa hanya dengan 2 Bab besar. Bab pertama mengenai Kerja sama, lalu Bab Kedua tentang Inovasi. Inovasi sendiri banyak sekali aturan yang menggawangi dalam RPP tersebut. Saran saya, mungkin nanti aturan inovasi daerah akan disederhanakan menjadi empat bagian penting, yakni Ketentuan Umum, SIDA, Perlindungan Hukum, atau Konsorsium. Hanya saja, keputusan finalnya kami menunggu dari Menteri Dalam Negeri, dan juga Kemenkum HAM yang paham soal ini. Apakah relevan disimplifikasikan atau tidak,” tutup Imam. (IFR)

Konsorsium Nasional SIDA

Bicara soal SIDA, pasti tidak jauh dari persoalan Konsorsium sebagai teknis pelaksana sistem di daerah. Tri Widodo yang juga sebagai salah satu perancang dari RPP Inovasi Daerah ini, sebenarnya banyak memberi kritik dan masukan terkait SIDA dan runutan RPP ini terbentuk. “Sayangnya dalam UU No 23 Tahun 2014 itu sudah diatur dalam inovasi terlalu detail, padahal semestinya tidak perlu. Seharusnya UU itu cukup memberikan mandat ke daerah untuk melakukan inovasi, yang secara teknis dan detail bisa diatur dalam RPP atau Perkada masing-masing daerah, karena kemampuan setiap daerah berbeda-beda,” paparnya.

Seperti persoalan masalah kata penunjang pemerintahan, sebaiknya tidak per-

lu. Akibatnya terjadi rancu penafsiran. “Padahal ini sebenarnya momentum bagi BPP Kemendagri untuk mengatur SIDA tersebut secara nasional dengan konsorsium,” saran Tri.

Tri menjelaskan, selama ini daerah terpenjara dengan aturan yang rumit lintas K/L (Kementerian/Lembaga). Dalam pertemuan itu, ada banyak laporan yang tidak satu pintu sehingga malah menjadi beban di daerah. “Yang menjadi pertanyaan Kemenristek juga sebelumnya sudah punya SIDA. SIDA mereka bukan diatur dalam PP, mereka membangun peraturan sendiri. Kita punya kekuatan PP yang mengamankan tentang sistem inovasi. Akhirnya mereka yang menyesuaikan dengan PP Kemendagri. Semestinya semua ini nanti menyesuaikan SIDA. Jadi tidak ada lagi inovasi yang diadakan oleh Kemenristek, Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanian, atau Kementerian Dalam Negeri. Semua harus masuk dalam payung SIDA-nya Kemendagri. Untuk itu perlu mengintegrasikan SIDA dengan

konsorsium secara nasional. Tanpa itu, K/L akan terus berjalan masing-masing dengan ego sektoral-nya. Khusus inovasi daerah, seharusnya Kemendagri bisa mengambil kesempatan ini agar dapat memegang peranan yang lebih sentral. Saran saya bukan hanya lingkup daerah. Biarkan Gubernur atas nama pemerintah sebagai inovator,” saran Tri

Lebih detail, ia memberikan pada pasal konsorsium harus berbunyi “Dalam rangka mengembangkan SIDA, Menteri Dalam Negeri dapat membentuk konsorsium secara nasional”. Yang artinya PP tetap mengatur SIDA (Sistem Inovasi Daerah), tapi konsorsiumnya harus nasional. “BPP Kemendagri harus benar-benar memanfaatkan momentum ini,” tandasnya.

Hal itulah yang diaminakan oleh Endi Jaweng, baginya semangat pembentukan PP ini sudah benar dan sejalan dengan prinsip berinovasi. “Ketika saya tahu yang merancang RPP ini adalah orang BPP, saya optimis PP ini bisa

MENUNTUT INOVASI, APRESIASI SETENGAH HATI

Besarnya tuntutan inovasi di daerah tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Perintah berinovasi saat ini hanya sebatas imbauan belaka. Akibatnya, pelaksanaan inovasi di daerah masih sangat minim. Sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan muncul agar inovasi tidak hanya sebatas diapresiasi tetapi juga ditindaklanjuti sehingga bisa memberi manfaat besar bagi pembangunan bangsa saat ini maupun di masa yang akan datang.

Inovasi pelayanan publik di daerah hanya tinggal cerita, ketika perintah berinovasi hanya imbauan belaka. Banyak inovasi tidak berjalan lama dan hanya sebatas pemenuhan kewajiban yang diamanatkan pemerintah pusat. Ketika himbauan tersebut terjadi berulang-ulang, inovasi di daerah seketika tercipta secara instan. Adagium “asal babeh senang” menjadi konsep yang dipertahankan oleh daerah, setelahnya produk inovasi hanya tinggal cerita yang menghabiskan dana besar dan terkesan sia-sia.

Pelaksanaan inovasi di daerah menjadi harapan besar pemerintah pusat, sebagai implementasi Nawacita Presiden Joko Widodo di bidang reformasi birokrasi. Sebagai efektivitas fungsi pemerintahan, inovasi juga berpengaruh pada penguatan demokrasi dan hak asasi manusia, promosi kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, berkurangnya angka kemiskinan, peningkatan perlindungan sosial, peningkatan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam, serta kepercayaan pada pemerintah dan administrasi publik. Namun, ketika anjuran inovasi pelayanan publik tanpa tindak lanjut, maka yang didapat hanyalah harapan semu.

Bentuk perintah melaksanakan inovasi di daerah misalnya dengan terbitnya surat edaran terkait pelaksanaan *e-planning*. Dalam Surat Edaran No 640/3761/SJ tersebut pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri meminta setiap daerah melaksanakan *e-planning* dalam perencanaan pembangunan daerah provinsi

dan kabupaten/kota, yang berpedoman pada pelaksanaan *e-planning* yang sudah dilaksanakan di Surabaya.

Surat edaran tersebut mendapat reaksi beragam dari beberapa pelaksana inovasi di daerah. Salah satunya dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang menggagas *e-planning* dalam bentuk Jogja Plan. Ditemui Tim *Media BPP* di Kompleks Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta, Kurniawan Kepala Seksi Layanan Informasi Balai Statistik Daerah Bappeda DIY mengatakan banyak daerah merasa kesulitan dengan perintah tersebut. Palsunya pemerintah hanya sebatas mengimbau tanpa melaksanakan tindak lanjut terhadap terbitnya surat tersebut.

Selain itu, imbauan juga menganjurkan kepada setiap daerah untuk mencontoh *e-planning* yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya, padahal menurut Kurniawan, karakteristik dan kebutuhan setiap daerah sangatlah berbeda.

“Seharusnya ada standar *e-planning* yang ditetapkan oleh pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Pemerintah juga sebaiknya tidak hanya menuntut daerah untuk melaksanakan *e-planning* apalagi hanya sekadar merekomendasikan Surabaya, padahal setiap daerah memiliki karakteristik berbeda,” ucap Kurniawan.

Lebih lanjut Kurniawan menambahkan, pembuatan *e-planning* juga tidak serta-merta bisa dilakukan dan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pembuatan *e-planning* yang



menggunakan sistem aplikasi daring (dalam jaringan) harus didasarkan pada kebutuhan suatu daerah. Tanpa perencanaan yang matang dan hanya memenuhi kewajiban, tidak sedikit *e-planning* yang dikelola daerah, bahkan lebih bagus dari Surabaya sekalipun bisa *mangkrak* tidak terpakai. “Banyak daerah membuat *e-planning* ala kadarnya. Mereka hanya menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga, tanpa mengetahui bisnis proses yang ada di dalamnya,” tegas Kurniawan.

Apresiasi tanpa bentuk

Selain kurang melaksanakan tindak lanjut terhadap surat edaran, pemerintah pusat juga dirasa kurang memberikan apresiasi terhadap beberapa karya inovasi di daerah. Apresiasi seringkali diberikan hanya ucapan terima kasih dalam bentuk *ceremony*. Selanjutnya, pemerintah terkesan membiarkan inovasi berjalan sendiri tanpa ada dukungan lebih lanjut seperti mengembangkannya ke arah yang lebih baik, bahkan tidak ada alokasi dana untuk mengembangkannya.

Beberapa daerah pelaku inovasi lebih suka melakukan kerja sama dengan lembaga donor yang menurut mereka lebih memberikan keuntungan. Jawa Timur, daerah yang mendominasi top 35 Sinovik (Sistem Inovasi Pelayanan Publik) 2016, misalnya, sebagian inovasi dari mereka lebih memilih

kerja sama dengan Jerman untuk mengembangkan inovasinya. Beberapa bentuk inovasi seperti KAKKEKU DATANG (Kartu Keluarga Kudata Ulang) yang merupakan inisiatif pemerintah Kabupaten Gresik sebagai upaya pemutakhiran Kartu Keluarga, BUMIL RISTI (Pemburu Ibu Hamil Beresiko Tinggi) yang digagas pemerintah Banyuwangi, dan banyak bentuk inovasi lain yang memilih mandiri tanpa campur tangan pemerintah.

Hermanto Sianturi, Kepala Dukcapil Kabupaten Gresik menyatakan ketidakpuasannya atas apresiasi bentuk inovasi yang diberikan pemerintah selama ini. Penghargaan hanya sekadar ucapan, serta tanpa bimbingan pengembangan inovasi lebih lanjut. Padahal inovasi yang dilakukan dapat membantu pemerintah dalam pembangunan bangsa sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat dan dekat.

“Saya dari pemerintah hanya mendapatkan plakat dan ucapan selamat, ketika ada tawaran pengembangan inovasi dari lembaga Jerman, tanpa berpikir panjang saya langsung terima. Karena mereka lebih menjanjikan, mereka juga memberikan bantuan dana cukup besar, serta tanpa laporan pertanggungjawaban,” terang Hermanto ketika ditemui di Gedung Pulse Lab Jakarta beberapa waktu

lalu.

Hal yang sama diucapkan oleh Kasubbid Perencanaan Sektor, BAPPEDA DIY Danang Setiadi, menurut Danang, apresiasi pemerintah pusat terhadap inovasi di daerah masih setengah hati. Beberapa penghargaan tidak cukup memotivasi daerah untuk berinovasi lebih banyak. Akhirnya inovasi yang sudah ada kembali hilang bak ditelan bumi.

Sebagai pembanding, bentuk penghargaan yang diberikan Pemerintah daerah jauh lebih baik jika dibanding pemerintah pusat. Setiap tahun DIY selalu aktif memberikan penghargaan tidak hanya dalam bentuk apresiasi kepada daerah yang sukses berinovasi. Sebagai contoh penghargaan Reka Cipta Bhakti Nugraha yang diberikan kepada setiap kabupaten/kota dengan perencanaan terbaik. Selain apresiasi, Pemprov DIY juga memberikan insentif yang tidak sedikit.

“Beberapa contoh, insentif digunakan untuk pembangunan embung di Nglanggeran, Gunung Kidul. Selain itu pembangunan pasar di Prambanan, dan pembuatan kawasan kebun buah di Bukit Menoreh, Kulon Progo. Tidak sekadar kalau kita menang dapat piala dan piagam, tentu ada insentif,” terangnya.

Danang berharap, pada masa mendatang pemerintah pusat bisa mem-

berikan *reward* yang lebih baik bagi daerah dengan inovasi terbaik. Lebih elok ketika pemerintah pusat bisa menambah Dana Alokasi Khusus (DAK) bagi program kegiatan daerah yang memiliki kinerja bagus, atau pengembangan sumber daya manusia. “Seperti memberikan beasiswa kepada Aparatur Sipil Negara, memberikan pengembangan berupa seminar-seminar di daerah, dan lain-lain,” ucap Danang.

Tidak sekadar tuntutan

Selain Danang, harapan juga muncul dari para inovator dan orang-orang yang berkecimpung dalam bidang inovasi daerah. Umumnya mereka menyayangkan sikap pemerintah pusat yang selalu menuntut daerah untuk bekerja secara profesional, tetapi tidak diimbangi dengan pembinaan. Sama halnya ketika tuntutan inovasi dan pelaksanaan *e-planning* digelorakan, justru pembinaan pemerintah pusat tidak kelihatan, lebih lucu lagi, ketika inovasi daerah kemudian membanggakan, pemerintah pusat menjadi garda terdepan memberi pengakuan.

Minimnya peran pemerintah pusat juga terlihat dalam pengurusan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang dirasa lambat dan cukup berbelit. Kassubag Penelitian Biro Administrasi Pembangunan DIY, Eko Susilo mengakui, banyaknya para inovator yang mengeluhkan ketika hendak mengurus hak cipta kepada pemerintah pusat. Banyak aturan yang memberatkan inovator, terlebih ketika pemohon harus dimintai dana yang cukup besar untuk mendapatkan hak paten.

Akibatnya, banyak inovasi di daerah yang merupakan karya anak bangsa diklaim oleh negara lain, dikarenakan lamanya mengurus hak paten. Eko menyarankan agar pemerintah memfasilitasi segala bentuk inovasi yang dilakukan masyarakat.

“Mestinya itu seperti mengurus KTP jangan dibebani biaya-biaya yang tidak perlu, terlalu mahal, serta ada jangka waktu, prosesnya lama. Harusnya pemda perlu memfasilitasi itu, dalam praktiknya banyak inovasi di masyarakat diambil alih oleh negara lain, karena HAKI-nya diambil orang lain,” saran Eko.

Namun, terlepas dari semua itu, upaya yang dilakukan pemerintah dalam membangun inovasi di daerah patut diapresiasi, pada masa mendatang pemerintah pusat diharapkan dapat mengakomodasi segala bentuk keluhan para pelaku inovasi di daerah, sehingga bisa membangun semangat daerah untuk terus berinovasi. (MSR)

Inovasi Pelayanan Publik

Jogjaplan, *e-planning* Tepat Guna

Ketika berbicara pelayanan publik, yang pertama kali terpikir adalah masyarakat pengguna jasa pelayanan. Se jauh mana pelayanan bisa memberi kepuasan bagi masyarakat. Atas hal tersebut, maka pelayanan publik pun harus didesain sederhana dan setransparan mungkin agar hak masyarakat sebagai pengguna pelayanan dapat terpenuhi.

Kemajuan teknologi informasi tidak bisa ditawar lagi, dalam hal pelayanan publik pemerintah dituntut mengikuti kemajuan teknologi yang semakin cepat. Tidak heran, ketika pelayanan publik di berbagai daerah, saat ini terus beradaptasi seiring dengan perkembangan teknologi dengan pemanfaatan sistem *e-government*.

E-government saat ini menjadi tolok ukur kemajuan daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. *E-government* tepat guna bisa memberikan manfaat sekaligus menjadi solusi dalam menjalankan fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien. Beberapa daerah pengguna, *e-government* selain telah berhasil menghemat anggaran, juga dapat memutus mata rantai sistem birokrasi dan pelayanan yang rumit.

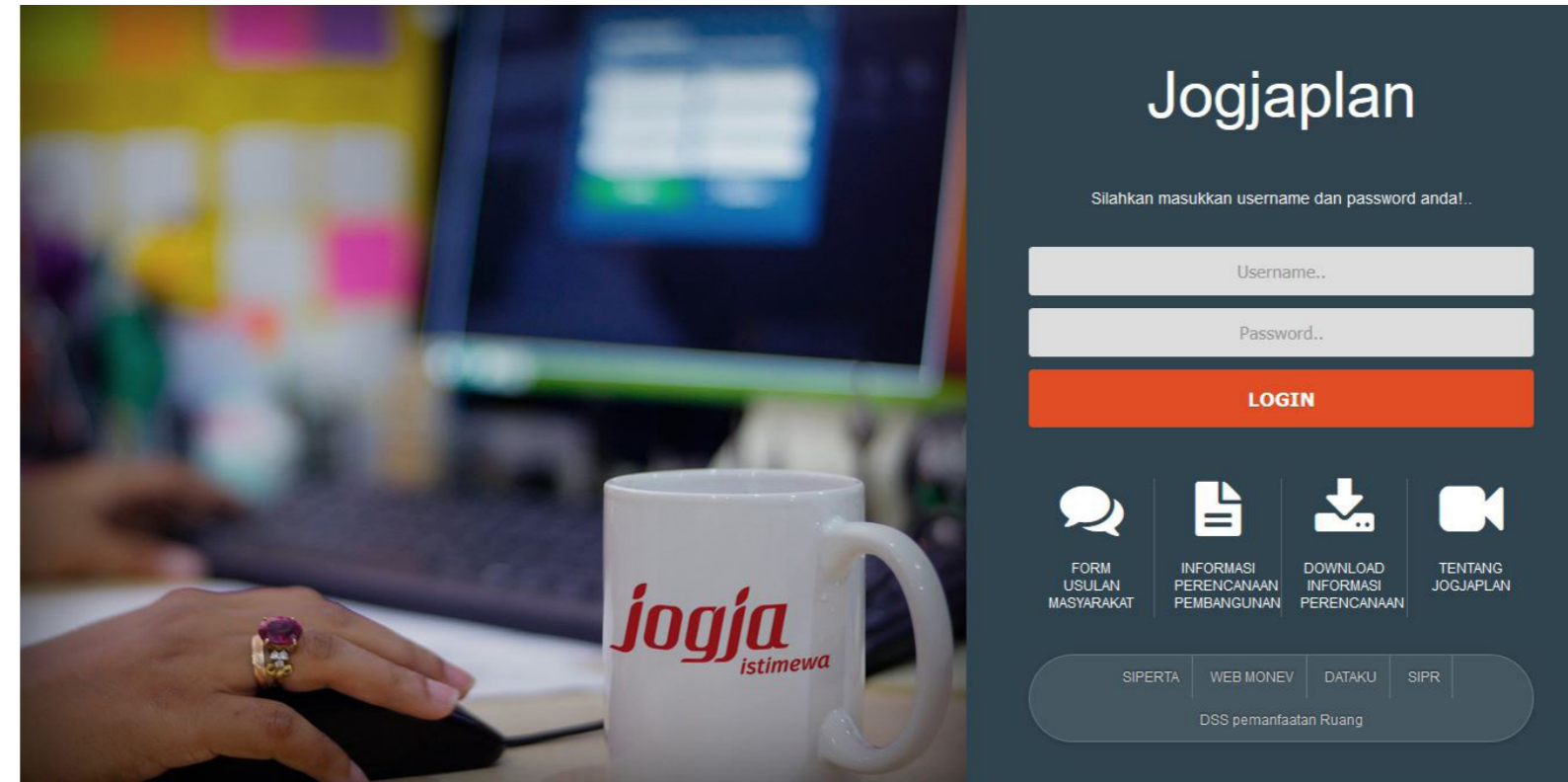
E-planning adalah salah satu bentuk *e-government* yang diwajibkan pemerintah untuk diaplikasikan di daerah. Sistem perencanaan secara elektronik tersebut, umumnya diperuntukkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Bappeda. Beberapa daerah seperti Surabaya, Bandung, dan DKI Jakarta merupakan contoh daerah

dengan penggunaan *e-planning* dan menjadi tolok ukur beberapa daerah lain di Indonesia. Namun, selain ketiga daerah yang sering menjadi contoh tersebut, ada daerah yang tidak kalah bagus dalam penggunaan *e-planning* yaitu Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pada 2011, DIY mengeluarkan sebuah sistem perencanaan *online* Jogjaplan, sebagai alat bantu perencanaan pemerintah DIY. Jogjaplan menampilkan perencanaan secara detail dan interaktif berbasis internet (*web base*), yang dapat dikunjungi setiap saat dalam situs www.jogjaplan.com. Jogjaplan juga menampilkan ringkasan secara makro atas keseluruhan perencanaan yang dilaksanakan oleh DIY secara *real time*, mulai agenda penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan Umum APBD – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Selain itu, dalam *e-planning* tersebut pengunjung dapat menelusuri secara detail perencanaan yang sedang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Dalam aplikasi tersebut, masyarakat bisa melihat kedealaman data, transparansi anggaran, hingga apa saja yang dilakukan dinas di daerahnya, mereka juga bisa mengetahui apa target pembangunannya dan sebagainya,” ucap Kurniawan Kasie Layanan Informasi Statistik Daerah Bappeda DIY saat Tim *Media BPP* menemuinya di Bappeda DIY November lalu.

Kehadiran Jogjaplan sekaligus menjadi kontrol terhadap kebijakan pemerintah. Dengan Jogjaplan, program kegiatan direncanakan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan daerah DIY. Masyarakat dapat berperan



memberikan usulan serta pendapat terhadap program kegiatan yang sedang direncanakan dalam *form* usulan masyarakat tanpa terikat ruang dan waktu.

Kaya manfaat

Awalnya, keberadaan Jogjaplan belum diterima secara penuh oleh beberapa SKPD di DIY. Jogjaplan dianggap terlalu transparan dan akan merugikan SKPD. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa SKPD merasakan manfaat lebih dengan kehadiran Jogjaplan tersebut. Jogjaplan memberikan kemudahan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan. Selain itu juga meminimalisasi beberapa permasalahan teknis seperti kendala pencetakan dokumen, kesalahan perhitungan, dan pengambilan urusan. Konsistensi penggunaan program RPJMD dan Target kinerja menjadi leb-

ih pasti karena melalui Jogjaplan ini referensi yang dipergunakan adalah dokumen RPJMD.

Kasubid Perencanaan Sektoral, BAPPEDA DIY Danang Setiadi memaparkan beberapa manfaat lain, di antaranya, dapat memudahkan dalam menyajikan informasi perencanaan secara cepat dan akurat. Untuk bisa menampilkan program dan kegiatan yang menasar pada prioritas, sasaran, sifat kegiatan, urusan, lokasi tidak membutuhkan waktu yang lama.

waktu yang lama, di mana harus bolak-balik mengadakan rapat dan pembahasan, dengan adanya Jogjaplan pelaksanaan *desk* dilakukan secara langsung dari aplikasi dan diperoleh hasil yang *real time*,” kisah Danang.

Selain itu, informasi secara makro terkait perencanaan juga tidak bisa didapatkan dalam waktu yang cepat, sehingga evaluasi proses perencanaan membutuhkan waktu yang lama. Transparansi dan akuntabilitas proses dan hasil perencanaan sangat

tertutup. Masyarakat tidak leluasa mengetahui dan mencermati proses dan hasil perencanaan secara detail di semua SKPD yang ada. Informasi rekapitulasi perencanaan berdasarkan prioritas urusan pembangunan, sasaran pembangunan, serta sebaran lokasi dan SKPD juga tidak tersaji.

Dengan Jogjaplan tersebut, produktivitas kinerja Pemprov DIY semakin meningkat. Koordinasi semakin efektif serta membuat iklim kerja yang harmonis. Kehadiran Jogjaplan menjadi contoh konkret penerapan *e-planning* menjadi salah satu solusi pelayanan publik dapat berjalan baik. *E-planning* tepat guna dapat mendorong serta memperluas jaringan partisipasi masyarakat.

E-planning yang baik juga berdampak pada optimalisasi pengambilan kebijakan perencanaan dan *affirmative policy* terkait alokasi pendanaan terhadap daerah lokus kemiskinan, ketimpangan wilayah antara kabupaten/kota, serta prioritas pembangunan dan urusan. sudah saatnya *e-planning* menjadi strategi pemerintah daerah dengan fiskal terbatas untuk mencukupi kebutuhan pendanaan pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan *e-planning*, sangat dimungkinkan untuk dapat membuat alokasi belanja yang sesuai dengan ketersediaan pendanaan per SKPD. Sehingga SKPD tidak dapat merencanakan melebihi batas yang telah ditentukan walau serupiah pun. (MSR)

“Sehingga ketika posisi sedang tidak berada di kantor masih memungkinkan untuk bisa mendapatkan informasi tersebut dan diolah untuk menjadi input pengambilan keputusan kebijakan pimpinan, atau memberikan penjelasan kepada siapa pun mengenai detail dari program kegiatan,” papar Danang.

Kepada *Media BPP* Danang juga menceritakan kesulitan proses perencanaan sebelum adanya Jogjaplan. Menurutnya sering terjadi kesalahan teknis, seperti perhitungan alokasi pendanaan yang kurang akurat, ketidaklengkapan dalam penyusunan perencanaan, serta terjadi tumpang tindih dalam pengambilan tupoksi antar SKPD.

“Koordinasi antara SKPD dengan TAPD tidak efektif dan memakan



BPP Sumatera Utara

BERPRESTASI DI TENGAH KETERBATASAN

Bangunan berlantai dua dengan tembok cat berwarna krem kusam tampak mendominasi kawasan seluas 2.545 m2 itu. Sekilas, bangunan yang dipenuhi dengan deretan mobil dinas berplat merah itu seperti gedung sekolah, jika tidak melihat sebuah plang bertuliskan “Badan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”

Jarum jam menunjukkan angka pukul 10.00, namun teriknya matahari sudah mulai membasahi hampir sebagian baju karena keringat. Kami menemui salah satu staf pejabat yang berada di sana. Berbincang mengenai beberapa program yang telah mereka lakukan di tengah keterbatasan dan tantangan baru sejak lahirnya PP No 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Menjadi landasan kebijakan gubernur

Digawangi oleh Effendy Pohan, BPP Sumut termasuk dalam kriteria BPP Daerah yang maju dengan tipe A. Bukan hal yang mudah untuk menjadi seperti sekarang, kedisiplinan dan perencanaan yang matang dalam melaksanakan setiap program harus terus dilakukan.

Tidak hanya matang dalam perencanaan program, tapi apa yang sudah dijadwalkan harus terealisasi dengan baik, terbukti bahkan setiap bidang penelitian, mewajibkan ada dua kegiatan yang harus berjalan setiap tahunnya. Sehingga total keseluruhan program tiap tahun ada 8 kegiatan penelitian yang umumnya banyak digunakan oleh Pemerintah Daerah Sumatera Utara sebagai landasan pengambil kebijakan.

“*Nah*, pada akhir tahun kami selalu mengadakan diseminasi setelah kegiatan semua berakhir. Diseminasi kajian-kajian litbang biasanya bekerja sama dengan unit lain maupun universitas,” kata **Afifi Lubis** Sekretaris BPP Sumut.

Beberapa program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPP Sumut juga banyak digunakan menjadi dasar landasan kebijakan Gubernur.

Provinsi Sumatera Utara salah satu provinsi yang maju di Indonesia, dengan tingkat pendidikan yang tinggi dan kesejahteraan yang notabennya cukup maju, membuat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) setempat terus bersaing meningkatkan prestasinya, terutama di bidang penelitian. Meski dana dan perhatian pemerintah dirasa kurang, mereka selalu optimis dan bekerja maksimal. Lantas seperti apa prestasi yang telah diukir?



Seperti kajian mengenai kelautan, pendidikan dan MEA (Masyarakat Ekonomi Asean), tunjangan hasil pegawai SKPD Sumut, Pelindo (Pelabuhan Indonesia), Samsat, dan *Science Center* (Pusat Sains). “Biasanya hasil kajian kami menjadi dasar rekomendasi Gubernur. Jadi kita yang memunyai konsep, mereka yang mengembangkan,” papar Afifi.

Komunikasi yang terjalin, dan kerja keras peneliti di sana, mampu membuat BPP Sumut bersinergi dengan

pemerintah setempat meski hanya terdapat 7 orang peneliti muda. Tapi mereka mampu membuktikan prestasi di tengah keterbatasan.

“Jumlah peneliti ada 7 orang peneliti muda, dulu ada 1 Peneliti Madya tetapi saat ini sedang kuliah di Amsterdam. Semua peneliti kami sudah mengikuti diklat dan peneliti di sini cukup produktif dalam membuat tulisan-tulisan ilmiah, bahkan terkadang kami rasa sulit untuk mencari wadah yang siap untuk menampung hasil pemikiran atau penelitian pe-



Sawit).

“Dari pengembangan kelapa sawit, dan beberapa inovasi lainnya seperti biogas dari kotoran sapi, kami pernah mendapatkan penghargaan Budipura dari Kemenristek dan Dikti. Penghargaan itu merupakan penghargaan untuk daerah yang berhasil menciptakan SIDA dan berinovasi dengan baik,” terangnya.

Lahirnya RPP Inovasi Daerah yang juga tengah dirancang oleh induk BPP Daerah, yakni BPP Kemendagri ini, diharapkan oleh Afifi dan kawan-kawan dapat bersinergi dengan program dan prestasi yang selama ini telah dikembangkan. “Kami hanya bisa berharap RPP ini dapat bersinergi dengan apa yang sebelumnya telah kami lakukan, jangan berjalan masing-masing antara Kemenristek dan Kemendagri. Karena terus terang, itu akan menyulitkan kami, dan selama ini Kemenristek lah yang banyak membantu kami,” ungkap Sugih Prihatin, Kepala Bidang Ekonomi Pembangunan BPP Sumut.

Ingin memajukan jurnal ilmiah

Selain aktif meneliti, melakukan inovasi, hasil-hasil penelitian juga mereka tuangkan dalam Jurnal Ilmiah mereka bernama jurnal inovasi. Jurnal ini sebenarnya sudah terakreditasi, dan bisa dibilang jurnal di daerah yang sudah maju dibandingkan di berbagai daerah. Hanya saja, semangat memajukan jurnal tersebut tidak ingin puas sampai titik akreditasi saja.

Afifi ingin memajukan jurnal elektronik sesuai dengan peraturan LIPI yang baru, sehingga ada kemungkinan jurnal ini bahkan berkembang menjadi jurnal internasional. “Kami akan semakin menyeleksi naskah yang masuk secara ketat, agar akreditasi kami terjaga dan kualitas jurnal kami tidak menurun. Penulis harus benar-benar menjaga kualitas substansi isi artikelnya. Tidak ada kata “kemanusiaan”, “pertemanan” untuk masuk dalam jurnal ini, kalau tulisan tersebut jelek, tidak akan kami muat,” tandas Afifi.

Namun lagi-lagi semangat memajukan produk dari penelitian dan pengembangan itu harus tersendat langkahnya karena berbagai persoalan yang tidak didukung oleh pemerintah pusat. “*Nah*, itu dia masalahnya. Rencana kami sudah mengarah ke jurnal internasional, namun apa daya belum ada anggarannya. Karena mungkin masih dianggap sebelah mata, dan dirasa tidak begitu penting. Padahal SDM kami banyak yang sudah paham tentang jurnal, tetapi pemerintah pusat tidak memfasilitasi itu,” ungkapnya penuh harap.

Mereka juga berencana, setiap hasil penelitian tidak hanya didesiminasi tetapi juga bisa dimuat di jurnal internasional, yang pada intinya menuangkan beragam hasil penelitiannya tersebut dalam jurnal internasional. Semangat! Semoga BPP Sumut mampu menunjukkan yang terbaik dan membuktikan pada pemerintah pusat. (IFR)

Menelusuri Keindahan Pulau Pinggiran

Hiruk pikuk dan kepenatan suasana kota Metropolitan memang tidak akan ada habisnya. Jalanan macet, keramaian di fasilitas umum, apalagi ketegangan menjelang Pilkada 2017 mendatang. *Duh* khayal bukan, bagaimana hidup di Jakarta?

Namun, di tengah segala ketegangan tersebut, ibu kota negara Indonesia itu mempunyai banyak tempat yang bisa dikunjungi sebagai tempat *refreshing* dan penghilang penat. *Yups!* Ada gugusan pulau di pinggiran Jakarta yang biasa kita kenal dengan Pulau Seribu. *Nah*, seperti apa *sih* keindahan Pulau Seribu dan kekayaan sejarahnya? *Yuk* langsung saja simak perjalanan liputan Tim *Media BPP* menelusuri pulau-pulau di utara Jakarta ini.

Pulau sibuk

Pulau Onrust yang diambil dari bahasa Belanda yang berarti 'Tidak Pernah Beristirahat' atau dalam bahasa Inggrisnya adalah *'Unrest'* menjadikan pulau ini konon pulau tersibuk di masanya. Benar saja, saat kami mendatangi pulau yang kini tidak berpenghuni itu, masih banyak peninggalan sejarah yang menjadi saksi bisu, pulau ini pernah menjadi pulau tersibuk di Kabupaten Kepulauan Seribu.

Di dalamnya terdapat banyak peninggalan arkeolog pada masa kolonial Belanda. Mulai dari makam Belanda, replika penjara, dan juga sebuah rumah utuh yang kini dijadikan Museum Pulau Onrust. Saking sibuknya, konon pada masa kolonial Belanda, rakyat sekitar menyebut Pulau Onrust sebagai Pulau Kapal, karena di pulau itu sering sekali dikunjungi kapal-kapal persinggahan Belanda sebelum menuju Batavia.

Namun ada sumber lain yang mengatakan, nama Onrust diambil dari nama penghuni pulau yang masih keturunan bangsawan Belanda, yakni Baas Onrust

Cornelis van der Walck. Tapi benar atau tidaknya, yang jelas pulau ini menyimpan banyak sejarah yang mengungkapkan kehidupan pernah ada di pulau ini.

Konon katanya, pada zaman dahulu Pulau Onrust dan pulau-pulau lain di Teluk Jakarta (sekarang disebut Kepulauan Seribu) pernah menjadi tempat peristirahatan keluarga raja-raja Banten. Namun kemudian terjadi sengketa antara Kerajaan Banten dan Jayakarta hingga tidak pernah ada upaya penyelesaian. Jayakarta merasa memiliki pulau ini karena lokasinya dekat (di hadapan Kota Jayakarta), sedangkan Banten menyayur hak atas pulau tersebut sebab seluruh Kepulauan Seribu merupakan bagian dari teritorial kekuasaannya.

Saat Belanda datang dan gagal memonopoli perdagangan di Banten kemudian mengalihkan perhatiannya ke Jayakarta dengan menggunakan salah satu pulau di Teluk Jakarta, yakni Pulau Onrust. Pada 1610 terjadi perjanjian antara Belanda dan Jayakarta yang isinya memperbolehkan orang-orang Belanda mengambil kayu untuk pembuatan kapal-kapalnya di Teluk Jakarta. Melihat banyak kapal yang berlayar ke Asia Tenggara, dan tinggal beberapa lama, sehingga sering memerlukan perbaikan kapal akibat perjalanan panjang, maka VOC berniat untuk membangun sebuah galangan kapal di teluk tersebut. Niat tersebut diizinkan oleh Pangeran Jayakarta dengan menggunakan Pulau Onrust. Akhirnya dimulailah pembangunan 'bengkel kapal' dan sebuah gudang kecil pada 1613.

Pembangunan sarana fisik terus dilakukan hingga 1656 dibangunlah sebuah benteng kecil bersegi empat dengan 2 *bastion* (bangunan yang menjorok keluar berfungsi sebagai pos pengintai). Hingga kemudian diperluas kembali menjadi benteng persegi lima dan ditambah gudang-gudang penyimpanan barang, dan sebuah kincir angin untuk



penggergajian kayu.

Memasuki abad ke-18, silih berganti pulau ini banyak dimasuki oleh koloni lain selain Belanda. Pada 1800-an, Inggris melakukan blokade Batavia, yang dikepung pertama kalinya adalah Pulau Onrust dan sekitarnya. Semua bangunan yang terdapat di permukaan Onrust tersebut dimusnahkan. Setelah hancur, Belanda merencanakan pembangunan kembali atas pembangunan Onrust, namun baru selesai pembangunannya, Inggris kembali menghancurkan Onrust. Hingga pada 1848 aktivitas di Onrust berjalan kembali.

Namun sayangnya, setelah kejadian demikian Onrust kehilangan perannya dalam dunia perkapalan dan pelayaran akibat beberapa pelabuhan sudah hancur dan tidak layak. Baru memasuki abad ke-19, Belanda menciptakan stasiun cuaca di pulau ini dan juga Pulau Cipir. Hingga pada akhirnya Onrust diubah fungsinya menjadi karantina Haji sampai 1933. Para calon haji dibiasakan dulu dengan udara laut, karena saat nanti mencapai Tanah Suci harus naik kapal laut selama berbulan-bulan lamanya, dan kemudian sebagai pos karantina jemaah haji yang kembali.

Peran Onrust sebagai tempat penampungan haji lama-kelamaan berubah menjadi pulau penampungan jemaah haji yang sakit. Sampai pada akhirnya, tempat ini lambat laun dijadikan tempat tawanan para pemberontak dan kriminal kelas berat pada masa pemerintahan Belanda dan Jepang 1942.

Pada masa Indonesia merdeka pulau ini dimanfaatkan sebagai Rumah Sakit Karantina, terutama bagi penderita penyakit menular di bawah penga-

wasan Departemen Kesehatan RI hingga awal 1960-an. Selain itu, pulau ini juga dimanfaatkan untuk penampungan para gelandangan dan pengemis, selain itu juga dimanfaatkan untuk latihan militer. Hingga akhirnya pulau ini sempat terbengkalai, dianggap tidak bertuan hingga tahun 1968 terjadi pembongkaran dan pengambilan material bangunan secara besar-besaran oleh penduduk atas izin kepolisian setempat.

Lantas, pada masa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin mengeluarkan SK (Surat Keputusan) yang menetapkan Pulau Onrust sebagai pulau bersejarah. Kini, Pulau Onrust, juga Pulau Cipir, Pulau Bidadari, Pulau Kelor dan Pulau Edam, oleh Pemerintah Indonesia ditetapkan sebagai daerah Suaka Taman Purbakala Kepulauan Seribu.

Pulau Cipir

Pulau Cipir disebut dengan Pulau Kahyangan yang juga masih meninggalkan reruntuhan sejarah, seperti sisa kamar jemaah haji, dan puing-puing jembatan yang menghubungkan Pulau Cipir ke Pulau Onrust.

Pada masa kolonial Belanda bahkan hingga masa Orde Baru. Pulau ini dahulu disebut sebagai Pulau Kuyper's Island yang berfungsi sebagai salah satu benteng pertahanan Belanda bersama dengan Pulau Onrust dan Pulau Kelor. Sama seperti halnya Pulau Onrust, Pulau Cipir merupakan lahan bekas rumah sakit untuk perawatan dan karantina penyakit menular bagi para jemaah haji. Para jemaah seluruh Indonesia yang ingin naik haji dipusatkan dahulu di sini.

Konon katanya, zaman dahulu terdapat banyak pasien karantina haji yang sakit



dan disuntik mati di pulau ini. Setelah mereka selesai pergi haji pun, mereka harus dikarantina kembali di Pulau Cipir untuk melakukan pemeriksaan. Mengapa? Pasalnya, waktu itu Belanda khawatir terhadap gerakan Islam yang berkembang di Arab Saudi. Takutnya, orang-orang yang bergelar haji itu akan menentang bahkan memberontak melawan Belanda.

Ternyata, kekhawatiran Belanda memang benar. Selama perang kemerdekaan Indonesia, banyak orang Indonesia yang bergelar "haji" melakukan perlawanan terhadap Belanda. Gelar haji sebenarnya hanya ada di Indonesia yang berarti telah menunaikan ibadah dan disegani. Belanda *lah* yang memberi gelar haji itu kepada orang Indonesia. Untuk mencegah pemberontakan pada masyarakat, para jemaah haji juga disinggahkan pada pulau yang memang terlihat menyeramkan itu. Sisa reruntuhan bangunan rumah sakit dengan

“Setelah Belanda hengkang, sejarah di pulau ini terbengkalai. Pada pada masa Orde Baru, pulau ini kembali menjadi tempat karantina, bagi penderita TBC dan kusta (lepra).”

dikelilingi banyaknya pohon lebat sehingga membuat suasana tambah menakutkan.

Setelah Belanda hengkang, sejarah di pulau ini terbengkalai. Pada pada masa Orde Baru, pulau ini kembali menjadi tempat karantina, kali ini bagi penderita TBC dan kusta (lepra). Namun mereka diangkut ke sini bukan untuk disembuhkan, melainkan sengaja diasingkan agar penyakit mereka tidak mudah menular.

Untuk mengunjungi ke pulau-pulau tersebut, dapat dilakukan dengan menyewa perahu dari Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara. Banyak agen tour dalam satu hari yang menawarkan jasa mengililingi perjalanan ke 3 pulau dalam satu hari plus makan siang ikan bakar dan kerang dari masakan penduduk setempat. Harganya cukup murah, sekira Rp 90 ribu – 110 ribu. *Wah* murah dan seru *ya!* (IFR)



Eksotisme Pulau Kelor

Cuaca hari itu cerah, hujan semalam sebelumnya seperti tidak menyisakan basah. Langit biru sejauh mata memandang, cahaya matahari pagi menyentuh lembut Pelabuhan Muara Kamal, Jakarta. Beberapa angkot merah menurunkan penumpang dari jauh gerbang pelabuhan. Di kanan dan kirinya sesak dengan tumpukan ikan di meja-meja kayu dan modular.

Pelabuhan tepat berada di ujung pasar ikan, pelabuhan yang tidak terlalu besar ini, selalu ramai dikunjungi wisatawan ketika akhir pekan. Di pelabuhan kecil itu pula, tidak ada kapal besar di dermaga, yang ada hanya kapal-kapal kayu milik nelayan setempat. Setidaknya itu yang Tim Media BPP lihat ketika berada di sana. Hari itu kami hendak melakukan perjalanan menyusuri pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Kami memilih melakukan perjalanan bersama rombongan jasa pemandu wisata, bergabung dengan 35 orang peserta lainnya.

Pelabuhan Muara Kamal berdiri sejak 1960an, dan menjadi pusat perikanan Jakarta Utara. Kala itu, pelabuhan tak pernah sepi dari penjual dan pembeli ikan. Maka tidak aneh ketika Zaenuddin HM, dalam bukunya setebal 377 halaman berjudul "212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe," membahas Muara Kamal lebih dalam dengan suasana keramaiannya.

Kini, semua sudah berubah. Menurut Sukin, salah seorang yang bertugas di pelabuhan itu, saat ini Muara Kamal tidak seramai dulu. Selain tempatnya tak

tertata rapi, air lautnya juga kotor dan bau. Para konsumen ikan pun mulai berpindah ke Muara Angke, apalagi ketika di sana sudah dilakukan penataan, kata pria berciput yang sedang asik memarkirkan bus hijau tua milik TNI itu.

Sukin, usianya menginjak 55 tahun, ia sudah menetap di sekitar Muara Kamal sejak 30 tahun lalu. Ketika Tim Media BPP bertanya tentang suasana pelabuhan saat ini, ia menjelaskan dengan semangat. "Kalau Sabtu dan Minggu lumayan, pelabuhan ramai sampai malam, banyak dari berbagai daerah di Indonesia, dan turis asing juga. Paling, perlu ada perbaikan lah untuk akses ke perahu, agar memudahkan turis," kata Sukin, pria kelahiran Jawa Timur ini.

Setelah asyik berbicara, seorang pemandu memanggil rombongan yang kami ikut di dalamnya. Dalam sebuah ruang seluas 10x5 itu, kami dan wisatawan lain, berdesakkan memenuhi ruang kecil itu. Rombongan dari berbagai kelompok wisata pun mulai berdatangan. Menunggu antrean menaiki perahu yang hendak akan kami seberangi ke Pulau Seribu. Untuk menuju Pulau Seribu, sebenarnya penguji bisa menaiki perahu tidak hanya dari Muara Kamal, namun khusus untuk tujuan beberapa pulau kecil tertentu, jarak yang paling aman dan paling dekat bisa ditempuh melalui pelabuhan ini.

Selain kecil, akses menuju perahu di pelabuhan ini juga cukup sulit. Untuk sampai ke perahu di dermaga, kami harus mengular di jalan setapak, bermacam satu di antara selasar pelabuhan dan dermaga. Kemudian kami harus

menaiki beberapa anak tangga kembali dan berjalan di antara rumah-rumah deret milik penduduk yang menambah kekumuhan dermaga kecil di utara Jakarta itu.

Tidak cukup sampai situ, untuk menuju perahu, jembatan bambu harus kami lalui, beberapa wanita terlihat berjinjit membuka sepatu, untuk turun menuju perahu. Tepat pukul 10 pagi, perahu kayu telah siap memulai perjalanan, suara mesin-mesin bergemuruh riang tanda kapal siap berangkat. Ede sebagai pemandu memimpin keberangkatan, ia berdiri di depan dek perahu sambil melihat data peserta dalam secarik kertas putih di tangannya. Sesekali ia bertanya tentang kesiapan peserta. Tali temali dilepaskan, suara mesin semakin kencang, mesin pun mulai bekerja. Suara mesin terdengar menderu memutar baling-baling membuat gelombang air di buritan.

Lima belas menit berlalu, perahu berada di antara gelombang. Airnya menjadi beriak ketika ujung lancip perahu kayu menerobos gumpalan kecil gelombang. Satu persatu peserta maju ke depan, menuju dek perahu melakukan pemotretan.

Dua puluh menit kemudian, bantalan karet yang ada di dinding perahu akhirnya menyentuh dermaga. Benturannya sedikit kencang, membuat perahu seperti terhempas. Bagi kami penumpang yang baru pertama kali menaiki perahu kayu, itu sudah sangat mengesankan. Tali temali segera dilemparkan ke dermaga, petugas pun cekatan mengambilnya. Mengikatkan ke tonggak

besar. Saat semua selesai diikat. Perahu kayu yang membawa rombongan telah sempurna tertambat.

Dua anak kecil, Farras dan Fawwaz berlarian riang di atas dermaga, kaos lengan panjangnya berkibar ditiup angin kencang, diteriaki ibu mereka agar hati-hati. Beberapa penumpang bergegas mengambil kamera mengambil posisi penting untuk mengabadikan momen. Hari itu, kami tiba di atas pulau kecil dengan luas sekira 2 ha, yaitu Pulau Kelor, sebuah pulau kecil nan eksotis yang terdapat di gugusan Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta.

Pulau Kelor

Keindahannya terkenal ke sentero negeri. Namanya menjadi terkenal ketika selebriti negeri ini bintang film kenamaan Atikah Hasiholan dan Rio Dewanto melangsungkan resepsi pernikahan di pulau tersebut, dan ditayangkan berepisode-episode oleh salah satu televisi swasta nasional beberapa waktu lalu. Keindahan Pulau Kelor tidak ada yang membantah, pulau ini memiliki pantai berpasir putih dengan nuansa ketenangan ombaknya.

Dari kejauhan, beberapa ratus meter ketika hendak mendarat di dermaga Pulau Kelor, terlihat tanggul-tanggul kecil di pingir pantai berbaris rapi. Pohon-pohon besar berdaun hijau terlihat rimbun menutupi sebagian pulau, dahan-dahannya hampir menyentuh pantai.

Inti dari Pulau Kelor sebenarnya bukanlah itu, Pulau ini lebih dari wisata pantai. Pulau ini menyimpan banyak cerita, dari mulai sejarah, mistis, hingga yang menggelitik. Di pulau yang dahulu dikenal dengan nama Pulau *Kherkof* ini terdapat peninggalan Belanda berupa galangan kapal dan sebuah benteng. Adalah Benteng Martello yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Benteng Martello merupakan salah satu pesona

Pulau Kelor yang sudah terlihat dari kejauhan. Tak ada pemandu yang bisa menjelaskan sejarah pulau ini, namun ada beberapa tulisan untuk memberitahukan secara singkat beberapa peninggalan yang ada di sana.

Membayangkan Benteng Martello seperti kembali pada abad 17 Masehi, ketika VOC menduduki Nusantara. Beberapa literatur menyebutkan, benteng tersebut dibuat untuk menghalau serangan musuh, di antaranya serangan bangsa Portugis. Benteng Martello sendiri terbuat dari batu bata merah yang kokoh berbentuk silinder. Jika kita mau membayangkan lebih jauh, benteng tersebut memiliki dua buah jendela yang masing-masing berukuran 2 meter baik panjang dan lebarnya. Di salah satu jendela di sebelah barat juga terletak engsel besi yang mungkin saja memiliki daun jendela pada saat itu. Terdapat juga dua lubang sempit untuk menembak ke luar.

Hanya sedikit yang tahu, Benteng yang masih berdiri kokoh ini, pernah pernah porak poranda akibat *tsunami* karena letusan gunung Krakatau pada 1883, namun sisa-sisa benteng ini masih menyisakan sejarah yang menarik untuk dipelajari, Namanya sendiri diambil dari nama daun kelor, tumbuhan dengan nama latin *Moringa oleifera*.

Cerita lainnya terbilang mistis. Elsa, seorang pemimpin perjalanan dengan malu-malu mengatakan, jika pulau ini merupakan kuburan dari para pejuang dan tahanan politik negeri kita yang gugur. Maka tidak heran jika sebagian orang menganggapnya cukup angker.

"Pulau ini menjadi kuburan mereka yang memberontak pemerintah Belanda. Kuburan tersebut pun dikenal dengan kuburan Kapal Tujuh atau *Sevent Provincien*, saya ngeri kalau cerita lebih jauh" tutur Elsa, sambil ketawa.

Cerita yang menggelitik adalah ketika ia

juga menjelaskan tentang keberadaan kucing-kucing yang menghuni pulau tersebut yang dianggap mistis. Dikatakannya sebagai jelmaan dari orang-orang yang meninggal pada masa 1700 tahun lalu. Namun, menurutnya saat ini kucing-kucing tersebut menghilang seiring banyaknya wisatawan yang datang. "Mungkin karena tidak terbiasa dengan keramaian mahluknya," katanya

Namun, terlepas dari itu semua, apa pun cerita tersebut, keindahan Pulau Kelor perlu dilestarikan, Karena pulau tersebut merupakan salah satu yang menambah keindahan dan kekayaan pulau seibu, Keindahan alamnya harus bisa dinikmati sebelum hilang dalam kurun waktu 45 tahun mendatang akibat pemanasan global, yang diprediksi *National Geographic* baru-baru ini.

Pulau-pulau nan indah tersebut juga mesti dijaga agar bisa dimanfaatkan dan tetap jadi kebanggaan bersama, serta tidak dieksploitasi seperti beberapa pulau lain di gugusan kepulauan seribu. Banyak pulau-pulau di Kepulauan Seribu tidak bisa dinikmati, lantaran menjadi milik pribadi dan dikuasai oleh segelintir orang.

Pada Pasal 33 Ayat 1 UUD 1945 telah jelas mengatakan, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Setelah acara berkeliling pulau selesai, pukul lima sore, kami bergegas pulang, saat di perjalanan di tengah lautan, burung-burung camar terbang rendah di antara bambu-bambu yang terpancang di atas laut. Waktu semakin larut, Sore itu, senja membungkus lautan, langit bersih tanpa saputan awan. sejauh mata memandang. Bola matahari merah siap turun di peraduannya. Kami pun kembali dengan selamat. Sungguh Perjalanan ke Pulau Kelor yang mengesankan. (MSR)

Mendagri Wacanakan Revisi UU Ormas

JAKARTA – Semakin banyaknya organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia membuat ormas tidak terkontrol di masyarakat, oleh beberapa aktor, keberadaan ormas juga sering dijadikan alat untuk meraih kepentingan, terlebih jika ormas tersebut sudah bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Atas dasar itulah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mendorong agar dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas). Dari data Kemendagri 2016, jumlah ormas di Indonesia mencapai 254.633 dan tercatat di berbagai kementerian.

Di Kemendagri sendiri tercatat sebanyak 287 organisasi, di provinsi 2.477 organisasi, kabupaten/kota sebanyak 1.807 organisasi, Kemenlu 62 ormas asing dan di Kementerian Hukum dan HAM 250.000 organisasi. Namun, dari jumlah tersebut tidak banyak ormas yang eksis dan mendukung kebijakan program negara.

Untuk itu, revisi UU tersebut penting dilakukan. Alasannya Tjahjo mengatakan wacana revisi UU itu tidak lain untuk menagih komitmen ormas-ormas atas kesetiaan mereka pada bangsa. Sebab, dengan kemudahan mendaftar secara *online*, bisa saja organisasi garis keras mengaku pro Pancasila. Tapi tidak ada yang menjamin, apakah jika ada kesempatan ormas tertentu akan tegak lurus dengan pemerintahan dan sesuai dengan ideologi bangsa.

“Karena sekarang ini dengan mudahnya orang buat ormas, apalagi izinnya bisa cukup *online*, semua ormas mengakuinya dasarnya Pancasila, tapi dalam praktiknya dalam ucapannya, tidak,” tutur Tjahjo di Balai Kartini,

Selain itu, Tjahjo menggarisbawahi tentang betapa mudahnya ormas asing dari luar negeri, membuka cabang di Indonesia. Namun demikian, untuk organisasi jenis ini Tjahjo tak menyinggung mengenai hukuman. Prinsipnya ia ingin meluruskan bahwa semua organisasi



yang bernaung di Nusantara harus menghormati dasar-dasar negara dan tak boleh menentangnya.

“Makanya akan diperketat dan sanksinya juga dipertegas, bukan soal hukuman, tapi yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 45 dan pemerintah yang sah, saya kira itu,” imbuh Tjahjo.

Lebih lanjut, Mantan Sekjen PDIP ini menekankan poin untuk mempersiapkan revisi UU itu. Menurut pengakuan Tjahjo, kini memang sedang rajin dibahas oleh Kementerian/Lembaga ter-

kait revisi UU tersebut termasuk pihaknya. Nantinya, usulan ini akan diteruskan pada DPR dan dimasukkan dalam Prolegnas.

Wacananya penyusunan UU Ormas tersebut akan dilakukan setelah selesainya Prolegnas UU Politik dan Penyelenggaraan Pemilu sebagai pilar demokrasi di Indonesia. Dengan adanya upaya ini, pemerintah bisa lebih mudah untuk membiayai keberadaan ormas Meski kebebasan berserikat dan berkumpul itu dijamin Undang-Undang. (diolah dari berbagai sumber)

Mendagri: Zakat Membantu Kurangi Kemiskinan

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) memiliki kontribusi yang besar dalam membantu pemerintah dalam mengurangi angka kemiskinan.

“Pemerintah menargetkan Tahun 2017 angka kemiskinan menurun menjadi 11 persen,” pesan Tjahjo dalam sambutannya yang dibacakan staf ahli Mendagri Nuryanto dan anggota Baznas pada acara Rapat Koordinasi Baznas dengan kepala daerah di Jakarta.

Tjahjo mengatakan potensi zakat nasional sekitar Rp 200 triliun, namun dalam pengumpulan zakat tersebut belum optimal, dan tingkat pengumpulan zakatnya masih satu persen dari Rp 200 triliun.

Menurut Tjahjo, zakat merupakan ibadah dan untuk kepentingan umat. Alasannya, program kerja Baznas sejalan dengan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan. Mendagri mendesak agar kepala daerah segera menyelesaikan keanggota Baznas berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Selain itu, persoalan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai dana operasional Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah, juga terus menjadi pembahasan Baznas Pusat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Menurut Bambang Sudibyo dari Baznas, nantinya, alokasi dana APBD yang dialokasikan untuk operasional Baznas

Daerah bernilai relatif kecil. Permasalahan akan muncul jika dana yang dialokasikan dimintai pertanggungjawaban oleh KPK dan BPK.

“Pengeolaan zakat kan bagian dari ibadah, untuk itu perlu didiskusikan dengan baik agar permasalahan tidak muncul di belakang,” kata dia.

Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto menyebut, pembahasan mengenai dana bantuan APBD untuk operasional Baznas Daerah menunggu surat yang dikirimkan Baznas Pusat kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Menurut Sigit, di waktu mendatang, Mendagri akan membuat peraturan mengenai penyusunan APBD yang di dalamnya mengatur bantuan dana operasional kepada Baznas Daerah.

“Untuk jumlah ya tidak. Masing-masing daerah kan kondisinya beda-beda. Kupang dengan Aceh kondisinya kan beda,” ucap Sigit. (diolah dari berbagai sumber)



LEMBATA – Pentingnya menggelorakan kembali semangat persatuan bangsa ditengah situasi politik bangsa saat ini, membawa atmosfer tersendiri dalam perhelatan Nasional Hari Nusantara, yang tahun ini dipusatkan di Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada t13 Desember lalu.

Meskipun sudah menjadi agenda tahunan, puncak Hari Nusantara kali ini tetap sangat strategis, karena diharapkan mampu mendorong kesadaran berbangsa dan bernegara yang berbhineka tunggal ika. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Panitia Utama tahun ini, menilai momen Hari Nusantara dapat menjadi perekat persatuan rakyat Indonesia yang merupakan negara kepulauan. “Melalui hari bersejarah bagi nusantara ini, mari kita gelorakan kembali semangat persatuan Indonesia yang berwawasan Nusantara,” tutur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo.

Selain itu, Mendagri menambahkan, energi bangsa dapat disalurkan secara positif untuk membangun kawasan pesisir Indonesia. Hal ini merujuk bahwa di setiap pelaksanaan Hari Nusantara selalu dipilih lokasi dipinggir pantai sebagai bagian wilayah pesisir Indonesia.

“Dengan dilaksanakannya Hari Nusantara didaerah pesisir pantai, maka akan mendorong pembangunan dikawasan tersebut, baik dari sisi potensi daerahnya, sarana dan prasarannya, seperti hotel dan transportasi, serta promosi bagi daerah tersebut sebagai salah satu unggulan destinasi wisata di Indonesia,” ujar Mendagri.

Lebih lanjut, Mendagri menjelaskan, pelaksanaan kegiatan ini merupakan sinergi dari panitia pusat yang merupakan kerja sama antara Kementerian dan Lembaga, lalu panitia Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Lembata.

“Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antar lembaga pemerintahan dari pusat sampai daerah berjalan dengan baik, sehingga poros pemerintahan yang tegak lurus terbukti efektif sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia,” ungkap Tjahjo.

Tujuan peringatan Hari Nusantara sendiri, di antaranya mengubah cara pandang (*mindset*) bangsa Indonesia mengenai ruang hidup dan ruang juang

dari matra darat menjadi matra laut, yang berarti terdapat keseimbangan antara matra darat dan matra laut. Disamping itu, menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama (*mainstream*) pembangunan nasional dan menghasilkan model pembangunan terintegrasi lintas sektor bagi daerah terpedan, terpencil, dan tertinggal. “Serta bertujuan mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia yang mampu mensejahterakan rakyatnya,” ungkap Mendagri.

Mendagri kembali mengingatkan, visi poros maritim bisa terwujud apabila ada kebijakan dan program pendukung yang tepat, efektif dan kompetitif. Program-program pembangunan kelautan tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga.

“Oleh karena itu perlu pembangunan yang terintegrasi oleh berbagai Kementerian/Lembaga tersebut melalui kegiatan Hari Nusantara,” imbuh Mendagri.

Gerakkan potensi masyarakat

Pada kesempatan yang sama, Tjahjo mengimbau kepada kepala daerah untuk mengorganisasi serta menggerakkan potensi masyarakat guna meningkatkan pertumbuhan pariwisata serta perekonomian di daerah.

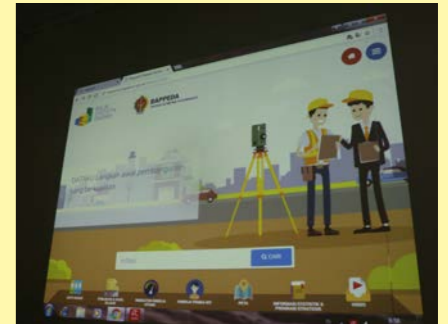
“Sumber utama pariwisata adalah menggerakkan masyarakat. Tugas kepala daerah adalah mengorganisasi potensi masyarakat, menggerakkan masyarakat untuk daerah tujuan wisata, supaya pertumbuhan ekonomi di daerah bergerak,” terangnya

Dalam menggerakkan potensi tersebut, menurut Tjahjo diperlukan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Sebagaimana sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

Di Provinsi NTT, misalnya, perlu ada sinergi pembangunan dengan Provinsi NTB dan Provinsi Maluku untuk pengembangan potensi pariwisata daerah. Itu, kata Tjahjo juga untuk mengangkat potensi wisata yang dinilainya luar biasa.

“Ini kalau sudah ada sinergi, ada konektivitas pertumbuhan akan cepat, orang akan datang. Orang datang ke Lembata kalau bandarannya sudah baik, pelabuhan perlu ditingkatkan. Kuncinya di perhubungan dan telekomunikasi, semua kan sudah ada di sini,” ujar dia. (diolah dari berbagai sumber)

E- Planning Wujudkan Pemerintahan yang Terbuka dan Transparan



JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, prinsip pemerintah saat ini adalah terbuka terhadap kritik, saran, dan masukan dari masyarakat. Kehadiran *e-planning* menurutnya merupakan salah satu wujud transparansi terhadap kinerja pemerintahan. Untuk itulah, pihaknya tengah berupaya memaksimalkan peran *e-planning* tersebut.

“Saat ini pemerintah tengah berupaya untuk mempercepat proses *e-planning* agar transparan dan terbuka,” ungkap Tjahjo di Kantor Kemendagri, Jakarta.

Dengan adanya sistem *e-planning* mendagri berharap berbagai praktik pungutan liar dapat dicegah. Salah satu contoh saat ini dari Kemendagri sendiri selalu memonitor beberapa tamu yang datang ke Kemendagri. Menurut Tjahjo, fungsi Kemendagri memiliki peran penting meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Terkait transparansi anggaran di daerah, Tjahjo juga berpesan kepada para kepala daerah untuk menggunakan *e-planning* dengan serius. Tidak lupa ia memberikan contoh beberapa daerah yang sudah berhasil menerapkan *e-planning* tersebut.

“Jika saya contohkan misalnya Surabaya dan Bandung telah menerapkan *e-planning*, itu bisa ditiru oleh daerah lain. Ini komitmen kepala daerah sudah ada, tapi kan kita terjebak di Sumber Daya Manusia (SDM), saya berharap bisa lebih di masa mendatang, terutama hal-hal yang menyangkut pelayanan masyarakat,” Imbau Tjahjo. (diolah dari berbagai sumber)



Lebih Dekat

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala
BPP Kemendagri
DODI RIYADMADJI

HIDUP TANPA PERUBAHAN SAMA DENGAN MATI

Tepat pada 3 November 2016, sebuah SK (Surat Keputusan) Menteri jatuh pada pria asal Bantul, Yogyakarta, Dodi Riyadmadji. Bapak satu anak itu diperintahkan oleh Menteri Dalam Negeri untuk menjadi Plt. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan. Lantas bagaimana perjalanan karir seorang Dodi Riyadmadji dan apa saja rencana gebrakan dia untuk memajukan lembaga 'think tank' Pemerintahan Dalam Negeri itu?

tang keistimewaan Yogyakarta yang perlu diatur lebih lanjut mengenai RUU Keistimewaan. Bagi Dodi, peran aktif sebuah lembaga *think tank* tidak melulu harus lahir dari seorang pemimpinnya, ide-ide dan buah pemikiran bisa datang dari mana pun sekali pun staf biasa, selagi hal tersebut bermanfaat bagi kebijakan pemerintah. Semangat itulah yang terus ia tunjukkan selama bekerja di BPP Kemendagri.

Direktorat Baru

Pada era reformasi, tepatnya antara 1999-2000 politik pemerintahan terjadi perpecahan, hal itu juga membawa pengaruh perubahan berbagai Ditjen atau komponen di Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya muncul Ditjen Pemerintahan Umum

Daerah atau yang disingkat Ditjen Pumd. "Tahun 2000 Kemendagri mengalami perubahan menjadi berbagai Ditjen, karena waktu itu ada Kementerian Negara Otonomi Daerah," ceritanya.

Munculnya Ditjen baru, yang dulu dipimpin oleh Sudarsono membuat beberapa orang terpilih direkrut ke Ditjen tersebut, salah satunya adalah Dodi. "Ditariklah beberapa orang termasuk saya. Di Ditjen Pumd tersebut saya mengurus pemilihan Kepala Daerah dan DPRD. Selama 9 tahun di sana saya berpindah-pindah jabatan. Mulai dari Kabag Perencanaan sampai Direktur Fasilitas Kebijakan. Wah pokoknya itu berat sekali mutar-mutar di situ," selorohnya.

Menyusun pidato Menteri

Saat berkeliling di Ditjen itu selama 9 tahun lamanya, rupanya kinerja Dodi juga sempat dilirik oleh Menteri di era Presiden SBY, Mayor Jenderal TNI Mardiyanto. Selama masih berkecimpung di Ditjen Pumd, ia diminta oleh Menteri untuk membuat rancangan atau semacam konseptor pidato setiap kali Menteri menghadiri acara. "Saya dianggap bisa dan pandai, maka saya diminta tolong untuk menyusun pidato Menteri. Lalu sekitar 2009 saya masuk dalam jaringan orang-orang pekerja yang membantu Menteri," imbuhnya.

Dari situlah kemudian, karir Dodi semakin melesat, tidak lama setelah namanya menjadi andalan Menteri Dalam Negeri kala itu, ia diangkat menjadi Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah.

Berkecimpung di dunia keuangan

Nyempling dari urusan politik pemerintahan lalu merambah ke dunia ekonomi tidak menjadi alasan bagi pria kelahiran 2 April 1961 itu pantang menyerah. Meski dinilai baru, Dodi tetap mengemban amanat dan tugas yang dipercayakannya. "Untungnya S2 saya masih berkaitan dengan ekonomi. S2 saya Ilmu Marketing ya, dan saya rasa itu lebih hebat, karena tidak hanya bagaimana supaya produk harus terkenal dan laku, tetapi menjalin jaringan, dan saya rasa saya bisa mengaplikasikan itu ke dalam pekerjaan saya," tandasnya yakin.

Benar saja, selama kurang lebih satu tahun banyak perubahan drastis yang dirasakan Dodi meski dalam waktu yang singkat. Waktu masa sebelum Dodi menjabat sebagai Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Indonesia menduduki peringkat kompetitif dan perizinan negara seluruh dunia di posisi 129 dari 183 negara. Dengan koordinasi dan ker-

ja sama berbagai pihak, seperti Bank Dunia, lembaga-lembaga yang aktif dalam perizinan negara, *ranking* Indonesia melesat naik 7 tingkat menjadi posisi 122 di era Dodi. "Semuanya dilakukan bersama-sama, saling bersinergi meski saya hanya memimpin selama satu tahun kurang satu minggu," paparnya.

Kembali ke Ditjen PUM

Selama menjadi Direktur Pengembangan Ekonomi Daerah, Dodi mengaku sering kali dipanggil oleh Menteri Dalam Negeri selanjutnya, Gamawan Fauzi. Karena dianggap kurang menjalin komunikasi dan dan dianggap ada sebuah 'hambatan' bagi menteri, Dodi akhirnya dikembalikan ke tempat sebelumnya, Ditjen PUMDA. Kali ini, bukan sebagai Kabid ia kembali, tetapi sebagai Direktur FKDH. Tentu saja semua orang yang mengenalnya dulu begitu kaget, Dodi karirnya sangat melejit setelah satu tahun keluar. "Orang tadinya bingung juga, tapi karena saya dianggap Menteri telah melakukan banyak hal di tempat se-

“ Dengan koordinasi dan kerja sama berbagai pihak, seperti Bank Dunia, lembaga-lembaga yang aktif dalam perizinan negara, ranking Indonesia melesat naik 7 tingkat menjadi posisi 122 di bidang perizinan negara.

belumnya," paparnya.

Kembali ke tempat semula, selama 4 tahun lamanya banyak gebrakan yang terus dilakukan oleh Dodi. Pria yang masih memunyai darah ningrat keturunan Keraton Yogyakarta itu berani bertindak tegas para Kepala Daerah yang melanggar hukum. Di zaman kepemimpinannya, ada sekira ratusan Kepala Daerah yang diproses hukum.

"Yang membuat saya agak bangga selain itu, saya berhasil membuat peraturan tegas tentang proses pembuatan SK. Kalau sebelumnya pembuatan SK tidak ada peraturan jangka waktu lama. Di masa saya pembuatan SK Bupati dan Walikota paling lama 8 hari, dan SK Gubernur paling lama 2 minggu," imbuhnya.

Bergabung di Puspen

Di akhir masa jabatan Gamawan Fauzi, Dodi diminta sebagai Kepala Pusat Penerangan atau Juru Bicara Mendagri karena dianggap menguasai berbagai permasalahan Kemendagri.

Di Puspen Kemendagri, bapak dari **Sarahita R Pratami** itu kembali melakukan perubahan dan gebrakan. Ia membuat program SaPA (Sarana Pengaduan dan Aspirasi), sebuah aplikasi berbasis *online* yang menjadi wadah dari suara pengaduan di seluruh daerah Indonesia. "Ada UU keterbukaan informasi publik, maka kita keluarkan Permendagri terkait itu. Kita buat aplikasi yang namanya SaPA. Itulah mengapa ada pembauran SaPA di pemerintahan daerah. Seperti banyaknya anggaran yang masuk ke daerah. Mendagri memerintahkan sampai unit pemerintahan terendah. Nah, apabila ada Pemda melenceng dari kewenangannya bisa diadukan melalui SaPA," jelas Dodi.

Karena kecintaan terhadap pekerjaan yang selalu diamanatkan itu, Tjahjo menginginkan agar Dodi bisa segera menjadi Eselon I. "Pak Menteri memberikan SK menjadi Deputy di BNPP dan Plh Sekretaris BNPP. Tapi karena saya bilang ilmu saya tidak cocok di situ, maka akhirnya saya kembali ke BPP Kemendagri menjadi Plt. Kepala BPP," paparnya.

Gebrakan untuk BPP

Kembali ke BPP, lembaga yang cukup membesarkan namanya itu, Dodi melihat betul bagaimana perbedaannya saat dia masih di BPP dan sudah tidak lagi. "Satu hal yang kontradiksi yang saya alami langsung selama di BPP. Dulu BPP sering sekali menyampaikan rekomendasi ke Menteri secara aktif. Membuat telaah dan menjadi UU. Sekarang hampir-hampir tidak ada. Jarang sekali persoalan yang dihadapi Kemendagri disuplai ke BPP dalam bentuk rancangan atau rekomendasi. Kayak misalnya UU Pemda itu kan luas sekali, tetapi dari BPP ini tidak pernah menyumbangkan ide atau telaah kajiannya. PP itu akhirnya *mandeg*, dan hanya keluar PP OPD saja, itu pun yang buat dari Ditjen Otda bukan dari BPP," tandasnya.

Oleh karena itu, untuk memberekan segala persoalan, Dodi bahkan telah mengklasifikasikan berbagai permasalahan. Yakni seperti masalah peran Jabatan Fungsional dan Struktural yang masih belum seimbang dan belum berkapasitas, satu-an harga pengeluaran, dll.

"Saya akan menyelesaikan semuanya secara bertahap, dan saya yakin dengan semangat kebersamaan dan menghilangkan ego sektoral dari masing-masing diri, hal itu bisa tercapai. Intinya hidup itu harus berubah, kalau tidak berubah Anda akan mati digilas perubahan," tegas Dodi. (IFR)

Karir Dodi di BPP Kemendagri bukanlah hal yang baru, sejak tamat kuliah dan memutuskan bergabung di sebuah lembaga pemerintah, Dodi justru pertama kali mencicipi bekerja di BPP hampir 12 tahun lamanya. Sejak kuliah, dia dikenal aktif melakukan penelitian dan riset, tidak heran banyak orang yang mengajaknya untuk bergabung di lembaga penelitian milik Kementerian Dalam Negeri itu.

"Sejak menjadi mahasiswa di Fisipol (Fakultas Ilmu Sosial dan Politik) UGM kami selalu bekerja sama dengan Kemendagri untuk melakukan penelitian. Selesai kuliah saya menjadi Asisten Dosen, lalu Dekan saya meminta saya untuk dipindahkan ke Jakarta dan bergabung di Badan Lit-

bang, sampai selama 12 tahun karir saya terakhir menjadi Kabid (Eselon III) di BPP ini," ungkap Dodi mengawali pembicaraan.

Mencicipi karir di lembaga penelitian pemerintah selama 12 tahun tentu mengajarkan banyak hal dan pengalaman sepanjang hidupnya, selama bekerja di lembaga yang kini telah berganti menjadi BPP itu, suami dari Hj Tita Kadarsari itu banyak melakukan gebrakan, meski statusnya masih seorang pejabat Eselon III. "Dulu saya sering menyampaikan rekomendasi ke Menteri melalui pimpinan secara aktif," terangnya.

Salah satunya adalah masalah RUU Keistimewaan DIY dan Aceh. Sebagai orang yang lahir dan besar di Yogyakarta, tentu Dodi paham betul ten-



KALEIDOSKOP 2016



Australian Aid
Knowledge Sector Initiative
WORKSHOP
TEKNIK MENULIS OPINI
& FEATURE ILMIAH POPULER
Kerjasama BPP Kementerian Dalam Negeri & Knowledge Sector Initiative (KSI)
Dipusat, 28/10/2016

RAPAT KOORDINASI PENG
DI LINGKUNGAN BPP KEMEN
KEMENTERIAN/LEMBAGA

BADAN PENELITIAN DAN PEMBINAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Alice Norin (29), Artis

Meski Hamil Tetap Babymoon ke Eropa

Memasuki usia kehamilan 7 bulan, dirasakan betul terpancar dalam raut bahagia artis cantik Alice Norin. Saat ditemui dalam sebuah acara Yoga Prenatal, artis blasteran Norwegia - Manado ini ternyata baru pulang melakukan perjalanan *babymoon*-nya keliling Eropa lho. Wah apa *nggak* takut kecapek-an ya? Lantas seperti apa sih keseruan Alice melakukan perjalanan ke Eropa? Yuk simak ceritanya di bawah ini.

Terbang ke Inggris dan Belanda

Memiliki hobi yang memang suka jalan-jalan, membuat isteri dari Alvin Yudhapatria tidak ingin kehilangan *moment* untuk melakukan traveling bersama suami. Bagi Alice sendiri, *babymoon* justru *moment* yang pas ketimbang saat sudah melahirkan nanti.

"Kemarin ceritanya ke Eropa, kata orang-orang daripada nanti aku sudah keburu lelah hamilnya lewat 8 bulan, apalagi besok kalau lahiran susah punya waktu jalan-jalan. Karena pas trisemester pertama juga suami *nggak* bolehin naik pesawat dulu. Jadi akhirnya trimester kedua inilah aku sama suami sekalian trip jauh ke Eropa, kurang lebih semingguan kami ke Inggris sama Belanda," bebernya.

Perempuan penyuka Hitam dan Merah ini juga tidak menafikan, perjalanan dengan kondisi berbadan dua memang membuatnya capek dan kelelahan, tidak seperti saat sebelum hamil yang dengan semangat menyalurkan hobi traveling-nya itu. "Capek sih pasti ya, tapi untungnya sih *nggak* ribet. Tidak ada keluhan apa-apa karena perasaan ku *happy* banget saat jalan-jalan. Mungkin *baby*-nya juga suka jalan-jalan jadi dia *nggak* mengeluh apa-apa di dalam perut, hehehe," selorohnya.

Selalu bawa vitamin

Kondisi yang demikianlah yang justru membuat lega suami Alice dan tidak khawatir akan kondisi kehamilannya saat *babymoon*. "Ya suami sih intinya kalau capek jangan dipaksain," tambahna.

Meski begitu, mantan isteri dari Riri Mestica atau yang biasa dikenal DJ Riri itu juga tidak mau takabur akan kondisi kesehatannya. Ia selalu memastikan untuk membawa vitamin dan kalsium untuk memperkuat kandungan saat di Eropa kemarin. "*Nggak* mau sombong kuat juga, aku juga bawa vitamin, kalsium, dan dikasih penguat kandungan kalau hari ini lelah aku minum. Tapi itu semua *nggak* diminum setiap hari juga, hanya waktu tertentu saja," jelasnya.

Rajin Yoga dan Pilates

Tak hanya membawa vitamin saat berpergian, rupanya kondisi tubuh yang prima juga senantiasa dijaga oleh perempuan kelahiran Norwegia 21 Juni 1987 itu sebelum melakukan perjalanan *babymoon*-nya ke Eropa. Alice rutin melakukan Yoga Prenatal (Yoga Hamil) dan Pilates agar siap apapun kondisinya nanti. "Memasuki trimester ketiga ini aku lebih sering pipis. Perubahan tubuh terasa banget, perut semakin buncit. Apa-apa serba susah, makanya aku sekarang harus serba dijaga. Salah satunya dengan olahraga dengan Yoga dan Pilates," terangnya.

Diakui Alice, setelah beberapa kali melakukan Yoga dan Pilates dirasakan betul perbedaannya. Perutnya yang begah, dan kondisinya yang mudah lelah juga sudah mulai berkurang dengan melakukan Yoga dan Pilates, apalagi saat melakukan perjalanan *babymoon* rasa capek mulai berkurang. "Sering sekali aku ikut yoga, pokoknya olahraga aku semenjak hami tuh *treadmill*, pilates sama yoga, beda sebelum hamil *gym*. Sekarang sudah *nggak* bisa *gym*," celotehnya.

Yang berkesan dari Eropa

Kondisi tubuh yang prima bagi Alice, yang membuat ia dan suami pada akhirnya dapat melakukan *babymoon* secara sempurna tanpa keluhan. Mereka dapat merasakan keindahan negeri Eropa dengan destinasi tempat yang romantis dan berbeda. Bagi Alice yang berkesan selama di Inggris kemarin itu, ia bisa merasakan suasa-

na baru dari rutinitasnya sehari-hari.

"Aku senang saja melihat hal-hal baru di sana, senang melakukan banyak hal yang *nggak* bisa dilakukan di sini kayak misalnya jalan kaki sambil menikmati udara Eropa yang sejuk dan ramah sama pejalan kaki. Kalau di sini kan sulit ya," ceritanya.

Saat *babymoon* ngidam pizza

Selain menikmati pemandangan Eropa yang begitu menawan, menurut Alice ada cerita lucu sendiri yang dia alami selama di Eropa. Selama di Eropa Alice mengaku tidak berhenti untuk konsumsi Pizza, bahkan ia rela bolak-balik, naik turun hotel untuk membeli kembali pizzanya. "Di Belanda itu aku *nggak* tahu kenapa ngidam sekali sama pizza, aku sampai naik turun hotel untuk beli lagi Pizza," selorohnya.

Untungnya artis yang bercita-cita menjadi Sutradara terkenal itu tidak sampai 'over' mengonsumsi pizza kesukaannya. "*Nggak* sampai seloyang sih, paling beberapa potong pizza gitu," tambahnya.

Tip *Babymoon* ala Alice

Bagaimana? Melakukan *babymoon* ternyata seru juga ya, asal segala kondisi kehamilan tetap dijaga. Nah berikut ini, Alice juga memberikan beberapa tip bagaimana menciptakan *babymoon* yang aman dan nyaman.

"Yang pertama sih, kalau *babymoon* jangan berpakaian yang ketat karena sakit perutnya pokonya cari celana dan baju yang nyaman, sepatu juga nyaman. Lalu yang kedua, jangan sampai lupa minum air putih yang banyak soalnya kan kalau udah asik jalan-jalan kadang suka sampai lupa minum dan telat makan. Lalu yang ketiga, kalau misalnya capek jangan dipaksain jalan, istirahat sebentar sambil duduk-duduk. Intinya sih harus pintar-pintar tahu kondisi badan sendiri," sarannya.

Wah gimana tip dari Alice tadi? Semoga bermanfaat ya.



“Umumnya saat berbadan dua, kondisi tubuh tidak seprima sebelum hamil. Mudah lelah dan sulit bergerak sudah pasti. Tapi ada beberapa BuMil (Ibu Hamil) yang masih kuat untuk melakukan perjalanan panjang atau yang biasa dikenal dengan istilah kekinian dengan *babymoon*.

Bahaya Tubuh Terlalu Kurus

Selama ini kita sering mendengar bahaya tubuh terlalu gemuk dapat menyebabkan berbagai jenis penyakit seperti diabetes, obesitas, serangan jantung, dan lain-lain. Oleh sebab itu, bagi sebagian besar perempuan memiliki tubuh kurus atau langsing adalah dambaan mereka. Dengan tubuh langsing, sebagian besar perempuan akan merasa lebih percaya diri, merasa lebih memesona dan anggun. Tapi bagaimana jika tubuh Anda terlalu kurus? Tahukah Anda di balik tubuh yang terlalu kurus rupanya tersimpan beberapa bahaya yang tidak pernah disadari. Bahkan tubuh kurus sering kali menjadi pemicu beberapa penyakit. Benarkah demikian? Simak penjelasan dr. Cindiawaty Josito Pudjiadi, MARS, MS, SpGK, berikut ini:

Indeks Massa Tubuh (IMT)

Selama ini, pembahasan mengenai tubuh (terlalu) kurus jarang sekali dibicarakan. Masyarakat terlalu fokus pada informasi mengenai kegemukan atau obesitas. Padahal tubuh yang terlalu kurus atau berat badan yang berada di bawah normal juga dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan. Dokter Cindi mengatakan, untuk mengukur tubuh seseorang tergolong kurus atau gemuk tidak bisa hanya dilihat secara kasat mata. Tetapi untuk mengetahui seseorang berat badannya masih dalam batas normal atau lebih, dapat diketahui dengan menghitung Indeks Massa Tubuh (IMT). Metode ini digunakan untuk menentukan berat badan yang sehat (ideal) berdasarkan berat dan tinggi badan. Berikut cara perhitungannya:

Contoh:

Misal berat badan Anda 45 kg dan tinggi badan 160 cm, maka:
 $IMT = 45 / (1,60 \times 1,60) = 17,57$ (termasuk berat badan kurang/kurus)

Klasifikasi Nilai IMT:

- < 18.5 kg/m² masuk kategori berat badan kurang
- 18.5-22.9 masuk kategori normal (ideal)
- ≥ 23 masuk kategori *overweight*
- 23-24.9 masuk kategori kelebihan berat badan/ *overweight* yang berisiko
- 25-29.9 masuk kategori obesitas I
- ≥ 30 masuk kategori obesitas II

Lebih Berisiko

Menurut dr. Cindi ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan seorang wanita memiliki bobot tubuh kurus. Misalnya asupan yang kurang ditambah aktivitas yang tinggi. Atau hal yang dapat menyebabkan seseorang menjadi kurus adalah bila ia dalam kondisi sakit. Seperti infeksi paru-paru, hipertiroid, atau masalah kesehatan lainnya. Perlu diketahui, tak jarang wanita ingin memiliki tubuh kurus, bahkan sampai berada di bawah kategori normal. Hal ini tentu saja sudah masuk kategori berat badan kurang (kurang gizi). Dalam kondisi ini risiko terkena berbagai penyakit pun akan semakin meningkat. Bila sakit, maka penyembuhannya akan lebih lama dan sulit, dibandingkan dengan orang dengan berat badan yang masuk kategori normal.

Sarang Penyakit

Orang yang berat badannya kurang dapat berisiko lebih mudah terkena berbagai penyakit. Cindi menjelaskan segala macam penyakit infeksi dapat mudah terkena pada orang yang masuk dalam kategori berat badan kurang. Sering didapati pada orang yang berat badan kurang, kadar albumin/protein dalam tubuh di bawah normal, hal ini tentu saja dapat meningkatkan risiko terkena berbagai penyakit. Atau bila dalam kondisi sakit, maka biasanya tubuh bengkak karena kurang albumin tersebut. Kadang bisa terjadi diare, atau penyembuhannya menjadi melambat. Selain itu, dapat saja terjadi kurang darah, dan masih banyak risiko kekurangan zat gizi yang mungkin diderita pada orang yang termasuk kategori berat badan kurang.

ANGELINA JOLIE

Istri aktor Brad Pitt ini memang memiliki tubuh yang ramping. Namun dulu ia masih terlihat seksi dengan lekuk tubuhnya, tidak seperti sekarang Jolie terlihat begitu kurus. Bahkan dikabarkan dengan tinggi 169 sentimeter, Ibu enam anak ini hanya memiliki bobot 37 kilogram saja. Wanita 40 tahun ini pun terlihat lebih tua dengan tubuh kurusnya.

VICTORIA BECKHAM

Sejak dulu, istri pesepak bola David Beckham ini memang memiliki tubuh kurus. Bahkan setelah melahirkan empat anak, mantan personel Spice Girls ini memiliki tubuh yang tetap kurus. Vic memang dikenal senang berolahraga, tetapi tubuh yang terlalu kurus juga membuat pipinya cekung. Itu barangkali yang membuat wajah wanita 41 tahun ini menjadi terlihat lebih tua.

SARAH JESICA PARKER

Pemeran Carrie Bradshaw dalam serial *Sex and the City* ini memang memiliki wajah yang panjang. Namun, tubuhnya yang kurus menjadikan pipinya terlalu tirus. Kulitnya pun terlihat tidak segar karena tulang di tubuhnya terlalu menonjol.

NICOLE RICHIE

Sempat bertubuh berisi beberapa waktu lalu, Nicole Richie tiba-tiba berubah menjadi sangat kurus. Bahkan, ia sempat tertangkap kamera memakai bikini di pantai dengan tubuh yang mirip dengan tengkorak hidup. Ia pun diduga mengalami anoreksia.

KATE MOSS

Model yang sudah menekuni karir sejak usia 14 tahun dikenal dengan tubuh kurusnya. Hingga usianya yang mencapai 42 tahun, model ini pun masih bertubuh kurus. Ia mencintai tubuh kurusnya, sampai kutipannya tentang tubuh kurus begitu dikenal, "Tidak ada yang terasa begitu baik seperti orang yang bertubuh kurus rasakan."

5 ARTIS HOLLYWOOD YANG DIANGGAP TERLALU KURUS

Konsultan:
 dr. Cindiawaty Josito Pudjiadi, MARS, MS, SpGK
 RS. Medistra - Jakarta

BABAK BARU KISAH ARINI & MEI ROSE

Setahun kemudian MD Picture mencoba mengulang sukses *Surga yang Tak Dirindukan* lewat sekuelnya.

Pada 2015, para pecinta film drama romantis, terpesona, terharu bahkan tak bisa menahan air mata menyaksikan *Surga yang Tak Dirindukan*. Kisah seorang wanita yang dipoligami. Film ini menjadi salah satu film tersukses MD Picture dengan keberhasilannya menggaet 1,5 juta penonton dan mampu bertahan selama 55 hari.

Setahun kemudian, MD Picture merilis sekuelnya, SYTD 2. Larisnya film tersebut membuat Manoj Punjabi sang produser berinisiatif merilis kembali film tersebut. "Saya sudah memprediksi film tersebut akan laris," ucap produser, seperti sudah di prediksi. Alasan lainnya adalah, banyak para penggemar mempertanyakan kelanjutan bagaimana nasib Arini (Laudya Cynthia Bella) yang dipoligami oleh Pras (Fedi Nuril) karena rasa kasihannya kepada seorang wanita yang melakukan percobaan bunuh diri Mei Rose (Raline Shah).

Pras kemudian berjanji akan menikahi Mei Rose, dan akhirnya terjadi pernikahan tanpa sepengetahuan Arini yang sudah memiliki anak. Dengan perasaan berat, Pras merasa apa yang ia lakukan telah mengingkari janjinya kepada Arini tentang surga yang akan ia bangun bersama. Kehadiran Mei Rose menciptakan sebuah kisah cinta yang menyentuh, terutama ketika Arini belum mengetahui suaminya poligami, serta mendapati seorang ayahnya yang melakukan poligami dan diketahuinya tepat pada hari kematiannya.

Dalam sekuel ini, Mei Rose kembali hadir dalam kehidupan rumah tangga Arini. Ia datang kembali meminta anak yang dilahirkannya untuk kemudian ia besarkan. Berlatar beberapa tahun setelah kehidupan di Yogyakarta, Mei Rose kini tinggal di Budapest, Hongaria. Hingga pada suatu ketika ia harus bertemu dengan Arini dan Pras di sana. Kedua perempuan tersebut semakin bingung, karena ha-

rus berurusan dengan masa lalunya.

Di sisi lain, Arini berkeinginan mengajak kembali Mei Rose dan harus ikhlas dipoligami kembali oleh Pras, keinginan tersebut semakin kuat, kala desakan dari sang Anak (Nadya) untuk menjadikan Mei Rose sebagai ibunya, atas alasan Akbar (Anak Mei Rose, yang pernah diurus oleh Arini) ingin tetap menjadi adiknya. Namun, Pertemuan dengan Arini membuat Mei Rose menjadi ragu dengan pilihan hidupnya selama ini. Apalagi ketika sosok Pras muncul dihadapannya, Mei Rose tidak bisa mengingkari bahwa cintanya pada laki-laki bijak itu masih ada dalam hatinya. Mei Rose bingung, maju dengan kehidupannya yang baru, yang dia sendiri tidak tahu akan jadi seperti apa, atukah mundur pada kehidupannya yang lama, yang ingin dia tinggalkan selama ini, tapi menjanjikan hal yang lebih pasti bagi masa depannya.

Skuat-kuatnya perempuan, perasaan cemburu akhirnya muncul juga, rasa khawatir terhadap Pras yang tidak akan adil terus menggelayuti pikirannya. Apalagi ketika ia dalam keadaan sakit, sikap Arini dan Pras semakin menunjukkan kemesraannya.

Menurut para pemainnya, cerita SYTD 2, ini akan lebih seru ketimbang cerita Arini yang dipoligami secara diam-diam oleh Pras pada film yang pertama. Penonton pecinta drama romantis akan terisak-isak bersedih melihat kisah asmara segi tiga antara Pras, Mei Rose, dan Arini. Atau adegan-adegan tidak terduga yang dimunculkan dalam film ini. Kemudian, yang membuat film ini kian menarik adalah, kemunculan bintang kenamaan baru seperti Reza Rahadian, yang menjadi warna film dan membuat film susah ditebak jalan ceritanya.

Di luar kemasan religi romantis itu, film yang direncanakan rilis akhir Desember ini sesungguhnya berkisah tentang makna cinta yang berandai-andai. Namun, film tersebut juga menonjolkan mak-



na keluarga dan kesabaran. Film ini merupakan kisah kehidupan keluarga yang terus berupaya untuk menjaga keutuhan keluarga, serta berusaha mencari jalan keluar dari setiap permasalahan, dengan cara yang adil dan tidak melukai salah satu perasaan keluarga. Ketegaran hati seorang perempuan ketika kehidupan tidak pernah seperti yang diharapkan, mengajarkan sebuah makna kepasrahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa.

Film juga mengajarkan upaya seorang suami dalam menjaga perasaan dua orang wanita yang pernah hadir dalam kehidupannya ketika dipertemukan dalam satu keluarga. Selebihnya film juga menuntun tentang pendidikan dan sikap terhadap seorang anak, bagaimana cara mengabdikan keinginan seorang anak, meski hal yang sulit bagi seorang ibu.

Latar Budapest dan beberapa kota di Hongaria, kian digambarkan secara indah dan romantis. Hanung Bramantyo dan Kunz Agus sebagai sutradara bersama timnya juga sangat bagus dalam pemilihan tempat-tempat yang cocok dengan karakter sebuah cerita dalam film tersebut. Dari ketika di Yogyakarta hingga di Hongaria.

SYTD memang selalu diawali dengan cerita yang bahagia, kemudian

menyedihkan, namun film ini juga terkadang menjadi seru dengan kehadiran beberapa komedian seperti Kemal Palevi. Dan itulah yang sepertinya akan dipertahankan pada sekuelnya SYTD 2. Dalam trailer yang sudah dirilis, film SYTD 2 tidak kalah bagus, dan diluar dugaan kehadiran Reza Rahadian sebagai pemain baru dirasa sangat cocok.



SURGA YANG TAK DIRINDUKAN 2

Sutradara: Hanung Bramantyo, Kunz Agus

Genre: Drama, Romance

Pemain: Fedi Nuril

Reza Rahadian

Raline Shah

Laudya Cynthia Bella

“Ketegaran hati seorang perempuan ketika kehidupan tidak pernah seperti yang diharapkan, mengajarkan sebuah makna kepasrahan kepada Tuhan yang Maha Kuasa

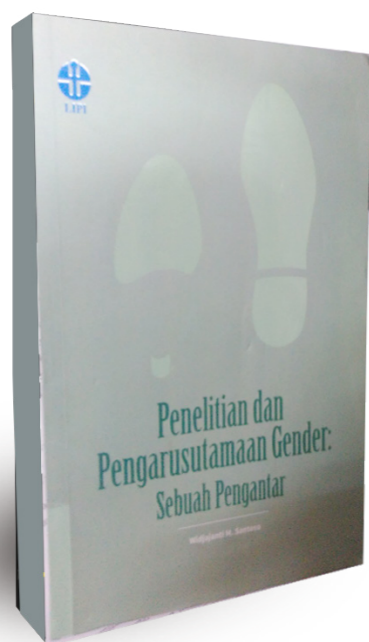
GENDER DALAM PERSPEKTIF PENELITIAN

Gender dan lingkungan adalah dua subjek yang memiliki pendekatan serupa, yaitu ada kepedulian untuk mengintegrasikannya dalam kegiatan dan kebijakan. Pendekatan ini disebut sebagai pengarusutamaan (mainstream)

Adanya pemikiran yang tidakimbang bahwa laki-laki dijadikan sebagai yang utama membuat posisi perempuan termarginalkan. Pada ilmu pengetahuan secara umum, gender perlu mendapat perhatian karena dalam kebijakan tentang ilmu pengetahuan pun gender belum dimasukkan sebagai sebuah kebutuhan. Pada satu sisi, ini adalah sebuah konteks harmonisasi hukum. Namun, di sisi lain ini merupakan strategi untuk menciptakan sebuah masyarakat yang berkeadilan gender.

Pengarusutamaan gender (PUG) disinyalir merupakan strategi untuk mengembangkan pengetahuan yang setara antara laki-laki dan perempuan. Strategi ini kemudian diimplementasikan melalui mekanisme perencanaan dan penganggaran yang disebut sebagai anggaran responsif gender (ARG). Oleh karena itu, antara PUG dan ARG menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan, sebab keduanya akan berjalan beriringan demi terciptanya kesetaraan gender.

Dalam sebuah penelitian tentang gender yang dituangkan dalam buku ini, kata gender dan perspektif per-



JUDUL: Penelitian dan Pengarusutamaan Gender: Sebuah Pengantar

PENULIS: Agustina Situmorang, dkk

TEBAL: 165 Halaman

PENERBIT: LIPI Press

TERBIT: November 2016

ISBN: 978-979-799-854-7

empuan secara bergantian diucapkan, meskipun kata gender merupakan konsep dominan. Hal tersebut dikarenakan dalam konteks yang membahas perempuan dan pembangunan telah terjadi berbagai perubahan dan inovasi yang dijelaskan berkaitan dengan kebijakan yang tertuang dalam Bab 2. Menurut penulis, gender sendiri bukan hanya menjadi konsep, melainkan juga alat untuk menepong situasi dan

menjadi alat analisis.

Buku ini diterbitkan sebagai tujuan menyinergikan kebutuhan strategis dan praktis dalam implementasi PUG dan ARG. Melalui perspektif ini masalah gender dapat diungkapkan, terutama dalam situasi yang memperlihatkan adanya kesenjangan, marginalisasi, dan lainnya. Bila dibandingkan dengan buku gender lainnya, ada buku yang hanya menjelaskan tentang PUG, sementara buku lainnya hanya menjelaskan ARG.

Seperti yang diterbitkan oleh KPP-PA (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) yang menerbitkan buku "Modul Pelatihan Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender" (2011), topiknya sangat terfokus, individu dan lembaga akan sulit menggunakan bahan tersebut tanpa adanya pelatihan atau narasumber. Ada juga buku yang membahas tentang pendekatan gender/perempuan karya Rachmat Hidayat (2004) yang menjelaskan tentang dasar filsafat dan pemikiran teori perempuan/gender. Dalam bukunya ia menekankan adanya keengganan dan resistansi terhadap pendekatan gender/perempuan.

Membicarakan gender dalam penelitian tidak terlepas dari posisi gender di dalam kelembagaannya. Dengan memasukkan gender dalam proses penelitian, kebijakan dapat ditunjukkan secara langsung menjadi kebijakan yang spesifik gender dan bahkan yang redistributif gender. Namun sayangnya, status gender dalam penelitian di Indonesia masih terbatas. Hal ini dapat dilihat dari kecenderungan bahwa yang biasa

melakukan penelitian gender adalah organisasi atau lembaga yang secara spesifik mengangkat gender, misalnya Kajian Gender atau Pusat Studi Wanita. Sedangkan lembaga lain? Masih banyak informasi dan data yang ada masih belum memasukkan elemen gender, karena data belum terpilah berdasarkan gender. Akibatnya, penelitian tidak dapat memberikan gambaran tentang perempuan.

Pada data dan informasi yang spesifik gender memiliki peran penting dalam memahami mas-

alah untuk menghindari bias gender. Dengan demikian, dibutuhkan sosialisasi dan diseminasi tentang PUG dan ARG, baik sebagai mekanisme maupun alat analisis, untuk mendapatkan latar belakang mengapa kebijakan ini penting secara teori dan metodologi maupun sebagai kebijakan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam buku ini, penulis yang memang berlatar belakang kajian gender di LIPI menyajikan secara betul bagaimana relasi PUG dan ARG dengan baik, mengungkap

data dan fakta-fakta penelitian, tentang bagaimana gender tidak hanya merupakan penuntutan hak antara perempuan dan laki-laki, tapi juga eksistensi laki-laki dalam peran gender. Namun sayangnya penulis belum mampu mengubah hasil penelitian ini dalam bahasa buku yang enak dibaca dan perlu. Isi dari buku ini lebih kepada artikel jurnal, dengan bahasa penelitian yang masih kental. Namun secara keseluruhan, buku gender ini memberikan perspektif baru bagi dunia penelitian. (IFR)



Segenap Tim Redaksi Media BPP
Mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

Bpk. Drs. Andreas Suherman

Atas Profesionalisme, integritas, *teamwork*, serta dedikasi selama bekerja di BPP Kemendagri

Segenap Tim Redaksi Media BPP
Mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

Ibu. Yusnidar Herwati

Atas Profesionalisme, integritas, *teamwork*, serta dedikasi selama bekerja di BPP Kemendagri



*Purna Jugas
Pegawai BPP Kemendagri 2016*



DON'T JUDGE PEOPLE BY THEIR LOOKS

BANG PEPE **Konsultasi Kesehatan**

KENAPA ISTRI SAYA BELUM HAMIL JUGA, DOK?

KALIAN SUDAH BERAPA LAMA MENIKAH

TUJUH TAHUN, DOK....

SERING DOK.. KADANG KAMI BBMAn, SMSan, WHATSAPPan, KADANG LINEan JUGA, DOK...

KALIAN SERING BERHUBUNGAN?

OH... YASUD AHLAH ANAKNYA DIDOWNLOAD SAJA..

MAKASIH YA DOK...

BEGINI DOK.. KENAPA YA SETIAP KALI SAYA MINUM KOPI, MATA SAYA YANG SEBELAH KANAN TERASA TERTUSUK-TUSUK GITU...?

SELAMAT PAGI... APA KELUHAN BAPAK??

GAK USAH PAKE CATATAN PAK. BEGINI SAJA. KALO LAGI MINUM KOPI COBA SENDOKNYA DISINGKIRKAN DULU YA PAK..!!

OH BEGITU TERIMA KASIH YA DOK...

DOK, BELAKANGAN INI SAYA SUKA PUSING...

TAPI PUSINGNYA SUKA ANDA JUGA TIDAK? KALAU ENGGA, JANGAN TERLALU BERHARAP ENTAR KECEWA..

AVALOKITESVARA

Hari Taqwan Santoso

Hendro Kurniawan memang pelukis muda yang berbakat. Meski namanya belum mencuat tinggi di dunia seni rupa tapi sapuan-sapuan kuasnya di atas kanvas mampu memberi kesan “hidup” pada setiap lukisan bergaya realis yang diakrakan. Kesan “hidup” itu benar-benar luar biasa sehingga kupastikan siapa pun yang memandangi lukisannya akan berdecak kagum sampai berani bersumpah tujuh kali bahwa lukisan itu adalah objek nyata, bukan kombinasi warna-warna yang terpenjara dalam selembar kanvas.

Hendro gemar melukis objek hidup, dia kadang menyulap kanvas kosong menjadi lukisan bergambar binatang. Kadang juga dilukisnya sosok-sosok yang sedang berada dalam situasi atau pekerjaan tertentu, seperti orang memancing, orang pergi ke sawah dan sebagainya. Namun dari sekian banyak lukisan yang dihasilkan, Hendro sepertinya punya ketertarikan khusus terhadap lukisan yang menampilkan sosok perempuan. Lukisan-lukisannya paling sering menampilkan sosok perempuan dengan judul yang bersangkutan, seperti misalnya Gadis Penjual Jamu, Nenek di Perempatan, dan Avalokitesvara.

Menurutku, yang adalah salah seorang penggemar sekaligus teman dekatnya, lukisan Hendro yang paling bagus adalah Avalokitesvara. Lukisan yang satu itu seolah mempunyai daya tarik magis tersendiri. Sebuah daya tarik di luar efek “hidup” yang kubicarakan tadi. Avalokitesvara di atas kanvas Hendro ditampilkan sebagai sosok perempuan berwajah teduh dalam balutan sutera putih bersih. Selendang cahaya melengkung tunduk di atas kepala yang memancarkan

warna-warna pelangi.

Perempuan itu sedang tersenyum manis, berdiri di atas sekuntum teratai raksasa. Satu-dua kelopak teratai digambarkan luruh, tersebar dan menumbuhkan teratai lain yang lebih kecil di tengah lautan api. Avalokitesvara dalam lukisan Hendro dikelilingi lidah-lidah api yang sedang berubah menjadi taman teratai. Agak jauh darinya, tangan-tangan yang tubuh pemilikinya tenggelam dalam kobaran api melambai ke udara, meminta pertolongan.



Ketika menatap lukisan yang dipajang di salah satu sisi dinding ruang utama galeri Hendro (yang baru didirikan seminggu lalu) itu, terbesit sebuah pikiran dalam benakku. Jika Tuhan harus bersosok, memunyai emosi dan peduli pada manusia, harusnya Dia bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi hari-hari ini mulai dari kerusakan moral hingga bencana alam hanya dengan sekali melambai saja. Menugaskan orang-orang sok tahu yang bertindak kasar dan kejam, belum lagi tidak manusiawi, sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Tuhan yang punya kekuatan untuk mengendalikan apapun, jika Dia benar-benar peduli pada manusia, seharusnya bertindak seperti Avalokitesvara; “mengubah neraka menjadi taman teratai berbau harum”.

Menghayati hal-hal seperti ini membuatku ingin berlama-lama di depan lukisan Hendro. Bahkan, aku ingin masuk ke dalam lukisan yang kuamati lekat-lekat itu. Ingin sekali rasanya bersanding dengan Avalokitesvara-ku yang anggun. Alangkah beruntungnya aku jika itu bukan sekadar imajinasi belaka.

Sejujurnya, aku datang ke galeri ini dengan membawa segudang kegundahan. Hatiku butuh ditenangkan. Aku baru menonton berita di televisi. Banjir di Garut sudah menelan korban jiwa sebanyak puluhan orang, belasan lainnya masih dinyatakan hilang. Sebagai seorang penganut salah satu agama di Indonesia ini, aku harus percaya bahwa di balik banjir itu, tangan-tangan Tuhan sedang bekerja. Tuhan-lah penyebab banjir itu, jika tidak begitu maka Tuhan yang kupercayai tidak Maha Kuasa.

Seandainya saja aku punya kekuatan ilahiah sampai bisa menghentikan banjir atau bahkan mencegahnya, pasti hal itu sudah kulakukan. Namun fakta bahwa aku hanya manusia biasa yang lemah membuatku sebal. Sangat sebal. Aku bahkan tidak dapat menyumbangkan apapun pada para korban banjir di Garut kecuali keprihatinan dari hati yang trenyuh belaka. Di sisi lain, Tuhan Maha Kuasa, kenapa Dia tidak menyulap air bah itu menghilang seketika, mengalihkan ke tempat kosong, mencegah supaya banjir itu tidak terjadi, atau pandai-pandainya Dia lah dalam mengatur alam, asal tidak sampai jatuh korban. Nyatanya, hal itu tidak dilakukan.

Sebelum datang ke galeri ini juga, aku sempat mencari-cari informasi seputar banjir di Garut. Aku menemukan tulisan seorang relawan korban banjir yang mendapat testimoni dari seorang warga berusia lanjut di lokasi kejadian. Banjir itu seharusnya tidak terjadi karena lokasi berada di tempat yang lebih tinggi dibanding kawasan-kawasan tempat air berpotensi meluap. Dengan kata lain, banjir di lokasi tersebut tidak masuk akal. Lalu si kakek, dalam tulisan si relawan, mengatakan bahwa banjir itu adalah wujud kemarahan Tuhan karena lokasi itu menjadi tempat prostitusi yang marak. Bahkan, banyak pramuria yang kelepasan sampai hamil, menggugurkan bayi lalu membuangnya di sungai tak jauh dari lokasi. “Karena itulah, Tuhan

“Seandainya saja aku punya kekuatan ilahiah sampai bisa menghentikan banjir atau bahkan mencegahnya, pasti hal itu sudah kulakukan. Namun fakta bahwa aku hanya manusia biasa yang lemah membuatku sebal. Sangat sebal.”

marah lalu mengirim banjir kemari,” simpul si kakek dalam tulisan sang relawan.

Bagi si kakek dan relawan, tampaknya kemurkaan Tuhan atas tindakan asusila beberapa orang adalah penjelasan yang memuaskan bagi bencana banjir di Garut. Ketika aku hendak ikut mengambil keputusan yang sama tetapi dengan berpikir sedikit lebih jernih, aku menemui kesulitan parah. Jika Tuhan yang pemarah itu memang membenci prostitusi, kenapa dia mengirim banjir padahal Dia punya kekuasaan untuk mencegah tindakan asusila tersebut. Jika memang Tuhan Maha Pengasih dan bukan Maha Pemarah, kenapa Dia tidak memberi petunjuk langsung dari-Nya ke hati calon pelaku prostitusi, sehingga calon pelaku tidak sampai melakukan tindakan asusilanya? Jika Tuhan mengubah hati para pramuria itu dari awal, mereka tidak perlu menjadi pramuria, menggugurkan bayi, dan tidak perlu ada banjir.

Jadi, apakah Tuhan marah pada kejadian-kejadian yang dibenci-Nya padahal Dia punya kekuasaan untuk mengubah segalanya dari awal sehingga kejadian yang dibenci itu tidak akan pernah terjadi? Ini sama dengan jika Hendro (yang sudah jelas berbakat melukis itu) menyapukan kuasnya secara asal karena tidak berkehendak untuk membuat lukisan yang bagus lalu marah-marah pada lukisan yang dihasilkan ketika lukisan itu jelek, dengan cara merusaknya. Menurutku ini sebuah kebodohan tingkat tinggi!

Sekarang pikiranku kacau. Aku benar-benar ingin masuk ke dalam lukisan. Kukutuk dunia yang telah menyeretku dalam pemikiran dan kepercayaan yang membingungkan ini sambil memejamkan mata rapat-rapat. Lalu seketika pikiranku kosong. Ketika kubuka mataku, aku tahu jasadku masih mematung dalam galeri Hendro. Tubuhku masih terpaku di depan lukisan Avalokitesvara yang anggun dan bibirnya melempar sesungguh senyum padaku. Anehnya, aku sama sekali tidak merasakan sensasi apa-apa. Kudengar raung sirine mirip ambulans yang bergerak mendekati pelan-pelan, deru mobil-mobil lain di luar, desing mesin jet pada sayap pesawat yang terbang ketinggian langit. Kurasakan semilir angin membelai rambut dan tengkukku. Seluruh panca ideraku tahu dunia masih ada dan berputar sebagaimana mestinya, tapi aku tidak merasakan semuanya bermakna lagi.

Perhatianku hanya tertuju pada Avalokitesvara yang menyebarkan teratai-teratai harumnya ke seluruh lautan api. Tangannya yang lembut mulai bergerak, melambai ke arahku. “Ya, aku tahu kau menginginkanku memasuki duniamu, neraka yang kauubah menjadi taman teratai dengan satu lambaian tangan saja,” kataku.

Aku pun berjalan mendekat, lukisan itu terasa semakin nyata. Kusadari diriku tidak sedang berhadapan dengan lukisan yang punya efek "hidup" lagi sekarang, perempuan anggun di depanku itu sudah benar-benar mewujudkan menjadi menjadi sosok nyata. Tubuhku semakin mendekat padanya tanpa perlu melangkahhkan kaki, aku seperti melayang di udara dan tertarik oleh kekuatan magisnya yang benar-benar "magis".

...
"Cepat, ikat tangannya sebelum dia kabur lagi!" perintah seorang petugas berseragam putih pada dua petugas lain. Dengan nada seperti itu, bisa diduga kuat bahwa jabatan orang yang disuruh lebih rendah daripada yang menyuruh. Tapi apa pentingnya membicarakan jabatan orang-orang itu? Hal yang lebih penting untuk diceritakan tentang mereka adalah keterlibatan mereka dalam sebuah adegan yang berlangsung cepat dan sialnya mengikat sertakanku di dalamnya. Tangan kekar orang-orang asing itu meraih lenganku dengan paksa, mempertemukan kedua pergelangan tanganku di belakang punggung lalu mengikatnya.

"Apa-apaan ini?" radangku sambil meronta. Tentu saja, gerak reflek wajar bagi orang yang tangannya diikat dengan tiba-tiba adalah meronta.

"Bawa dia ke mobil!" perintah petugas berbaju putih itu tadi,

"Lepaskan!" bentakku.
"Avalokitesvara-ku... Avalokitesvara-ku... Aku mau dibawa kemana? Aku mau di sini, bersama Avalokitesvara-ku yang anggun."

Kendati orang-orang itu bertubuh kekar serta bertubuh lebih besar dariku, tapi mereka kewalahan juga. Hormon adrenalinku dapat kukendalikan dengan sangat baik. Aku punya *adrenaline rush* dan itulah yang kugunakan untuk situasi seperti ini. Bahkan satu-satunya petugas yang berbicara dalam adegan ini berhasil kutendang hingga terjengkang. Sebenarnya aku tidak ingin menyakiti siapa pun, tapi siapa suruh mereka mengikat dan menarikkku dengan paksa? Seolah aku hewan yang hendak dijual di pasar.

Seorang lelaki jangkung keluar dari mobil yang sempat disinggung petugas tadi. "Mas Hendro Kurniawan," sapanya lembut. "Di sini tidak ada Avalokitesvara. Dia ada di tempat saya, katanya sedang menunggu kedatangan Mas Hendro. Maafkan kekasaran paras asisten baru saya tadi, mereka sebenarnya mahasiswa magang."

Orang itu melepas ikatanku dengan lembut. Aku masih penasaran dengan kata-katanya barusan. Tatapan mataku berkeliling untuk memastikan kepada siapa ucapan lelaki itu ditujukan. Aku menoleh kanan dan kiri, tapi tidak mendapati ada orang lain selain aku dan para petugas payah itu. Tapi Hendro Kurniawan? Kupikir orang ini sudah salah sangka. Namaku bukan Hendro Kurniawan, dia adalah temanku si pelukis muda yang berbakat.

"Anda salah orang Pak, dan saya tidak kenal Anda," sanggahku dengan hormat. "Hendro Kurniawan adalah teman saya, tapi kenapa pula dia berurusan dengan anda dan orang-orang tak dikenal ini?"

Sebentar, bukankah barusan Avalokitesvara hendak meraih tanganku ketika aku sedang berada di galeri milik Hendro? Aku yakin karena ulah petugas yang sok barusan, aku jadi membalik badan dan sekarang seharusnya membelakangi lukisan yang kukagumi itu. Kenapa sekarang aku berada di pinggir jalan dan membelakangi tembok ruko kosong? Mereka pasti sudah melakukan sihir atau semacamnya.

"Oh, saya tidak salah Mas. Sampeyan tidak ingat kalau saya adalah teman mas Hendro? Saya ini dokter. Percayalah. Avalokitesvara yang Mas Hendro bicarakan itu sekarang ada di rumah saya. Kalian akan segera bertemu kalau Mas Hendro mau ke tempat saya. Naik mobil bersama orang-orang ini."

Otakku tidak bisa berpikir jernih lagi. Kata-kata itu seperti sihir yang tidak bisa aku tolak. Aku ragu dengan diriku sendiri dan berbalik memercayai lelaki jangkung itu. "Sungguh?" tanyaku.

Orang itu mengangguk.

"Baik Dok, temanku," kataku langsung akrab, seolah kami adalah anak-anak muda yang sudah berteman lama. "Aku mau ikut. Ha ha ha."

Matahari mulai tergelincir ke ufuk barat ketika aku menuruti permintaan untuk memasuki mobil yang tidak bisa aku tolak itu. Keberanianku untuk meronta hilang begitu berhadapan dengan sosok lelaki jangkung yang identitasnya tidak pernah kuketahui itu. Setiap inci tubuh, penampilan, kata-katanya tidak asing. Barangkali inilah yang membuatku menuruti kata-katanya. Aku juga tidak pernah tahu kalau mobil itu adalah mobil tugas milik lembaga swasta yang menyediakan jasa rehabilitasi penderita gangguan jiwa.



THE WORLD IS A BOOK AND THOSE WHO DO NOT TRAVEL READ ONLY ONE PAGE



Opini Subiyono

MENINGKATKAN MUTU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jika tidak mau dikatakan mati suri, dunia penelitian dan pengembangan (litbang) di Indonesia saat ini, masih mengalami stagnasi berkepanjangan. Lebih jauh, dunia kelitbang tidak akan pernah bangkit, selama pemerintah masih beranggapan, litbang belum terlalu diperlukan.

Kurangnya dukungan pemerintah, membuat lembaga litbang tak pernah menghasilkan produk kelitbang yang berkualitas. Banyak kualitas hasil-hasil kelitbang masih jauh dari harapan, mutu dan jumlahnya pun sangat rendah. Akibatnya lembaga litbang sarat dengan asumsi negatif sebagai lembaga sulit berkembang. Marjinalisasi dunia kelitbang oleh pemerintah semakin tidak bisa dibantah. Manakala lembaga kelitbang selalu diposisikan di belakang. Semakin kasat mata, ketika beberapa lembaga litbang yang berada di kementerian dan lembaga (K/L) selalu dipandang sebelah mata, bahkan jauh disejajarkan dengan komponen lainnya.

Tidak usah berbicara anggaran yang sudah minim. Dari sisi sumber daya manusia, lembaga litbang hanya sekadar dijadikan tempat evakuasi jabatan dan pegawai. Para pejabat atau staf yang ditempatkan umumnya selalu dianggap bermasalah, entah karena urusan pribadi dengan atasan atau melawan rezim yang berkuasa sebelumnya. Lembaga litbang kerap menjadi lahan kering bagi banyak pejabat struktural atau staf yang diduga bermasalah dan kurang produktif. Di sisi lain, beberapa peneliti potensial, justru dipindahkan menjadi pejabat struktural ke komponen

lainnya.

Kurang tepatnya penempatan peneliti. Baik dari segi kualifikasi latar belakang pendidikan, kepakaran, jenjang kepangkatan, rangkap jabatan, atau promosi jabatan lainnya, berimplikasi pada pelaksanaan kegiatan kelitbang jalan di tempat, serta menghasilkan sedikit *output*.

Menelisik akar masalah

Jika kita melihat berbagai permasalahan yang mendera lembaga kelitbang, muaranya bersumber pada *cultural perception* tidak sehat yang mencederai lembaga litbang di mana pun selama ini. Budaya persepsi tersebut sejatinya harus dikikis habis, dengan beberapa alternatif yang bisa menjadikan lembaga litbang berdaya guna.

Dalam sebuah lembaga litbang, tenaga fungsional seharusnya memegang peran penting dalam setiap program kegiatan (*heavy-nya* fungsional). Namun yang terjadi selama ini adalah sebaliknya. Akibatnya, proporsi jumlah jabatan antara struktural dan fungsional tidak seimbang, bahkan lebih condong kepada tenaga struktural.

Dengan struktur kelembagaan seperti itu, bisa dipastikan benturan atau konflik antara pejabat struktural dan pejabat fungsional akan sering terjadi. Proporsi alokasi anggaran juga tersedot ke dalam program kegiatan di luar program kegiatan kelitbang.

Anggaran di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), misalnya, kegiatan kelitbang

hanya dialokasikan 19,26 persen pada 2016 dari total Rp 55,9 miliar dari total pagu anggaran Kemendagri yang hanya sekira 1,27 persen. Struktur anggaran pun terkesan *jomplang* dan lebih condong ke dalam program kegiatan kesekretariatan (*supporting program*). Padahal idealnya program kelitbang lebih besar dari pada program kesekretariatan yakni sekira 60 persen berbanding 40 persen.

Solusi konkret

Terlepas dari beberapa permasalahan dan jargon negatif yang disematkan kepada lembaga kelitbang saat ini, masih banyak cara agar dunia kelitbang berdaya guna. Yang paling penting adalah kembali kepada lembaga litbang itu sendiri. Pentingnya membangun budaya sehat di lingkungan lembaga litbang serta mengubah paradigma kelitbang harus dikedepankan. Agar litbang selalu diposisikan menjadi dasar bagi proses perumusan setiap kebijakan.

Jika kita mau berkaca cara pemerintah negara-negara maju, mereka memosisikan lembaga kelitbang berada di garda terdepan, serta menjadi bagian penting yang sangat dibutuhkan. Lembaga kelitbang diperlakukan sangat serius, hati-hati dan penuh perhitungan matang. Hasil riset didorong agar mampu menciptakan temuan baru dan mampu menjadi akumulasi kapital/sumber uang, dapat menyerap tenaga kerja, serta menjadi solusi terhadap anggaran negara. Tentu implikasinya adalah kesejahteraan bangsa dan rakyatnya. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan memberikan fasilitas dan penghargaan yang setinggi tingginya terhadap lembaga dan penelitiannya dalam menghasilkan temuan-temuan berarti.

Indonesia bisa saja mewujudkan hal demikian, meski butuh proses panjang. Hal kecil bisa dimulai sedini mungkin. Dengan menyempurnakan lembaga kelitbang terlebih dahulu. Untuk itu perlu dilakukan revisi terhadap Permendagri No 69 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Permendagri No 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kemendagri, karena momentum yang pas bertepatan dengan terbitnya PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Hal lain, Perlu dilakukan kembali penataan jabatan struktural, fungsional dan staf melalui proses pemetaan SDM secara benar di masing-masing lembaga litbang. Penataan jabatan struktural bisa dilakukan dengan seleksi jabatan sesuai dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN atau dengan job fit. Adapun untuk menambah kualitas tenaga peneliti bisa dilakukan melalui tiga jalur. *Pertama*, reguler yang terdiri dari lulusan S2 dan S3. *Kedua*, jalur *empassing* (pejabat struktural atau yang mempunyai kualifikasi setara) pndah menjadi tenaga peneliti, serta *ketiga* alih tugas dengan menawarkan jabatan fungsional lain (dosen, analis kebijakan dan jabatan fungsional serumpun) menjadi peneliti. Untuk langkah-langkah tersebut perlu dilakukan koordinasi dengan Kemenpan dan RB, BKN, LIPI, LAN, dan K/L terkait, serta pemda.

Selain itu, lembaga kelitbang harus melakukan penyusunan anggaran berbasis kelitbang, peningkatan sumber daya manusia peneliti harus lebih terkonsentrasi terhadap isu nasional terkait pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah, khususnya yang terkait dengan persoalan dan implementasi kebijakan seperti contoh UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 6 Tahun 2015 tentang Desa, dan peraturan pendukung lainnya.

Yang terakhir yang mungkin bisa dilakukan adalah dengan melengkapi sarana dan prasarana kegiatan yang berhubungan dengan kelitbang, terutama perpustakaan dan jaringan atau akses internet, serta dengan melakukan penelitian dan pengembangan yang lebih inovatif, dan langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.



Subiyono,
Plt. Sekretaris Badan
Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Opini Adi Suhendra

TRUMP DAN HIPERREALITAS MEDIA SOSIAL

“Mengejutkan”. Mungkin *tagline* ini pas disematkan dalam pemilihan Presiden Amerika Serikat 9 November lalu. Dalam pemilihan itu, Donald Trump dipastikan menggantikan Barack Obama setelah berhasil mengumpulkan jumlah suara elektoral melebihi 270 yang diperlukan.

Sungguh di luar dugaan. Namun yang lebih mengejutkan lagi, kemenangan Trump itu sekaligus membungkam cuitan netizen di media sosial. Selama masa kampanye pembahasan politik di *facebook* dan *twitter* mampu melibatkan puluhan juta netizen yang aktif menyuarakan berbagai pandangannya, terkait calon presiden Amerika Serikat (AS).

Pandangan-pandangan netizen selama kampanye itu, terbagi dalam dua kubu. Pertama, pandangan kelompok dari Partai Republik yang didominasi oleh pengusaha, para orang tua dan kalangan konservatif, yang selalu memiliki pendapat, situasi politik yang ada telah berjalan dengan baik, karena pada praktiknya akan selalu ada perbaikan lewat sejarah dan tradisi yang panjang. Mereka cenderung menolak perubahan bahkan dapat dikatakan skeptis.

Selanjutnya, pandangan pendukung Hillary Clinton dari Partai Demokrat, memiliki basis pendukung terkuat dari kelompok pemuda, imigran, kaum feminis, dan dari golongan liberalis profesional bahkan Clinton muncul dari jajaran selebritis terkenal seperti Katy Perry, Arianna Grande, Cheyenne Jackson dan Chris Evans.

Suara dunia maya

Catatan yang dirilis oleh dua raksasa media sosial menunjukkan kampanye panjang Trump-Clinton menghasilkan bunga berkelanjutan di media sosial. tercatat sudah 35 juta *tweet* yang berkaitan dengan Pilpres AS. Hasil ini mengalahkan rekor sebelumnya pada Pilpres AS 2012, yang menghasilkan 31 juta *tweet*.

Tidak mau ketinggalan, *facebook* pun memberikan catatan sebanyak 8,8 miliar pengguna melakukan posting, suka, dan komentar yang diposting di antara 23 Maret 2015 sampai pemilihan presiden dilakukan. Trafik tertinggi di dapatkan dari aktivitas netizen sejak debat presiden kedua diselenggarakan pada awal Oktober. Perbincangan netizen memberikan lebih dari 92 juta “interaksi” oleh hampir 20 juta pengguna.

Dikutip dari laman Beritasatu (Rabu, 28/9 2016) Indonesia Indicator, perusahaan survei di bidang intelijen media, analisis data, dan kajian strategis mencatat, dalam tiga bulan terakhir, Trump memimpin di media *online* sekira 52,75 persen dalam sebulan terakhir. Ini artinya, Trump lebih mendominasi pemberitaan di media siber dibandingkan Clinton. Data ini diperoleh dari 11 ribu pemberitaan dari 101 media online AS.

Namun, jika dicermati tingginya akumulasi ekspos Trump di media daring tersebut, Trump justru mendapat sentiment negatif. Survei yang dilakukan oleh *brandwatch* dengan menggunakan media sosial, juga merilis

hasil survei bahwa Maestro properti Trump hanya mendapatkan 10,30 persen sentimen positif sedangkan sentimen negatif 43,25 persen dari 53,65 persen suaranya.

Trending itu diakibatkan oleh isu-isu kontroversial yang selalu dikemukakannya. Dilihat dari ekspos khusus media di seluruh negara bagian di AS, Clinton mendominasi hingga hampir 70 persen pada tiga bulan lalu dan menurun hingga 50 persen pada bulan selanjutnya. Situasi ini hampir mirip dengan survei lapangan yang dilakukan di mana Clinton menang di berbagai survei di Amerika.

Hiperrealitas media sosial

Kemenangan kandidat presiden Donald Trump, nyaris memang sungguh di luar dugaan. Tidak hanya pendukung Clinton yang merasa tidak percaya. Bahkan sebagian besar lembaga survei Amerika memprediksi kemenangan bagi Clinton. Bahkan tekanan kepada Trump semakin menghentak tatkala muncul video rekaman perilaku Trump tentang pencabulan yang merendahkan martabat wanita di Amerika pada 2005.

Jutaan netizen menghujat. Mulai dari artis, atlet, hingga tokoh politik seperti John McCain dan mantan Menlu AS Condoleezza Rice ramai-ramai mengecam Trump, tidak pantas menjadi presiden hingga sering menjadi *trending topic*.

Namun ini adalah fakta. Hasil pemilihan yang sebenarnya, bukan versi jajak pendapat. Takdir berkata Trump harus menjadi Presiden AS, dan mengguguli lauwannya Clinton.

Sebenarnya pelajaran menarik dalam pemilihan Presiden AS 2016 ini adalah, kenapa Trump bisa menang? Tentu banyak kemungkinan bisa terjadi dalam politik. Jika diamati, setidaknya ada tiga hal yang melatarbelakangi kemenangannya. *Pertama*, tak hanya di lembaga survei, belakangan ini kubu Trump memang selalu mengeluhkan media sosial Amerika Serikat (AS) yang menurut mereka berpihak kepada Clinton. Faktanya, asumsi marketing politik Clinton dalam membungkus opini publik, terpatahkan juga. Hal ini bisa saja terjadi karena suara pemilih Trump nyaris bermargin eror dalam setiap kesempatan survei.

Kedua, di dalam media sosial terdapat pendukung Trump yang lebih memilih menja-

di “*silent majority*”. Kalangan pemilih ‘*silent majority*’ menjadi impian bagi Trump untuk mendongkrak suaranya. Melalui tipe pemilih tersebut, dengan mudah ia dapat mendobrak pertahanan suara Clinton di Wisconsin, Michigan, dan Pennsylvania. Di mana Trump sama sekali tak bisa unggul dalam berbagai survei.

Ketiga, dalam konteks politik, media sosial terkadang juga salah dalam mempresentasikan suara pemilih. Hiperrealitas dalam media sosial menjadi kerap terjadi. Meminjam konsep Jean Baudrillard, media sosial dapat juga menjadi medan di mana orang ditarik ke dalam sebuah *black hole*.

Baudrillard menyebutnya *Simulacra*, realitas politik yang ada di media sosial itu menjadi realitas semu, realitas berlebihan (*hyper-reality*). Akhirnya kita mendapati satu kondisi yang di dalamnya kepalsuan berbaur dengan keaslian. Berita jelas dan tidak jelas. Massa di media sosial ada yang bernama dan tidak bernama (*anonymous*). Masa lalu berbaur dengan masa kini, fakta bersimpang siur dengan rekayasa, tanda melebur dengan realitas, dusta bersenyawa dengan kebenaran dan Kategori-kategori kebenaran, kepalsuan, keaslian, isu, realitas dalam massa Clinton dan Trump seakan-akan tidak berlaku lagi.

Fenomena Trump di AS senyatanya bisa dijadikan rujukan untuk pemilihan umum di Indonesia. Pertama, jika survei dilakukan dengan menggunakan media sosial, sebaiknya hanya digunakan untuk data pendukung. Karena sampel dari responden di media sosial cenderung tidak memiliki batas wilayah dan usia. Kemungkinan *margin of error* akan menjadi besar.

Kedua, banyaknya pelaku anonim (*buzzer*) dalam menggiring opini publik di media sosial juga perlu diwaspadai. Aktivitas ini cenderung naik saat masa kampanye berlangsung. Berbeda dengan di dunia nyata, survei dilakukan *by name by address*, meskipun hal ini dinilai wajar dalam berbagai pemilihan umum, namun kondisi ini berpotensi kuat menjadikan bias pada hasil survei.

Ketiga, sejatinya realitas sosial itu bermakna ganda, setiap individu memiliki makna, tujuan, dan motivasi tertentu. Ekses dari itu manusia bebas mengonstruksikan makna itu. Namun demikian, dalam ruang media sosial selayaknya kita selektif dalam menimbang informasi di ruang publik.



Adi Suhendra,
Peneliti Badan
Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Dalam Negeri

Ormas Preman

Situasi mencekam massa ormas Pembela Ahli Sunnah (PAS) dipimpin ketua umumnya membubarkan kegiatan Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) Natal Bandung 2016 di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga), beberapa waktu lalu. Seperti diwartakan media massa, sejumlah orang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Ro'in merangsek masuk ke dalam ruang utama dan membubarkan jemaat yang sedang menyanyikan kidung di atas panggung. Alhasil, KKR pun bubar.

Peristiwa di atas adalah secuil kelakuan ormas (organisasi masyarakat), yang kerap memaksakan kehendak dengan mencampakkan hukum. Padahal, tidak ada satu pun hukum di republik ini yang mengizinkan pembubaran ritual agama oleh ormas mana pun. Akan tetapi, hal seperti itu kerap terjadi, terutama pada musim umat beragama tertentu melakukan ritual keagamaan.

Pada saat Ramadhan atau Natal, misalnya, ada ormas tertentu bak preman yang melakukan *sweeping* terhadap rumah makan dan tempat-tempat hiburan malam. Mereka melarang tempat-tempat itu untuk beroperasi. Sedangkan, pada saat menjelang Natal, mereka melarang pusat perbelanjaan atau pun rumah makan untuk menampilkan para pegawainya mengenakan atribut Natal.

Ormas selalu berdalih bahwa mereka dilindungi UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3, yang menyatakan 'setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat'. Artinya, semua warga negara memiliki hak dan kebebasan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berorganisasi, meskipun kelak mereka tak ubahnya seperti preman kampung yang tidak paham etika dan hukum. Upaya penertiban terhadap mereka dianggap merampas kemerdekaan berserikat.

Tetapi, bagaimana pun, semua bentuk pemaksaan seperti itu jelas bertentangan dengan konstitusi. Konstitusi kita UUD 1945 atau pun regulasi lainnya yang diterbitkan negara tidak ada yang membenarkan tindakan itu. Oleh karenanya, ormas tersebut patut ditertibkan karena bertentangan dengan dasar negara kita Pancasila dan konstitusi. Ormas yang terbukti bertentangan dengan empat Pilar Kebangsaan yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI, serta melakukan praktik anarkisme dan premanisme harus menjadi prioritas untuk ditertibkan. Kalau perlu, ormas tersebut dibubarkan!

Celaknya, masih banyak saja ormas yang berulang kali melakukan praktik premanisme dan anarkisme tidak kun-

jung dibubarkan atau ditertibkan. Oleh karena itu, butuh konsistensi dalam penegakkan hukum. Di beberapa daerah, ormas-ormas yang sering kali menjadi biang keributan tidak berani dibubarkan pemerintah, karena memiliki kedekatan dengan penguasa, misalnya, atau punya basis elektoral yang banyak.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo pun acap mengeluhkan mudahnya setiap orang berserikat membentuk ormas. Namun, sebaliknya pemerintah justru susah untuk memberikan sanksi atau bahkan mencabut izin ormas tersebut jika tidak seiring dengan pemerintah. Sebagai informasi, kini ada sekira 287 ormas terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, 2.477 di provinsi, 1.807 di kabupaten/kota, 62 di Kementerian Luar Negeri, dan 250.000 di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tidak sedikit di antaranya kerap bertindak brutal.

Kendati begitu, upaya penertiban apalagi pembubaran ormas agaknya masih jauh panggang dari api. Meski sudah ada UU No 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Masyarakat sebagai payung hukum penertiban ormas, pemerintah terkesan tidak tegas dalam penegakkan hukum. Padahal, UU Ormas khususnya Pasal 59 Ayat 2 Huruf D dan E sudah memberi peluang penertiban.

Cuma, di samping itu juga, kalau merujuk regulasi yang ada, memang upaya penertiban terlebih lagi pembubaran ormas memerlukan jalan panjang dan berbelit. Sanksi dalam UU Ormas Pasal 60 sampai 82, misalnya, terlalu berbelit-belit. Tahapannya, harus melalui peringatan kesatu, kedua, dan ketiga, sampai tidak boleh beraktivitas sementara. Kalau meningkat lagi menjadi pembubaran, maka dilihat melalui proses peradilan. Kalau ormas berbadan hukum harus diajukan oleh Kemenkum HAM kepada pengadilan negeri setempat. Prosesnya panjang.

Oleh karenanya, pemerintah perlu segera merevisi UU Ormas. Buat regulasi yang memudahkan pembubaran ormas. Sejauh ini memang Kemendagri dan DPR sudah memasukkan revisi UU Ormas ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017. Revisi ini penting sebagai antisipasi pemerintah atas ormas anti-Pancasila dan selalu membuat onar dan memaksakan kehendak. Selain itu, pemerintah juga wajib berani dan tegas. Negara tidak boleh kalah dengan ormas preman.

Moh Ilham A Hamudy





Researchers, lecturers, and
public administration experts
are invited to contribute
their scientific papers to
JURNAL BINA PRAJA

CALL FOR PAPERS

HOME AFFAIRS GOVERNANCE

TERMS & CONDITIONS

Open to the public | Manuscripts may contain the results of empirical or nonempirical research | Manuscripts should address the theme and subthemes set by the Jurnal Bina Praja Editorial Team | Submitted manuscripts have not been published in other media | Manuscripts should have a minimum of 38.000-40.000 character without space in Indonesian or English (preferably in English) | For the writing systematics and format, see <http://binaprajajournal.com> | A minimum of 10 references taken from primary sources (scientific journals articles, dissertations, master's theses, undergraduate theses, and/or other research reports) | Attach biodata along with complete mailing address and contact

SUBTHEME

Regional Autonomy and Bureaucracy
Politics and Public Administration
Territorial Administration
and Rural Governance
Population and Civil Registration
Regional Election and Regional Innovation
Regional Fiscal Policy and Development
Other Issues in Public Administration

SUBMIT A SCIENTIFIC PAPER

on the theme of Home Affairs Governance
to jurnalbinapraja@yahoo.com

ACCREDITED NO

735/AU2/P2MI-LIPI/04/2016

INDEXED BY:

PUBLISHED BY



RESEARCH AND DEVELOPMENT AGENCY
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DOAJ DIRECTORY OF
OPEN ACCESS
JOURNALS



MENDELEY



ISJD

Google